

**STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN  
ANTARNEGARA: MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI  
ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

**DENDY KURNIADI**  
L4D 008 092



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

**STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN  
ANTARNEGARA: MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI  
ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**DENDY KURNIADI  
L4D 008 092**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 12 November 2009

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, November 2009

Tim Penguji:

Ir. Sunarti, MT- Pembimbing  
Ir. Agung Sugiri, MPSt - Penguji I  
Dr. Ing. Asnawi Manaf – Penguji II

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

**Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc**

**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab

Semarang, November 2009

**DENDY KURNIADI**

NIM L4D 008 092

HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN,  
BERSABARLAH KAMU DAN KUATKANLAH  
KESABARANMU DAN TETAPLAH BERSIAP  
SIAGA (DI PERBATASAN NEGERIMU) DAN  
BERTAKWALAH KEPADA ALLAH SUPAYA  
KAMU BERUNTUNG (QS. ALI IMRAN: 200)



*Kelulusan ini kupersembahkan untuk  
orang tua, istri, dan saudaraku,  
terimakasih atas segala kasih sayang,  
doa, dukungan baik moril maupun  
materiil dan kebbaikannya selama ini.*



“THINK GLOBALLY ACT LOCALLY,  
THINK LOCALLY ACT GLOBALLY”  
(SIMON BOLIVAR)

## ABSTRAK

Wilayah perbatasan saat ini memasuki paradigma baru pengembangan wilayah. Sebagai wilayah yang muncul akibat globalisasi maupun desentralisasi kebijakan, terjadi pergeseran paradigma keamanan menuju kesejahteraan. Karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain (immobilitas faktor produksi, biaya transaksi dan delay, sistem ekonomi yang berbeda, isu institusi, penetapan perwilayahan dan peran sektor informal) mendorong fungsi ekonomi wilayah tersebut pada sisi internal maupun eksternal. Perspektif ekonomi di wilayah perbatasan cenderung meningkat seiring perubahan paradigma tersebut. Dengan latar belakang diatas, Entikong merupakan wilayah perbatasan dengan aktivitas ekonomi tertinggi di sepanjang perbatasan darat (Kalimantan Barat-Sarawak). Terbukanya akses formal kawasan ini dimulai sejak tahun 1991, dengan dinamika aktivitas ekonomi yang ditunjukkan dengan meningkatnya arus pergerakan baik orang/barang. Tinjauan terhadap secara teoritis mencontohkan adanya peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi dari kesempatan ekonomi tersebut, namun sampai saat ini Entikong belum menunjukkan adanya perkembangan dalam konteks pengembangan sebuah kawasan perbatasan antarnegara dari perspektif ekonomi yang mendukung fungsi Entikong sebagai pusat pertumbuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan wilayah perbatasan Entikong ditinjau dari pembangunan ekonomi. Temuan studi ini diharapkan dapat menjadi arahan yang lebih spesifik terhadap pengembangan potensi ekonomi Entikong dalam perumusan strategi yang mendukung kebijakan pemerintah. Implikasi pengembangan kawasan perbatasan ditinjau pula dari pendekatan atas elemen *best practice* dan kajian teoritis dalam konteks pengembangan kawasan perbatasan yang selanjutnya menjadi masukan bagi perumusan strategi.

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan variabel penelitian yang tersintesis dari literatur mengenai pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Metode triangulasi (*concurrent triangulation*) digunakan untuk saling melengkapi hasil kajian secara kualitatif dan kuantitatif pada analisis inter maupun intraregional. Analisis dalam penelitian ini adalah spasial kawasan, struktur ekonomi, serta analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif yang menggunakan data-data sekunder dan primer (wawancara dan observasi).

Temuan studi ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kecamatan Entikong. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi memiliki peluang dalam pengembangan kawasan perbatasan karena kawasan ini memiliki modal dasar penting dalam pengembangan kawasan perbatasan, yaitu elemen budaya, kerangka kerja institusi, ketertarikan sektor swasta, pendekatan infrastruktur, kebijakan dan investasi. Kendala pengembangan perbatasan dalam perspektif ekonomi ini adalah peran kebijakan dan infrastruktur yang belum mendukung pengembangan kawasan perbatasan. Berdasarkan permasalahan yang muncul dari analisis diatas, maka strategi pengembangan perbatasan tersebut antara lain adalah mendorong regulasi yang kondusif dan operasional bidang pengembangan perekonomian kawasan perbatasan, menyusun *road map* penataan ruang yang efektif dan operasional, melakukan improvisasi pengembangan infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan (*hard & soft*), meningkatkan peran sektor unggulan dan mendorong sektor lainnya dalam pertumbuhan, meningkatkan perhatian pada sustainabilitas pembangunan dan pengembangan SDM, dan fasilitasi perdagangan internal dan eksternal.

**Kata kunci:** wilayah perbatasan, pertumbuhan ekonomi, strategi pengembangan

## ABSTRACT

*Border region is now entering new paradigm of regional development. As a region due to globalization and decentralization policies, the security paradigm transform into prosperity and identity. Different characteristics from other regions (immobility factors of production, transaction costs and delay, a different economic system, institutional issues, the establishment of zoning and the role of the informal sector) encourage economic function in the region internally and externally. Economic perspective in the border regions tend to increase as the paradigm changed. From the previous background, Entikong is a border area with the highest economic activities along the land border (West Kalimantan-Sarawak). Formal access of this area opened in 1991 with the dynamics of economic activities proved by the increase in flow movement (people and goods). From literature perspective, this region has a chance in the economic growth, but so far, it has not shown any developments in the context of developing an inter-state border region from an economic perspective that can support Entikong functions as a growth center.*

*The main question is: “How is the border development strategy in spurring economic growth in Entikong?”. To answer that question, the paper proposes a review of spatial and economic aspects of the region as well as the best practice development of border areas that can help to resolve the problem in Entikong.*

*Concurrent triangulation method is used to complete the results of the study in qualitative and quantitative approach, on inter and intraregional analysis. The analyses in this study are spatial region, economic structure, development of border area, and formulation of development strategy.*

*The findings of this study show the economic growth occurred in Entikong. The Economic growth has opportunities in the development of border area, because this area has significant capital equity in the development of border areas, i.e. cultural, institutional framework, private sector interest, infrastructure and policies approaches. The border development strategy is base on the problems arisen from the above analysis. These strategies are encouraging a conducive and operational regulatory, organizing road map of effective spatial planning and operations, improvising on hard & soft infrastructure development that responds to the needs of development, increasing the role of leading sector and encouraging other sectors in growth, increasing attention to the sustainability of development and human resource development, facilitating of internal and external trade.*

**KEYWORDS:** *border regions, economic growth, development strategy*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan keyakinan kepada saya untuk menyelesaikan tesis dengan judul **“Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”**. Laporan ini disusun untuk memenuhi kelengkapan akademi dalam pendidikan Strata Dua (S2) Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyusunannya penulis menemui rintangan dan hambatan, namun hal itu dapat diatasi berkat bantuan, dukungan, dan bimbingan semua pihak yang mampu membuka jalan bagi penulis dalam penyusunan Laporan Tesis ini, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusun selalu bersemangat dalam menggali ilmu-Nya dan membuahkan kesabaran serta keterbukaan pikiran;
2. Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum;
3. Pusbindiklatren BAPPENAS, selaku pemberi beasiswa program ini;
4. Ibu Ir. Sunarti, MT, selaku dosen pembimbing;
5. Bapak Ir. Agung Sugiri, MPst, selaku dosen penguji I;
6. Bapak Dr. Ing. Asnawi Manaf, selaku dosen penguji II;
7. Bapak Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc., selaku ketua Program MTPWK Universitas Diponegoro;
8. Bapak Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP, selaku sekretaris Program MTPWK Universitas Diponegoro;
9. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA, yang telah memberikan masukan dan perhatian terhadap aspek kawasan perbatasan;
10. Bapak Arkan Yamri, ST, selaku Kepala SNVT Pengembangan Permukiman Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, atas segala dukungan dan bantuannya;
11. Bapak Ir. Ari Yanuarif, MT, selaku Sekretaris Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Provinsi Kalimantan Barat;
12. Bapak M. Yusuf, BE, selaku anggota tim kerjasama SOSEK MALINDO dan tim Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong Kalimantan Barat;
13. Bapak Ir. Fahruzi, MT, selaku Kasubid Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
14. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Pascasarjana MTPWK Universitas Diponegoro;
15. Bapak, Ibu, Istri, Kakak, dan Adik selaku orang-orang terdekat yang telah memberikan dukungan serta doa-doa yang senantiasa mengiringi langkah saya;
16. Rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif akan penulis terima dengan senang hati dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun pihak yang memerlukan.



Semarang, November 2009

Dendy Kurniadi

## **GLOSSARY**

BDC	:	Border Development Centre
BIMP-EAGA	:	Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area
BLK	:	Balai Latihan Kerja
BP2KKP	:	Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan
BTB	:	Border Trade Agreement
CPO	:	Crude Palm Oil
ETM	:	Enhanced Thematic Mapper
FTZ	:	Free Trade Zone
KILB	:	Kartu Identitas Lintas Batas
KPP	:	Komponen Pertumbuhan Proporsional
KPPW	:	Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah
KPW	:	Komponen Pertumbuhan Wilayah
LQ	:	Location Quotient
PB	:	Pergeseran Bersih
PDRB	:	Produk Domestik Regional Brutto
PKSN	:	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PLB	:	Pos Lintas Batas
PPLB	:	Pos Pemeriksaan Lintas Batas
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWN	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SEZ	:	Special Economic Zone
SNVT	:	Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
SOSEK MALINDO	:	Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia
TCBL	:	Thailand China Burma Laos

UKM : Usaha Kecil Menengah  
UPT : Unit Pelaksana Teknis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>GLOSSARY.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan.....	7
1.3.2 Sasaran.....	7
1.4 Ruang Lingkup.....	8
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	8
1.4.2 Ruang Lingkup Materi.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.5.2 Manfaat Praktis.....	12
1.6 Keaslian Penelitian.....	12
1.7 Metode Penelitian.....	14
1.7.1 Kerangka Konseptual.....	14
1.7.2 Pendekatan Penelitian .....	15
1.7.3 Kebutuhan Data.....	16
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.7.5 Teknik Analisis .....	19
1.7.6 Kerangka Analisis.....	24
1.8 Sistematika Pembahasan.....	27

<b>BAB II</b>	<b>PERSPEKTIF PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN.....</b>	<b>29</b>
2.1	Karakteristik Wilayah Perbatasan.....	29
2.1.1	Pengertian Wilayah Perbatasan.....	31
2.1.2	Hubungan di Kawasan Perbatasan.....	32
2.1.3	Tipologi Pengembangan Wilayah Perbatasan.....	36
2.2	Kebijakan di Wilayah Perbatasan.....	38
2.2.1	Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan.....	38
2.2.2	Pendekatan dalam Pengembangan Wilayah Perbatasan.....	40
2.3	Konsep Pertumbuhan Ekonomi.....	44
2.3.1	Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan....	45
2.3.2	Struktur Ekonomi Wilayah.....	47
2.3.3	Teori Basis Ekonomi Wilayah.....	47
2.3.4	Kinerja Perekonomian Wilayah.....	48
2.4	Strategi Pengembangan .....	49
2.5	Sintesa <i>Review</i> Literatur.....	49
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN KAWASAN PERBATASAN ENTIKONG.....</b>	<b>55</b>
3.1	Kondisi Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat.....	55
3.2	Kondisi Kecamatan Entikong.....	58
3.2.1	Penggunaan Lahan dan Struktur Ruang.....	60
3.2.2	Kependudukan.....	61
3.2.3	Perekonomian Kawasan.....	64
3.2.3.1	Struktur Ekonomi Kecamatan Entikong dan Kabupaten Sanggau.....	66
3.2.3.2	Aktivitas Perdagangan dan Komoditas....	68
3.2.3.3	Isu dan Permasalahan Perekonomian.....	69
3.2.4	Fasilitas Kawasan Perbatasan Entikong (Pos Pemeriksaan Lintas Batas).....	70
3.3	Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong..	73
3.3.1	Kebijakan Makro.....	73
3.3.2	Kebijakan Mikro.....	74
3.4	Kondisi Wilayah Serawak.....	77
3.5	Komparasi antara Kawasan Perbatasan Entikong dengan Distrik Tebedu-Sarawak.....	78
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PERBATASAN ENTIKONG.....</b>	<b>83</b>
4.1	Analisis Spasial Wilayah Perbatasan Entikong.....	83
4.1.1	Penggunaan Lahan.....	83
4.1.2	Struktur Ruang.....	87
4.1.3	Kependudukan.....	89
4.2	Analisis Ekonomi Wilayah Entikong.....	93
4.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	95
4.2.2	Sektor Basis Kecamatan Entikong.....	97

4.2.3	Kinerja Sektor Perekonomian Kecamatan Entikong.....	99
4.2.4	Sektor Prioritas.....	104
4.3	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong.....	106
4.3.1	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Perbatasan Entikong.....	107
4.3.2	Analisis Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong.....	114
4.4	Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong....	117
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>123</b>
5.1	Kesimpulan.....	123
5.2	Rekomendasi.....	126
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>129</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>135</b>
	<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>160</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL I.1</b>	: Keaslian Penelitian.....	13
<b>TABEL I.2</b>	: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dalam <i>Concurrent Triangulation Strategy</i> .....	16
<b>TABEL I.3</b>	: Kebutuhan Data.....	17
<b>TABEL II.1</b>	: Fungsi Kawasan Perbatasan.....	32
<b>TABEL II.2</b>	: Tipologi Pengembangan Kawasan Perbatasan.....	37
<b>TABEL II.3</b>	: Elemen Kunci dalam Kebijakan Pengembangan Perbatasan.....	39
<b>TABEL II.4</b>	: <i>Best Practice Infrastructure-LED Development</i> .....	40
<b>TABEL II.5</b>	: <i>Best Practice Investment-LED Development</i> .....	41
<b>TABEL II.6</b>	: Tiga Pendekatan dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan.....	43
<b>TABEL II.7</b>	: Sintesa Perspektif Pengembangan Kawasan Perbatasan.....	52
<b>TABEL II.8</b>	: Variabel Penelitian.....	53
<b>TABEL III.1</b>	: Luas Wilayah Administrasi Kota Entikong Kabupaten Sanggau.....	58
<b>TABEL III.2</b>	: Jarak dari Desa di Kota Entikong ke Ibukota Kecamatan, Kabupaten, Provinsi.....	59
<b>TABEL III.3</b>	: Nama Desa dan Dusun yang Berbatasan Langsung dengan Sarawak.....	60
<b>TABEL III.4</b>	: Penduduk Kecamatan Entikong Tahun 2007.....	62
<b>TABEL III.5</b>	: Komposisi Penduduk Kecamatan Entikong Tahun 2007.....	62
<b>TABEL III.6</b>	: Komposisi Penduduk Migrasi Kecamatan Entikong Tahun 2007.....	64
<b>TABEL III.7</b>	: Potensi Pertanian di Kecamatan Entikong.....	65
<b>TABEL III.8</b>	: Potensi Industri dan Perdagangan di Kecamatan Entikong.....	65
<b>TABEL III.9</b>	: Potensi Pariwisata di Kecamatan Entikong.....	66
<b>TABEL III.10</b>	: PDRB Kecamatan Entikong Tahun 2007 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000.....	66
<b>TABEL III.11</b>	: PDRB Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000.....	67
<b>TABEL III.12</b>	: Komoditas dan Jumlah Pedagang di Pasar Tenda Kecamatan Entikong.....	69
<b>TABEL III.13</b>	: Sektor Prioritas di Kecamatan Entikong.....	76
<b>TABEL III.14</b>	: Komparasi Terkait Dengan Pertumbuhan Ekonomi di Entikong dan Tebedu.....	78
<b>TABEL IV.1</b>	: Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Entikong Tahun 2003-2007.....	85

<b>TABEL IV.2</b>	: Hasil Analisis Proyeksi Penduduk Tahun 2001-2007.....	90
<b>TABEL IV.3</b>	: Kontribusi PDRB Kecamatan Entikong terhadap PDRB Kabupaten Sanggau Tahun 2003-2007 Atas Dasar Harga Konstan 2000.....	93
<b>TABEL IV.4</b>	: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektoral Tahun 2003-2007.....	96
<b>TABEL IV.5</b>	: Nilai LQ Setiap Sektor Usaha di Kecamatan Entikong Tahun 2003-2007 (Dalam Jutaan Rupiah)...	97
<b>TABEL IV.6</b>	: Hasil Pengolahan <i>Shift-Share</i> Tahun 2003-2007 (PDRB dalam Jutaan Rupiah).....	100
<b>TABEL IV.7</b>	: Nilai Pergeseran Bersih (PB) dan <i>Location Quotient</i> Persektor di Kecamatan Entikong.....	104
<b>TABEL IV.8</b>	: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terkait Elemen <i>Best Practice</i> Pengembangan Perbatasan Darat Antarnegara.....	115
<b>TABEL IV.9</b>	: Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong dalam Perspektif Ekonomi.....	118

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1.1</b>	: Perkembangan Lintas Batas Orang Melalui PPLB Entikong Tahun 1991-2001.....	2
<b>GAMBAR 1.2</b>	: Realisasi Barang Masuk dan Barang Keluar yang Menggunakan KILB di Lintas Batas Entikong (Dalam US \$).....	3
<b>GAMBAR 1.3</b>	: Kecamatan Entikong Sebagai Wilayah Studi.....	8
<b>GAMBAR 1.4</b>	: Kerangka Pemikiran.....	11
<b>GAMBAR 1.5</b>	: Diagram Metode Penelitian.....	16
<b>GAMBAR 1.6</b>	: Komponen dalam Analisis Shift Share.....	22
<b>GAMBAR 1.7</b>	: Identifikasi Prioritas Sektor Unggulan.....	24
<b>GAMBAR 1.8</b>	: Kerangka Analisis.....	26
<b>GAMBAR 2.1</b>	: Model Transaksi di Wilayah Perbatasan.....	33
<b>GAMBAR 2.2</b>	: Hubungan di Wilayah Perbatasan.....	34
<b>GAMBAR 2.3</b>	: Konsep Osmosis dalam <i>Semi-Permeable Membran</i> (Perbatasan).....	35
<b>GAMBAR 2.4</b>	: Tiga Paradigma Pendekatan dalam Upaya Pengembangan Integrasi Ekonomi Uni Eropa.....	38
<b>GAMBAR 2.5</b>	: Distorsi Area Pasar Akibat Adanya Berbagai Rintangan di Wilayah Perbatasan.....	46
<b>GAMBAR 2.6</b>	: Konstruksi Teoritis.....	51
<b>GAMBAR 3.1</b>	: Peta Cakupan Kawasan Perbatasan Kalbar.....	56
<b>GAMBAR 3.2</b>	: Ilustrasi Lini Pada Kawasan Perbatasan.....	57
<b>GAMBAR 3.3</b>	: Wilayah Administrasi Kecamatan Entikong.....	59
<b>GAMBAR 3.4</b>	: Pertumbuhan Aktivitas Sepanjang Jalan Arteri Menuju Perbatasan.....	61
<b>GAMBAR 3.5</b>	: Piramida Penduduk Kecamatan Entikong.....	63
<b>GAMBAR 3.6</b>	: Distribusi Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi Kecamatan Entikong Tahun 2007.....	67
<b>GAMBAR 3.7</b>	: Distribusi Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi Kabupaten Sanggau Tahun 2007.....	68
<b>GAMBAR 3.8</b>	: Milestone Perkembangan Status PLB Menjadi PPLB Entikong.....	72
<b>GAMBAR 3.9</b>	: Desain Pengembangan Perekonomian Kawasan Entikong.....	75
<b>GAMBAR 4.1</b>	: Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Entikong 2003-2007.....	84
<b>GAMBAR 4.2</b>	: Penggunaan Lahan di Sepanjang Koridor Arteri Menuju Pintu Lintas Batas Entikong–Sarawak.....	86
<b>GAMBAR 4.3</b>	: Perkembangan Struktur Ruang Kecamatan Entikong....	87
<b>GAMBAR 4.4</b>	: Kepadatan Penduduk di Kecamatan Entikong Tahun 2007 dan 2017.....	91
<b>GAMBAR 4.5</b>	: Ringkasan Analisis Kondisi Spasial Perbatasan	

	Entikong.....	92
<b>GAMBAR 4.6</b>	: PDRB Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Entikong Tahun 2003-2007.....	94
<b>GAMBAR 4.7</b>	: Grafik Kontribusi Kecamatan Entikong terhadap Kabupaten Sanggau Tahun 2003-2007.....	95
<b>GAMBAR 4.8</b>	: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Entikong Tahun 2003-2007.....	96
<b>GAMBAR 4.9</b>	: Pengelompokkan Sektor Berdasarkan Analisis <i>Shift-Share</i> Tahun 2003-2007.....	101
<b>GAMBAR 4.10</b>	: Identifikasi Sektor Prioritas di Kecamatan Entikong....	105
<b>GAMBAR 4.11</b>	: Ringkasan Hasil Analisis Ekonomi Kecamatan Entikong.....	106
<b>GAMBAR 4.12</b>	: Distorsi Pasar Pada Kawasan Perbatasan Entikong yang Menjadi Barrier dalam Pertumbuhan Ekonomi.....	111
<b>GAMBAR 4.13</b>	: Konsep Osmosis dalam Pergerakan Aliran Perekonomian di Perbatasan.....	112
<b>GAMBAR 4.14</b>	: Prioritas Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong dalam Perspektif Ekonomi.....	121



## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN A</b>	: Panduan Wawancara.....	135
<b>LAMPIRAN B</b>	: Panduan Observasi Lapangan.....	139
<b>LAMPIRAN C</b>	: Hasil Wawancara.....	141

# **BAB I**

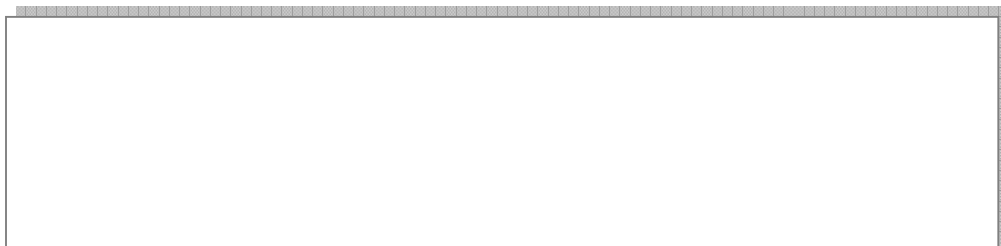
## **PENDAHULUAN**

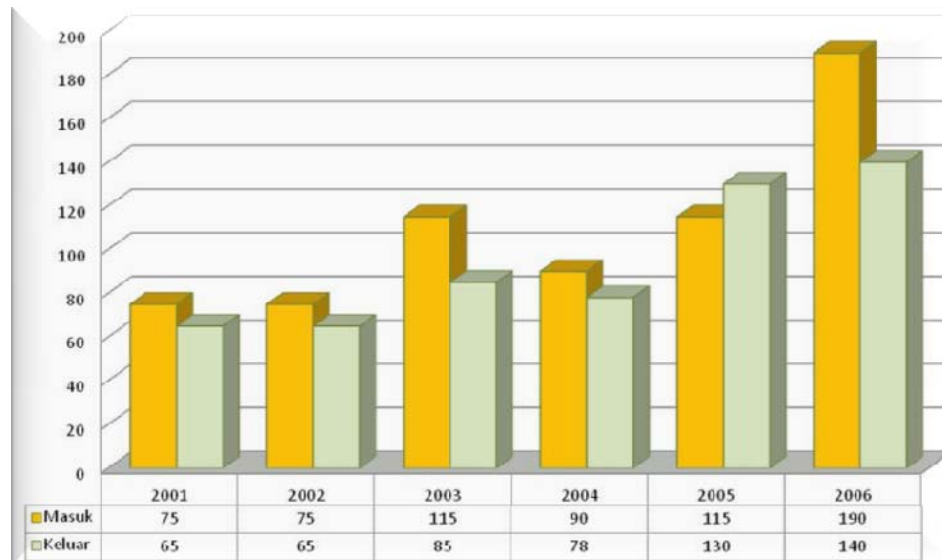
### **1.1 Latar Belakang**

Perhatian terhadap wilayah perbatasan antarnegara dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat seiring dengan fungsi wilayah ini sebagai batas sumber daya. Kesempatan ekonomi tersebut muncul karena adanya pemanfaatan sumber daya di kedua wilayah yang berbatasan dan kedekatannya secara spasial (Van Well, 2005; Niebuhr dan Stiller, 2001). Selain itu, meningkatnya peluang pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perubahan kondisi kedua negara ke arah kerjasama yang cenderung meningkatkan potensi pergerakan dengan motif kesempatan ekonomi (perusahaan maupun individual) karena tingginya potensi pasar dalam mengakomodasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh kedua wilayah (Akaha dan Vassilieva, 2005:1).

Peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan dimiliki oleh Entikong. Kawasan ini merupakan kawasan perbatasan yang paling tinggi aktivitas ekonominya di sepanjang Kalimantan Barat–Sarawak (Kompas, 2003). Aktivitas ekonomi tersebut sebagian besar adalah sektor perdagangan yang tumbuh akibat terbukanya pintu lintas batas formal Entikong–Tebedu (Sarawak) sejak tahun 1991. Sebagai pintu lintas batas, kawasan ini menjadi pintu masuk dan pintu keluar bagi arus perdagangan yang terjadi antar wilayah, serta menjadi lokasi yang strategis bagi kegiatan perekonomian.

Posisi Entikong yang strategis dan adanya akses formal perbatasan menyebabkan pergerakan komoditas barang dan manusia mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi pada arus masuk maupun yang keluar. Dari sisi pergerakan manusia, cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata arus masuk lebih tinggi dari arus keluar. Peningkatan pergerakan disebabkan oleh berubahnya fungsi pos pelintas batas yang tidak hanya dilalui oleh pelintas tradisional tetapi disebabkan pula oleh pelintas non tradisional (Gambar 1.1).



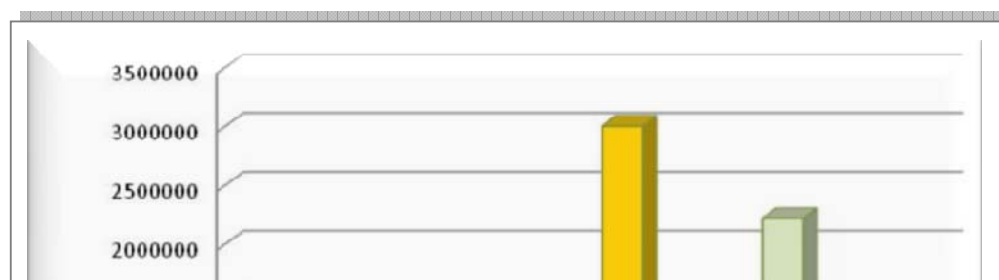


Sumber: Ditjen Cipta Karya, 2007

**GAMBAR 1.1**  
**PERKEMBANGAN LINTAS BATAS ORANG MELALUI PPLB ENTIKONG**  
**TAHUN 1991-2001**

Perkembangan kegiatan perdagangan yang diusahakan secara tradisional melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong ternyata memiliki nilai realisasi yang cukup tinggi. Berjalannya kegiatan tersebut menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) dengan dokumen perijinan khusus (paspur merah) dan waktu terbatas (pergi pagi pulang sore hari). Tercatat nilai realisasi sejak tahun 2001 sampai 2006 telah mencapai US \$ 10.456.121,75 (Gambar 1.2).

Gambaran mengenai aktivitas perekonomian di perbatasan Entikong tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam hubungan yang terjadi di kawasan perbatasan. Dampak terbukanya akses perbatasan menunjukkan berkembangnya aktivitas ekonomi yang berpotensi dalam pengembangan kawasan perbatasan lebih lanjut. Kondisi demikian dialami pula oleh beberapa negara yang melihat potensi perekonomian sebagai motor dalam pengembangan perbatasan.



*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, 2009*

**GAMBAR 1.2**  
**REALISASI BARANG MASUK DAN BARANG KELUAR YANG**  
**MENGUNAKAN KILB DI LINTAS BATAS ENTIKONG (DALAM US \$)**

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi pada kawasan perbatasan darat antarnegara, Wu (2001), memberikan beberapa contoh kawasan perbatasan darat antarnegara seperti Polandia-Jerman dan China-Vietnam. Pada wilayah perbatasan Jerman-Polandia, fenomena konflik demokrasi dan politik yang terjadi di wilayah tersebut menyebabkan menjamurnya kegiatan sektor informal dalam perekonomian di kawasan perbatasan Polandia. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di sisi Polandia, karena tingginya harga barang yang ada di Jerman membuat warga Jerman tertarik untuk berbelanja. Namun di sisi lain, Jerman menangkap peluang kerjasama dalam pengembangan industri manufaktur dengan peluang tenaga kerja dari Polandia, meskipun dalam konteks ini diperlukan institusi dan kebijakan dalam pengembangannya.

Kawasan perbatasan lain yang berbasis pada perdagangan terdapat juga di perbatasan antara China dan Vietnam (Guang Xi-Quan Ninh). Adanya zona industri khusus di sisi China untuk menarik investasi menyebabkan tingginya arus perdagangan dan menarik investasi asing dalam pengembangan kawasan, begitu pula dari sisi Vietnam, besarnya daya tarik wisata menyebabkan arus masuk wisatawan di perlintasan. Kondisi demikian mendorong adanya pengembangan di kawasan

perbatasan karena adanya komplementaritas kegiatan ekonomi dan adanya instrumen kebijakan pendukung.

Fokus lain dalam pertumbuhan perekonomian di perbatasan selain adanya komplementaritas ekonomi adalah potensi pasar. Niebuhr dan Stiller (2001) berpendapat bahwa pertumbuhan potensi pasar di wilayah perbatasan yang terintegrasi, memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan regional dan peningkatan tenaga kerja, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan. Dalam konteks kawasan perbatasan Entikong, berbagai potensi pengembangan ekonomi sudah sejak lama dimiliki, namun kondisi tersebut belum berkembang sebagai sebuah kawasan yang memiliki keuntungan (sebagai poin penting dari kedekatan geografis dengan negara tetangga, kawasan ini merupakan Kawasan Strategis Nasional yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan *Border Development Centre* sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat tahun 2004, meskipun kedekatan secara spasial dan pasar wilayah tetangga menunjang dalam pengembangan kawasan tersebut. Beberapa contoh kasus di kawasan perbatasan darat menunjukkan bahwa dampak terbukanya kawasan perbatasan antarnegara memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi di kedua wilayah yang berbatasan.

Peran terbukanya akses formal Entikong–Tebedu (Sarawak) sejak tahun 1991, merupakan langkah penting dalam pertumbuhan ekonomi di perbatasan. Diresmikannya Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) dari semula Pos Lintas Batas (PLB), menjadikan Entikong sebagai pintu keluar masuk antarnegara (Indonesia-Malaysia) yang berlaku secara internasional. Kondisi tersebut mengubah peran sebuah kawasan perbatasan Entikong sebagai pintu utama dalam koneksitas dengan negara tetangga yang sebelumnya dilakukan secara tradisional dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan. Seperti petikan wawancara berikut:

*“Tujuan awal dari terbukanya PPLB Entikong tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, khususnya pihak Indonesia”* (FBT/SOS-01/03/03).

*“Dengan adanya border dibuka, masyarakat patuh secara peraturan internasional yang berlaku, yang sebelumnya awam tentang aturan perbatasan tersebut”* (FBT/SOS-01/03/04).

Kondisi dari perubahan status perbatasan tersebut berimbas pada munculnya aktivitas ekonomi baik yang dilakukan oleh masyarakat khusus perbatasan maupun

yang berada di luar perbatasan. Kontras dengan pihak Sarawak yang mampu membangun kawasan perbatasan dengan baik, keberadaan Entikong sebagai sebuah kawasan perbatasan terlihat belum siap dalam mengantisipasi dinamika sebuah kawasan perbatasan dengan potensi ekonomi dan kedekatan spasial yang seharusnya dapat dimanfaatkan.

*“Pada kasus Entikong, yang terjadi adalah ketergantungan yang sangat tinggi dengan pihak Malaysia, karena belum ada solusi untuk membuat produk yang bisa di ekspor, sementara sebelum border dibuka sampai dengan sesudah dibuka, masyarakat selalu berorientasi untuk berbelanja ke seberang (alasan harga, kualitas, prosedur, birokrasi yang lebih baik)” (MSL/PU-06/01/04).*

Wilayah perbatasan Entikong memiliki potensi perekonomian, lokasi strategis, dan dukungan akses formal yang seharusnya dapat berkembang seperti beberapa kawasan perbatasan lain yang dicontohkan diatas. Berkembangnya sebuah kawasan perbatasan dengan basis potensi tersebut dapat dilakukan dalam konteks pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan kawasan perbatasan yang menguntungkan bagi kedua pihak (Wu, 2001). Dengan melihat pada urgensi penanganan sebuah kawasan perbatasan (seperti Entikong) yang memiliki berbagai potensi ekonomi, perspektif pertumbuhan ekonomi di perbatasan sangat diperlukan dalam merumuskan strategi yang efektif dalam mencapai fungsi kawasan perbatasan yang salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan dengan memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan aspek spasial terkait, dalam pengembangan wilayah perbatasan di Entikong. Selanjutnya dari temuan penelitian tersebut akan dirumuskan strategi sebagai masukan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan Entikong dengan pertimbangan terhadap kebijakan/regulasi yang ada pada wilayah perbatasan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Permasalahan yang mendasari penelitian ini diawali dari terbukanya akses formal perbatasan darat Entikong dengan Sarawak (Malaysia) sejak tahun 1991. Terbukanya akses tersebut menunjukkan peran kawasan perbatasan yang mengalami pergeseran prioritas dari pendekatan keamanan menjadi kesejahteraan. Perubahan paradigma tersebut dalam konteks memberikan kesejahteraan pada kedua wilayah yang

berbatasan untuk mengusahakan kegiatan ekonominya, meskipun pendekatan dari sisi keamanan tetap dilakukan.

Berbagai aktivitas dan kegiatan perekonomian di perbatasan Entikong terus tumbuh dan berkembang sejak dibukanya akses tersebut. Adanya potensi pasar dan kedekatan secara geografis mendorong majunya aktivitas perekonomian baik secara tradisional (masyarakat perbatasan) maupun non tradisional (masyarakat non perbatasan). Aktivitas tersebut berlangsung dengan adanya perjanjian yang dilakukan sejak tahun 1970-an, yaitu adanya *Border Trade Agreement* (BTA) yang mengatur kegiatan perekonomian di kedua wilayah.

Dalam rentang waktu sekitar 18 tahun sejak terbukanya akses formal dengan Sarawak, peran terbukanya kawasan perbatasan terhadap pertumbuhan ekonomi terlihat dari berkembangnya sektor riil perekonomian di kawasan ini (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2007). Namun pertumbuhan tersebut berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti beberapa petikan wawancara berikut:

*“Terbukanya akses perbatasan Entikong terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut memiliki implikasi yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun berbanding terbalik dengan implikasinya terhadap pemerintah daerah, karena pihak yang berperan dalam pengelolaan perbatasan tersebut adalah pemerintah pusat (Bea Cukai, Imigrasi) sehingga praktis penerimaan dari PPLB mengalir ke pusat. Dalam hal pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, perubahan tersebut terjadi di Entikong, namun sangat lambat dan cenderung tidak berkontribusi terhadap perkembangan sebuah kawasan perbatasan”* (MSL/KKP-02/01/01).

*“Terbukanya akses sejak 1989 tidak membawa perubahan yang berarti bagi pengembangan perbatasan, praktis selama hampir 20 th tidak ada perubahan berarti, dan pemerintah pusat hanya memberikan janji dalam membangun kawasan perbatasan”* (MSL/UPT-03/04/06).

Terkait dengan posisi Entikong sebagai pintu gerbang internasional dan pusat pertumbuhan (sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan sebagai Pusat Pembangunan Perbatasan/*Border Development Centre*), Entikong seharusnya mampu berkembang dan menjadikan wilayah ini sebagai motor pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, *problem statement* yang muncul adalah perlunya tinjauan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan Entikong dalam rangka pengembangan perbatasan. Bertitik tolak dari *problem statement*, maka pertanyaan penelitian/*research question* yang muncul adalah: **“Bagaimanakah strategi**

**pengembangan wilayah perbatasan Entikong dalam memacu pertumbuhan ekonomi?”** Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, selanjutnya akan disusun strategi mengenai pengembangan perbatasan Entikong melalui perspektif ekonomi.

## 1.3 Tujuan dan Sasaran

### 1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan wilayah perbatasan Entikong dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

### 1.3.2 Sasaran

Beberapa sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan dari penelitian ini adalah:

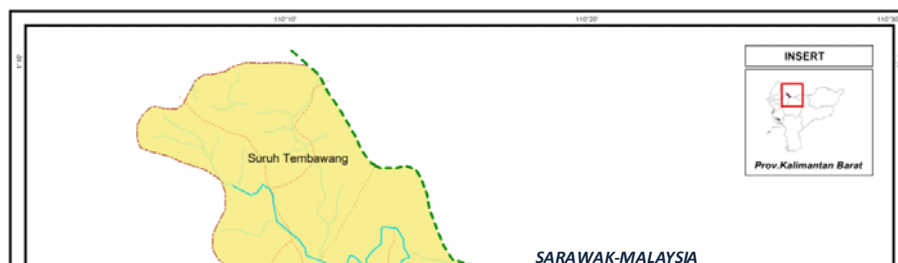
1. Melakukan identifikasi dan analisis spasial wilayah perbatasan Entikong ditinjau dari penggunaan lahan, struktur ruang dan kependudukan;
2. Melakukan identifikasi dan analisis perekonomian wilayah perbatasan Entikong;
3. Melakukan analisis pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah perbatasan;
4. Merumuskan strategi pengembangan wilayah perbatasan berbasis pada perspektif pembangunan ekonomi.

## 1.4 Ruang Lingkup

### 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Entikong merupakan salah satu dari 22 kecamatan yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Sanggau dengan batas-batas sebagai berikut (Gambar 1.3):

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pontianak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sekayam
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sambas





*Sumber: Bappeda Kabupaten Sanggau, 2009*

### **GAMBAR 1.3** **KECAMATAN ENTIKONG SEBAGAI WILAYAH STUDI**

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Materi**

Fokus dari penelitian ini adalah penilaian atas kondisi pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Entikong dan aspek spasial, serta pengembangan kawasan perbatasan ditinjau dari pertumbuhan ekonominya. Secara garis besar ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah:

- *Strategi pengembangan*: dalam konteks perencanaan, strategi ini diartikan sebagai perencanaan secara teliti dan cermat, tentang suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu (Encarta, 2007; Chandler, 1962). Strategi pengembangan wilayah perbatasan ini bermaksud untuk memberikan makna dari permasalahan yang muncul dalam penelitian, sehingga diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan wilayah perbatasan ditinjau dari perspektif ekonomi yang mendukung dan melengkapi kebijakan eksisting. Strategi pengembangan ini termasuk strategi dalam ranah perencanaan dengan jangka waktu menengah dan panjang.
- *Pembangunan ekonomi*: pembangunan ekonomi dalam konteks penelitian ini mempertimbangkan tidak hanya pada aspek pertumbuhan ekonomi secara indikator

saja, namun dilihat pula dari aspek spasial dan kebijakan yang berperan dalam perekonomian (Arsyad, 2005). Aspek ini dilihat dari besarnya kontribusi ekonomi secara *intraregional* (Kabupaten Sanggau–Kecamatan Entikong), dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi, kondisi sektor basis dan kinerja perekonomian wilayah dan dengan pertimbangan terhadap aspek spasial *interregional* (Kecamatan Entikong), dan kebijakan yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

- *Aspek spasial*: merupakan tinjauan keruangan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan, aspek ini meliputi penggunaan lahan, struktur ruang, dan kependudukan.
- *Pengembangan perbatasan*: aspek ini membahas mengenai pengembangan wilayah perbatasan dilihat dari kebijakan, elemen *best practice*, tinjauan teoritis dalam pengembangan wilayah perbatasan darat dalam perspektif ekonomi.

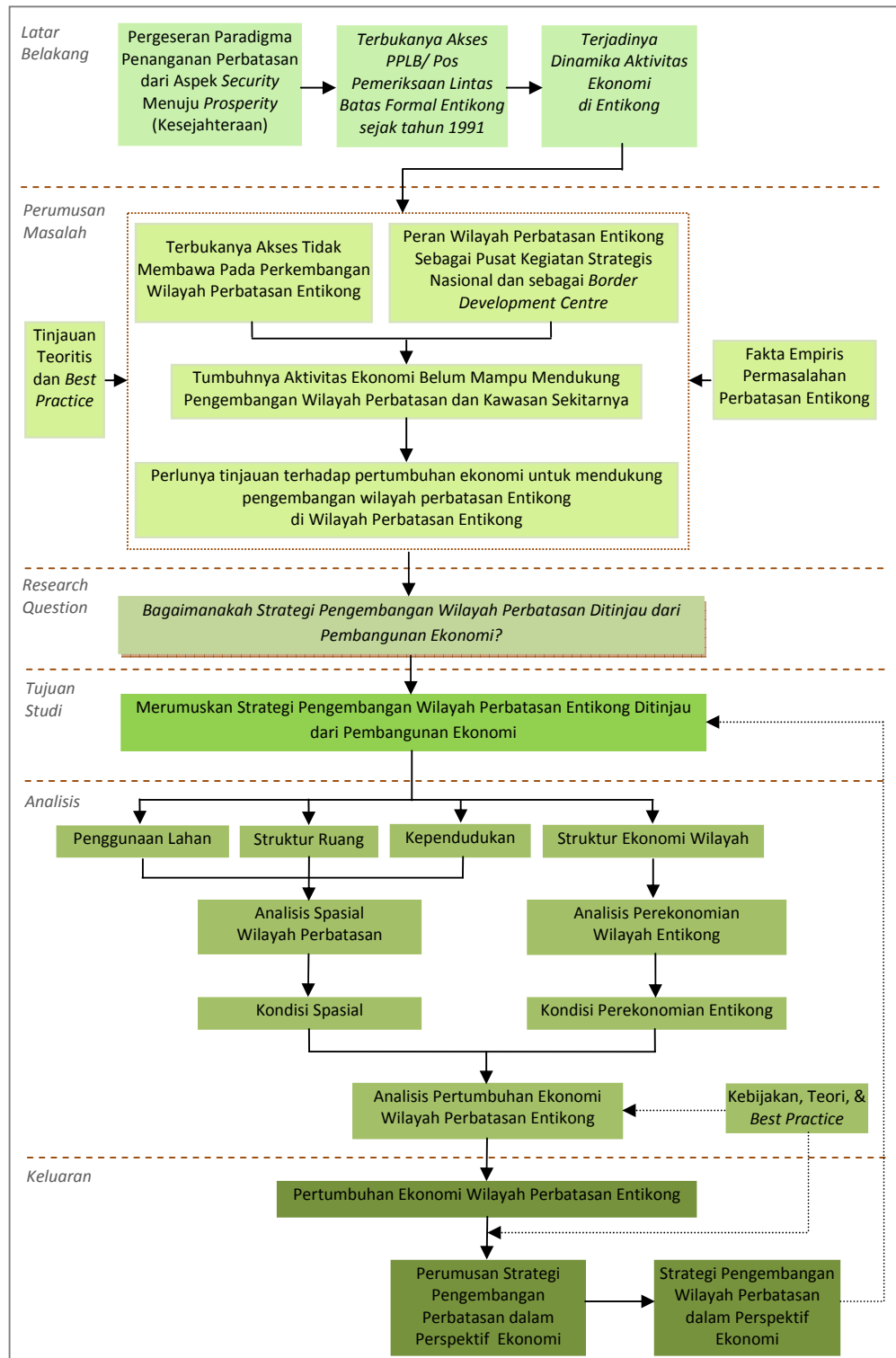
Kerangka pemikiran penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Perubahan paradigma perbatasan mengubah pendekatan yang semula sifatnya keamanan ke arah kesejahteraan. Terbukanya akses formal Entikong sejak tahun 1991 merupakan peluang dalam memanfaatkan potensi geografis dan kedekatan pasar dengan wilayah Sarawak (Malaysia), sehingga tujuan dari kesejahteraan tersebut dapat dicapai. Kondisi tersebut (terbukanya akses formal) berimbas pada dinamika aktivitas ekonomi di perbatasan Entikong.

Tinjauan secara teoritis dan *best practice* di negara mengindikasikan kedekatan secara keruangan dan pasar merupakan keuntungan dalam pertumbuhan ekonomi bagi pengembangan perbatasan. Terbukanya akses selama 18 tahun di Entikong ternyata belum menunjukkan perubahan seperti yang diharapkan, terlebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), posisi Entikong ditempatkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat sebagai *Border Development Centre* yang seharusnya mampu mengembangkan kawasan perbatasan dan mendukung kawasan sekitarnya.

Dari latar belakang diatas, maka *problem statement* yang muncul adalah perlunya tinjauan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Entikong, dengan melihat adanya kecenderungan potensi dalam pertumbuhan ekonomi di

perbatasan. Selanjutnya, pertanyaan penelitian yang muncul adalah bagaimanakah strategi pengembangan kawasan perbatasan Entikong dalam memacu pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah perbatasan. Dari pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan strategi pengembangan kawasan perbatasan Entikong dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang diharapkan, ditetapkan sasaran yang ingin dicapai melalui identifikasi dan analisis yang akan dilakukan. Hal ini meliputi analisis terhadap aspek spasial, ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan perbatasan di Entikong. Dari hasil analisis tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi perbatasan Entikong untuk menjadi masukan dalam menyusun strategi untuk pengembangan wilayah perbatasan dalam perspektif ekonomi. Selengkapnya, kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar 1.4.



Sumber: Hasil Analisis, 2009

**GAMBAR 1.4**

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Bagian ini menjelaskan tentang manfaat dan originalitas penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Originalitas penelitian berupa perbedaan sudut pandang penelitian yang dilakukan peneliti dibandingkan dengan penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya.

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Konteks kawasan perbatasan cenderung bersifat dinamis dan berubah-ubah, bergantung pada kondisi politis, ekonomi, sosial dan budaya setempat. Hal tersebut menjadikan tidak adanya suatu teori tunggal yang mampu menjelaskan sebuah perbatasan (Newman, 2006). Dalam penelitian ini, diharapkan kajian atas pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu perencanaan wilayah dan kota mengenai kawasan perbatasan dengan berbagai limitasinya sebagai wilayah yang mendesak untuk dikembangkan (Edgington dan Fernandez, 2001: 9), terkait dengan kebijakan dan serta peran kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah untuk mengetahui pengaruh terbukanya akses formal perbatasan (antarnegara) terhadap wilayah internalnya. Dengan mengetahui perspektif tentang pertumbuhan ekonomi, dapat dirumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan kawasan, sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh Entikong (regional, nasional, internasional). Selanjutnya hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk pengembangan kawasan perbatasan sejenis.

## 1.6 Keaslian Penelitian

Kumpulan studi sejenis mengenai penelitian di wilayah perbatasan ini didapatkan sejauh informasi dari perpustakaan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang. Tabel I.1 mendeskripsikan berbagai penelitian tentang wilayah perbatasan yang terkait dengan ekonomi sebagai hal yang berperan dalam pengembangan wilayah perbatasan. Keaslian dari penelitian ini adalah tinjauan terhadap indikator pertumbuhan ekonomi secara regional (dengan menggunakan analisis *intraregional dan interregional*) yang dikolaborasikan dengan aspek spasial dalam kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dilihat peran elemen penting dalam pengembangan kawasan perbatasan dan kebijakan yang ada sebagai acuan dalam merumuskan strategi pengembangannya.

**TABEL I.1**  
**KEASLIAN PENELITIAN**

NAMA/ TAHUN	JUDUL	TUJUAN	METODE	STRATA /RISET	HASIL	PERBEDAAN
Husnadi/ 2006	Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Darat Antar Negara (Studi Kasus: Kecamatan Paloh dan Sajingan, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat)	Mengetahui model teoritis pengembangan kawasan perbatasan yang sesuai dengan wilayah	Kualitatif dan kuantitatif	S2 - UNDIP	Model yang fit dengan kondisi wilayah dan diharapkan dapat direplikasi oleh wilayah perbatasan lain yang sejenis	Arahan lebih kepada model – konsepsi teoritis yang fit dengan kondisi wilayah
Irsan/ 2007	Pengaruh Jalan Lintas Batas Kalimantan Barat – Sarawak Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kerusakan Lingkungan Hutan (Kasus di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)	Mengakaji pengaruh keberadaan jalan lintas batas antar negara terhadap pertumbuhan penduduk, pertambahan prasarana fisik, dan perubahan penggunaan lahan	Kualitatif dan kuantitatif	S2 - UGM	Pengaruh jalan lintas batas antar negara berakibat pertambahan jumlah penduduk dan penongkatan prasarana fisik namun mengurangi luas hutan	Kajian lebih difokuskan pada peran jalan terhadap luas hutan , akibat perkembangan di kawasan perbatasan.
Edmond and Fujimura/ 2006	<i>Impact of Cross-Border Road Infrastructure on Trade and Investment in the Greater Mekong Subregion</i>	Menginvestigasi dampak terbukanya akses jalan terhadap perdagangan dan Foreign Direct Investment (FDI).	Kuantitatif	Riset dengan ADB Funding	Pembangunan jalan di perbatasan memiliki dampak positif pada perdagangan regional dan Investasi, meskipun perlu kebijakan lebih lanjut untuk integrasi ekonomi di wilayah tersebut.	Kajian ini berupa dampak infrastruktur terhadap <i>regional trade</i> dan pertumbuhan tingkat investasi yang dikur melalui FDI ( <i>Foreign Direct Investment</i> )

NAMA/ TAHUN	JUDUL	TUJUAN	METODE	STRATA /RISET	HASIL	PERBEDAAN
Silvers/ 2000	<i>Limited Linkage, Demand Shifts and the Transboundary Transmission of Regional Growth</i>	Evaluasi terhadap program Maquiladora (industrialisasi di perbatasan USA-Mexico) dan AFTA terhadap keterkaitan ekonomi di kedua wilayah perbatasan	Kualitatif dan kuantitatif	Riset, <i>University of Arizona, Tucson, USA</i>	Pembangunan sektor industri tersebut cenderung menguntungkan pihak Arizona/USA daripada Sonora/Mexico, karena perbedaan nilai tukar mata uang dan dampak berpindahnya tenaga kerja ke wilayah yang lebih maju (USA)	Kajian ini melihat dampak dari kebijakan terhadap perkembangan perekonomian di wilayah perbatasan dan melihat aspek perbedaan nilai tukar dalam menganalisis perkembangan masing-masing wilayah perbatasan.
lanjutan						
Uiboupin/ 2007	<i>Cross border cooperation and economic development in border regions of Western Ukraine</i>	Melihat faktor penting dalam pembangunan kawasan perbatasan di Ukraina Barat dan kemungkinannya untuk bekerja sama dengan Uni Eropa di Kawasan Perbatasan tersebut.	Kualitatif	Riset: Turku <i>School of Economics – with financial support from Academy of Finland</i>	Adanya kesamaan dalam faktor utama pembangunan dan menunjukkan pentingnya aglomerasi industri dalam pengembangan ekonomi dan kerjasama di perbatasan	Kajian ini mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam pengembangan di wilayah perbatasan

Sumber: Hasil Analisis, 2009

## 1.7 Metode Penelitian

Pada bagian ini akan menjelaskan kerangka konseptual, pendekatan penelitian, kebutuhan data, dan kerangka analisis yang akan digunakan sehingga tujuan dan sasaran dalam studi ini tercapai.

### 1.7.1 Kerangka Konseptual

Wilayah perbatasan merupakan paradigma baru dalam pengembangan wilayah. Munculnya wilayah baru tersebut sebagai hasil dari globalisasi ataupun desentralisasi dalam kebijakan (Edgington dan Fernandez, 2001). Perkembangan wilayah perbatasan seringkali ditandai dengan peran perdagangan dan investasi sebagai sebuah kemungkinan dalam pengembangan kawasan perbatasan yang menuju pada dunia tanpa batas (Ohmae, 1995).

Sebagian besar wilayah perbatasan memegang peranan penting dalam rantai global perekonomian. Peran tersebut sangat menarik terutama pada wilayah perbatasan yang terpencil dan berperan sebagai fungsi keamanan sekaligus kesempatannya sebagai motor pertumbuhan perekonomian nasional, regional, dan internasional (Wu, 2001). Peran tersebut menuju pada sebuah pendekatan yang berbeda dengan tipe pengembangan wilayah yang lain.

Pengembangan di wilayah perbatasan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dengan wilayah lainnya. Menurut Wu (2001), terdapat beberapa kriteria mendasar yang berbeda dengan literatur pengembangan wilayah konvensional yaitu: immobilitas dari faktor produksi, adanya biaya transaksi dan *delay*, sistem ekonomi yang berbeda, isu institusi, penetapan perwilayahan, dan peran sektor informal. Dimensi ekonomi sangat mewarnai sifat dari wilayah perbatasan, apakah kemungkinan tersebut menjadi sebuah keuntungan ataupun kerugian dari wilayah perbatasan sangat tergantung pada lokalitas dan peran dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan (Wu, 2001).

Pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan berimbas pada efek integrasi ekonomi yang diikuti oleh adanya perubahan guna lahan dengan syarat adanya iklim ekonomi yang sesuai (Niebuhr dan Stiller, 2001). Berkembangnya potensi pasar sekaligus keterbatasannya, serta imbas terhadap perkembangan wilayah sangat berperan dalam pengembangan wilayah perbatasan. Untuk itu perlu adanya kajian yang komprehensif terhadap aspek spasial dan perekonomian dalam memahami konteks wilayah perbatasan, khususnya bagi wilayah perbatasan antarnegara dengan ekonomi



sebagai perhatian utama (Berg dan Ehin, 2006; Niebuhr dan Stiller, 2001; Gottmann, 1980).

### 1.7.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan kajian literatur, pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan dasar ingin menjelaskan variabel penelitian yang sudah tersintesis dari kajian literatur (Cresswell, 2003) yang dilakukan pada bab sebelumnya. Variabel tersebut merupakan sintesa dari kajian mengenai pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Entikong.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi/campuran, yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (Cresswell, 2003). Metode penelitian campuran yang digunakan adalah *concurrent triangulation strategy*. Metode kuantitatif dan kualitatif dilakukan pada tinjauan secara *intra* dan *interregional*, dalam pengembangan wilayah perbatasan Entikong. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel I.2 berikut.

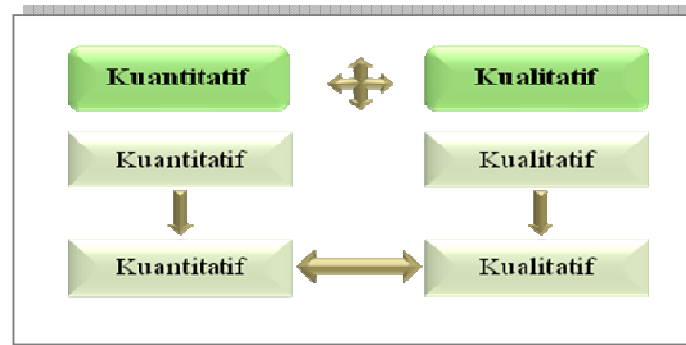
**TABEL I.2**  
**PENDEKATAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM CONCURENT TRIANGULATION STRATEGY**

	<b>KUANTITATIF</b>	<b>KUALITATIF</b>
<b>INTRA REGIONAL</b>	Komposisi ekonomi wilayah (regional economy).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi</li> <li>• Institusi</li> <li>• Elemen best practice</li> </ul>
<b>INTER REGIONAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek spasial wilayah perbatasan Entikong</li> <li>• Aspek kependudukan</li> <li>• Aspek ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi</li> <li>• Institusi</li> <li>• Elemen best practice.</li> </ul>

*Sumber: Diadopsi dari Bendavid-Val, 1991; Hasil Analisis, 2009*

Metode *concurrent triangulation* tersebut digunakan untuk saling melengkapi hasil analisis yang dilakukan. Dengan pendekatan atas aspek ekonomi dan aspek spasial (perubahan guna lahan, kependudukan) secara kuantitatif dalam mengukur indikator

pertumbuhan ekonomi, yang dilengkapi aspek kualitatif lainnya (Gambar 1.5). Pendekatan ini akan menjelaskan lebih baik tentang temuan yang akan dirumuskan dalam strategi pengembangan.



Sumber :Diadopsi dari Cresswell, 2003

**GAMBAR 1.5**  
**DIAGRAM METODE PENELITIAN**

### 1.7.3 Kebutuhan Data

Data yang diperlukan dalam studi ini adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari berbagai instansi dan sampel populasi yang representatif, masing-masing data dan sumber perolehannya dapat dilihat pada Tabel I.3.

**TABEL I.3**  
**KEBUTUHAN DATA**

NO.	SASARAN	KEBUTUHAN DATA/ VARIABEL	KEBUTUHAN DATA					SUMBER PEROLEHAN DATA
			Primer			Sekunder		
			K	O	W	I	L	
1.	Melakukan analisis spasial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jenis penggunaan lahan</li><li>• Luas lahan</li><li>• Lokasi pusat kegiatan</li><li>• Jaringan jalan</li><li>• Jumlah penduduk</li><li>• Sebaran penduduk</li></ul>		√		√		Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda BPS BPS
2.	Melakukan analisis perekonomian wilayah perbatasan Entikong	<ul style="list-style-type: none"><li>• PDRB Kabupaten Sanggau (atas dasar harga konstan)</li><li>• PDRB Kecamatan Entikong (atas dasar harga konstan)</li></ul>				√	√	BPS BPS
3.	Melakukan analisis terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan perbatasan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kondisi wilayah Tebedu (Sarawak-Malaysia) (yang mencerminkan aktivitas ekonomi)</li><li>• Elemen <i>best practice</i></li></ul>		√	√			BP2KKP, SOSEK MALINDO

	pengembangan perbatasan dari sisi ekonomi				
	• Regulasi		√	√	Bappeda, BP2KKP, Dinas PU
4.	Merumuskan strategi pengembangan kawasan perbatasan berbasis pada ekonomi	• Regulasi	√	√	Bappeda, BP2KKP, SOSEK, MALINDO,

Sumber: Hasil Analisis, 2009

**Keterangan:**

*K* : Kuesioner (Primer)

*O* : Observasi (Primer)

*W* : Wawancara (Primer)

*I* : Instansi (Sekunder)

*L* : Lainnya (teori, literature, dan sebagainya)

### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan survai primer dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dari objek/lokasi penelitian. Kegiatan survai primer meliputi kegiatan-kegiatan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan/di lokasi penelitian, dan teknik wawancara/*interview*. Sedangkan kegiatan survai sekunder dilakukan untuk mengumpulkan data-data tertentu dari instansi-instansi terkait serta pengkajian terhadap hasil penelitian dari peneliti lain yang temanya *relevan* dengan penelitian yang diangkat.

Teknik pengumpulan data secara detail adalah sebagai berikut:

▪ Telaah Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam studi ini berupa dokumen resmi (perencanaan dan penelitian) yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain yaitu:

- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Entikong. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, 2003.
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Niaga Terpadu dan Industri Pengolahan Entikong. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, 2005.
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Entikong dan Sekayam. Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau, 2003.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Kecamatan Entikong. Badan Perencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau, 2006.

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau 2004-2014. Badan Perencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau, 2004.
- Revisi Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pelayanan Terpadu Entikong. Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Lemlit Trisakti, 2003.

Dokumen tersebut kemudian ditelaah untuk dijadikan penunjang dalam kegiatan observasi lapangan dan wawancara.

#### ▪ Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan observasi yang dilakukan dalam studi ini adalah untuk mengetahui kondisi wilayah perbatasan Entikong dan komparasinya terhadap wilayah Sarawak-Malaysia.

#### ▪ Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan informasi secara langsung. Kegiatan wawancara ini akan dilakukan pada saat observasi atau pada saat mencari data di instansi-instansi terkait sehingga dapat memberikan tambahan informasi dengan format wawancara yang terstruktur (wawancara disusun dalam daftar pertanyaan). Kegiatan wawancara dilakukan pada responden pemerintah dengan alasan perspektif kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis nasional dengan dimensi yang kompleks menunjukkan peran pemerintah yang masih mendominasi perkembangan wilayah perbatasan Entikong.

Responden pemerintah tersebut adalah :

1. Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Provinsi Kalimantan Barat. Badan ini merupakan badan yang dibentuk dalam penanganan wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Provinsi Kalimantan Barat. UPT ini terletak di Pos Lintas Batas, UPT ini merupakan bagian dari BP2KKP yang berada di Kecamatan Entikong.
3. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Khusus pada bidang pengembangan kawasan perbatasan yang diwakili oleh Satuan Kerja Non

Vertikal Tertentu (SNVT) Pengembangan Kawasan Perbatasan bidang Cipta Karya.

4. Dinas Perhubungan.
5. Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia), merupakan forum bilateral antara pemerintah daerah (Provinsi Kalbar) dengan Sarawak, dalam merumuskan kebijakan di wilayah perbatasan
6. Kantor Bea Cukai.

### 1.7.5 Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini terkait dengan pengukuran atas indikator ekonomi wilayah. Penggunaan teknik analisis ini terkait dengan konteks wilayah yang dilihat secara *intra* (antarwilayah), maupun *inter* (dalam wilayah) perbatasan Entikong. Beberapa teknik tersebut antara lain adalah laju pertumbuhan ekonomi, sektor basis ekonomi, kinerja sektor ekonomi, dan identifikasi sektor prioritas/unggulan.

#### A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi wilayah (kecamatan/kota/kabupaten) dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya selama pelita atau periode tertentu, tetapi dapat pula secara tahunan.

Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui indikator PDRB dari tahun ke tahun. Cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan cara yaitu:

$$\text{Laju Pertumbuhan}_x = \frac{\text{PDRB}_x - \text{PDRB}_{x-1}}{\text{PDRB}_{x-1}} * 100\%$$

#### Keterangan :

$\text{PDRB}_x$  = Pendapatan Domestik Regional Bruto Tahun Tertentu

$PDRB_{x-1}$  = Pendapatan Domestik Regional Bruto 1 Tahun Sebelumnya

## B. Analisis Sektor Ekonomi Basis

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor basis dan non basis. Konsep dasarnya adalah mengklarifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis dan membandingkan sektor/subsektor suatu daerah/kota/kabupaten dengan sektor/sub sektor pada lingkup wilayah yang lebih luas.

Tujuan dari analisis ini antara lain sebagai berikut:

- Mengetahui sektor basis dan non basis perekonomian di Kawasan Perbatasan Entikong (unit kecamatan) dibandingkan dengan unit yang lebih luas secara agregat (Kabupaten Sanggau):
  - Kegiatan Basis: merupakan kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya berupa barang maupun jasa ditujukan untuk ekspor ke luar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional, dan internasional.
  - Kegiatan Non Basis: merupakan kegiatan masyarakat yang hasilnya baik berupa barang atau jasa diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut.
- Mengetahui perbandingan derajat spesialisasi kegiatan perekonomian kota/kabupaten.

Analisis sektor basis digunakan untuk menentukan subsektor unggulan/ basis dalam perekonomian daerah, yang mengacu pada formulasi:

$$LQ = \frac{p_i / p_{total}}{P_i / P_{total}}$$

### Keterangan:

$LQ$  : Nilai LQ pada tahun tertentu  
 $p_i$  : Besarnya PDRB sektor (pendapatan) daerah analisis  
 $p_{total}$  : Jumlah PDRB total di daerah analisis pada tahun tertentu  
 $P_i$  : Besarnya PDRB sektor i (pendapatan) di skala regional  
 $P_{total}$  : Jumlah PDRB total di skala regional

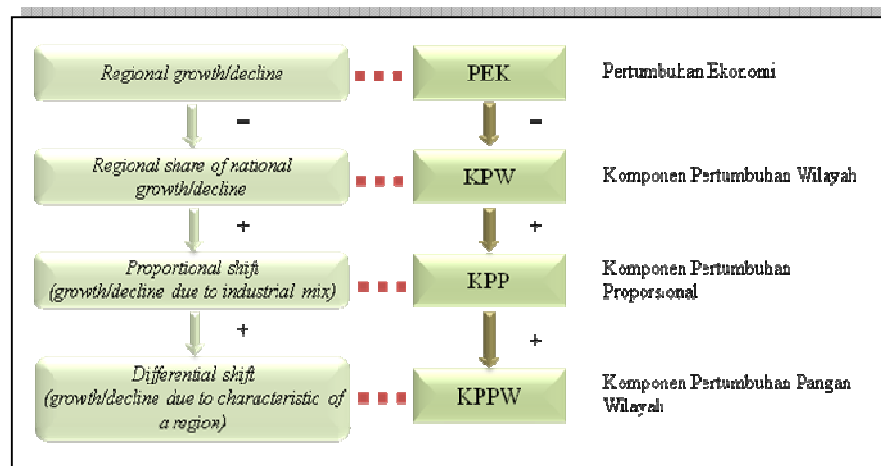
Kriteria Pengukuran [Bendavid – Val, (1991:74)]:

- LQ>1 : Tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama di tingkat provinsi/nasional. *Berarti sektor tersebut merupakan sektor unggulan di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.*
- LQ<1 : Tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama di tingkat provinsi/nasional. *Sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.*
- LQ=1 : Berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi/nasional.

### C. Analisis Kinerja Sektor Ekonomi

Analisis ini digunakan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja sektor-sektor ekonomi. Analisis ini memberikan penjelasan tentang kinerja perekonomian dalam 3 (tiga) bidang yang berhubungan satu dengan yang lain yaitu pertumbuhan ekonomi, pergeseran proporsional (*proporsional shift*) dan pergeseran diferensial (*differensial shift*). Hasil analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu daerah dibandingkan secara relatif dengan sektor lainnya, apakah tumbuh cepat atau lambat, dan keunggulan komparatif wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lain.

Komponen dalam analisis *shift share* dapat digambarkan pada Gambar 1.6 di bawah ini.



Sumber: Diolah dari Bendavid- Val, 1991

**GAMBAR 1.6**

## KOMPONEN DALAM ANALISIS *SHIFT SHARE*

- KPW (Komponen Pertumbuhan Wilayah) merupakan komponen *share* dan sering disebut sebagai *national share*. Komponen ini adalah perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi atau kesempatan kerja secara umum, kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan lain yang mampu mempengaruhi sektor perekonomian dalam suatu wilayah.
- KPP (Komponen Pertumbuhan Proporsional) merupakan komponen pergeseran proporsional (*proportional shift*), yaitu penyimpangan (*deviation*) dari *national share* dalam pertumbuhan wilayah. KPP adalah perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu wilayah yg disebabkan oleh komposisi sektor–sektor industri di wilayah tersebut, perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar.
  - KPP bernilai positif ( $KPP > 0$ ) pada wilayah/daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh cepat.
  - KPP bernilai negatif ( $KPP < 0$ ) pada wilayah/daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat.
- KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah) merupakan komponen *differential shift*, sering disebut komponen lokasional atau regional atau sisa lebihan. KPPW adalah perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif wilayah tersebut, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan lokal di wilayah tersebut.
  - KPPW bernilai positif ( $KPPW > 0$ ) pada sektor yang mempunyai keunggulan komparatif/dapat bersaing, di wilayah/daerah tersebut (disebut juga sebagai keuntungan lokasional).
  - KPPW bernilai negatif ( $KPPW < 0$ ) pada sektor yang tidak mempunyai keunggulan komparatif/tidak dapat bersaing.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\begin{aligned} PE &= KPN + KPP + KPPW \\ &= (Y_t/Y_o - 1) + (Y_{it}/Y_{io} - Y_t/Y_o) + (y_{it}/y_{io} - Y_{it}/Y_{io}) \\ &= [R_a - 1] + [R_i - R_a] + [r_i - R_i] \end{aligned}$$



**Keterangan :**

- PE = pertumbuhan ekonomi wilayah lokal
- Yt = indikator ekonomi wil. Nasional, akhir tahun analisis.
- Yo = indikator ekonomi wil. Nasional, awal tahun analisis.
- Yit = indikator ekonomi wil. Nasional sektor i, akhir tahun analisis.
- Yio = indikator ekonomi wil. Nasional sektor i, awal tahun analisis.
- yit = indikator ekonomi wil. Lokal sektor i, akhir tahun analisis.
- yio = indikator ekonomi wil. Lokal sektor i, awal tahun analisis.

#### **D. Identifikasi Sektor Unggulan**

Bagian ini merupakan gabungan dari analisis *Location Quotient* dan analisis *Shift-Share*, dari analisis ini dapat diketahui sektor unggulan yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Penggunaan indikator LQ dan *Shift-Share* tersebut dilakukan dengan prinsip sektor prioritas adalah sektor yang paling maju/progresif dan memiliki nilai LQ tertinggi. Identifikasi prioritas sektor unggulan ini dapat dilihat pada Gambar 1.7 berikut.



Sumber: Diolah dari Bendavid- Val, 1991

**GAMBAR 1.7**  
**IDENTIFIKASI PRIORITAS SEKTOR UNGGULAN**

**Keterangan:**

- PB : Pergeseran Bersih (penjumlahan komponen KPP dan KPW dalam analisis *shift share*), PB> 0 berarti sektor tersebut maju/progresif; PB<0 sektor tersebut mundur.
- LQ : indikator sektor basis dan non basis (LQ>1 sektor basis, LQ<1 non basis)

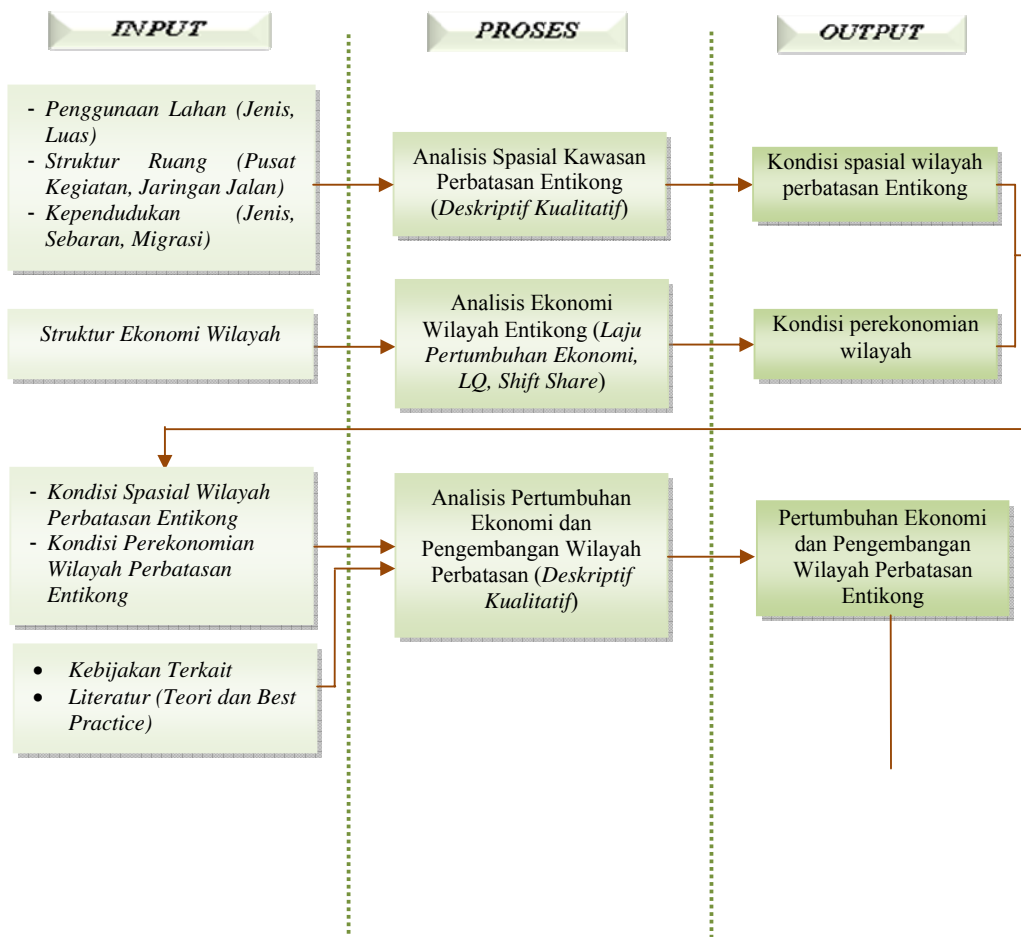
### 1.7.6 Kerangka Analisis

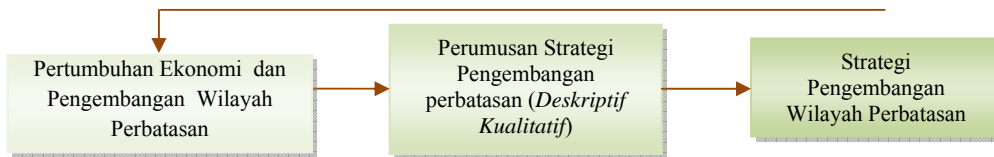
Sesuai dengan tujuan studi yang dicapai dengan melalui sasaran yang telah ditetapkan. Analisis yang akan dilakukan dalam studi ini adalah analisis spasial, ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan kawasan perbatasan dan perumusan strategi pengembangan. Selengkapnya kerangka analisis yang dilakukan dilihat dari tahap input, proses dan output dapat dilihat di Gambar 1.8. Tahapan dari analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- ***Analisis spasial kawasan perbatasan Entikong.*** Analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi spasial kawasan yang dilihat dari penggunaan lahan, struktur ruang, dan kependudukan. Analisis ini terkait dengan pertumbuhan aktivitas dan ekonomi kawasan dilihat dari sisi keruangan, serta memberikan gambaran bagi kondisi perubahannya (Branch, 1995). Input dari penggunaan lahan terlihat dari perubahan guna lahan antara tahun 2003 dan 2007 (penggunaan citra *landsat* ETM-7), selanjutnya diidentifikasi struktur ruang kawasan dengan melihat perubahan guna lahan, jaringan jalan, pusat-pusat kegiatan, dan perkembangan jumlah penduduk. Output dari analisis ini adalah kondisi spasial kawasan perbatasan terkait dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan, yang akan dijadikan input bagi analisis yang lebih komprehensif yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah perbatasan.
- ***Analisis perekonomian wilayah.*** Analisis ini dilakukan untuk mengetahui indikasi pertumbuhan ekonomi wilayah baik secara inter maupun intrawilayah. Input *Produk Domestik Regional Brutto* (PDRB) yang dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2000 (semua angka pendapatan regional/nasional dihitung/dinilai atas dasar harga tahun dasar, karena dihitung berdasarkan harga tahun dasar yang bersifat tetap, maka perkembangan yang terjadi mencerminkan perkembangan riil dan bukan karena pengaruh kenaikan harga atau inflasi). Input dari 9 sektor dalam PDRB tersebut selanjutnya akan digunakan dalam analisis laju pertumbuhan ekonomi, sektor basis, kinerja ekonomi sektor, dan penentuan sektor prioritas. Output dari analisis ini adalah kondisi perekonomian wilayah Entikong, yang selanjutnya akan

dijadikan input bagi analisis yang lebih komprehensif yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah perbatasan.

- **Analisis pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah perbatasan.** Analisis ini dilakukan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Input analisis ini adalah kondisi spasial dan kondisi ekonomi wilayah yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Selain dari kedua aspek tersebut, analisis dilakukan dengan input kebijakan (hasil wawancara), observasi lapangan, dan tinjauan secara teoritis maupun *best practice* pengembangan wilayah perbatasan yang relevan. Output dari analisis ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah perbatasan Entikong, yang selanjutnya akan digunakan sebagai input bagi perumusan strategi pengembangan.
- **Perumusan strategi pengembangan,** input dari perumusan ini adalah permasalahan yang muncul dari pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah perbatasan. Perumusan strategi ini menghasilkan output strategi pengembangan kawasan perbatasan dalam perspektif ekonomi, yang mencerminkan arahan bagi pengembangan kawasan dalam konteks ekonomi.





Sumber: Hasil Analisis, 2009

**GAMBAR 1.8**  
**KERANGKA ANALISIS**

## 1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

- Bab I ***Pendahuluan***. Bagian ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup penelitian yang mencakup ruang lingkup wilayah, ruang lingkup materi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II ***Perspektif Pengembangan Wilayah Perbatasan***. Bagian ini membahas mengenai teori dan literatur yang mendukung pelaksanaan penelitian. Fokus perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi dan kaitannya terhadap pengembangan wilayah perbatasan, membahas tentang pengertian, fungsi dan tipologi wilayah perbatasan, hubungan yang terjadi, konsep pertumbuhan ekonomi dan konsep kebijakan serta elemen-elemen dalam *best practice*.
- Bab III ***Tinjauan Kawasan Perbatasan Entikong***. Bagian ini membahas tentang konteks wilayah penelitian dan kondisi yang berperan dalam analisis pertumbuhan ekonomi. Tinjauan terhadap wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Entikong, dan Sarawak, aspek perekonomian, penggunaan lahan, struktur ruang, kependudukan, dan kebijakan, dilakukan untuk memberikan gambaran dan pemahaman bagi analisis yang akan dilakukan.
- Bab IV ***Analisis Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Perbatasan Entikong***. Bagian ini membahas tentang analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi analisis spasial (perkembangan guna lahan, struktur ruang, kependudukan), analisis ekonomi wilayah (laju pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi basis dan kinerja perekonomian wilayah), yang dilanjutkan dengan analisis pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan perbatasan yang

dilihat dari kedua analisis tersebut dan input kebijakan serta tinjauan literatur. Selanjutnya adalah perumusan strategi dengan input temuan studi pada bagian analisis sebelumnya, yang berfokus pada pengembangan kawasan perbatasan dalam perspektif ekonomi.

Bab V ***Kesimpulan dan Rekomendasi***. Bagian akhir dari laporan ini berupa kesimpulan dan rekomendasi (bagi pihak terkait maupun studi lanjut) mengenai usulan langkah kegiatan pengembangan kawasan perbatasan Entikong dalam perspektif pertumbuhan ekonomi.

## **BAB II**

### **PERSPEKTIF PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN**

Kajian mengenai perspektif pengembangan wilayah perbatasan ini didasarkan pada *review* literatur tentang perbatasan dan beberapa fakta yang terjadi di beberapa negara yang memiliki kawasan perbatasan darat. Konsep pertumbuhan ekonomi dan strategi pengembangan melengkapi kajian wilayah perbatasan sehingga akan menjelaskan konteks pengembangan wilayah perbatasan Entikong dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Bab ini secara umum terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu konsep pengembangan wilayah perbatasan, konsep pertumbuhan ekonomi, dan strategi pengembangan.

#### **2.1 Karakteristik Wilayah Perbatasan**

Beberapa hal penting yang menjadi fokus perhatian dalam wilayah perbatasan adalah meningkatnya perhatian terhadap jaringan, mobilitas, arus globalisasi, dan kosmopolitanisasi yang berperan dalam mewarnai sifat sebuah kawasan perbatasan. Dalam teori sosial, secara umum digunakan sebuah pendekatan perbatasan dengan konteks ide jaringan yang terdiri atas beberapa komponen penting, yaitu: mobilitas, pergerakan, kondisi yang berubah-ubah, dan karakter fisiknya. Beberapa komponen tersebut merupakan kunci penting dalam memahami konteks wilayah perbatasan (Rumford, 2006:3).

Kunci pergeseran paradigma mengenai kawasan perbatasan ini berawal dari adanya kesadaran akan peran kawasan perbatasan. Kondisi yang semula hanya berupa garis dalam sebuah peta, atau tanda batas politik (*security check points, passport control, transit points*) mengalami perkembangan ke arah dimensi yang lebih luas, sehingga nuansa *borderless* semakin terlihat (seperti Uni Eropa). Perkembangan paradigma tersebut mendorong pada berkembangnya aspek *prosperity*/kesejahteraan, sehingga fungsi wilayah perbatasan menjadi penting sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi (kawasan strategis) meskipun seringkali terletak di wilayah pinggiran/*periphery*.

Fenomena *borderless* (Allen and Hamnett, 1995; Ohmae, 1995), maupun *reborder* (melihat kembali fungsi perbatasan dari pertimbangan kontrol) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi, berkembangnya *borderless* diakibatkan adanya efek globalisasi yang menghapuskan batas antar wilayah dalam rangka mengantisipasi gerakan ekonomi yang lebih besar, sedangkan di sisi lain, adanya konsep *rebordering* dalam rangka pertimbangan keamanan dan kekhawatiran akan perbatasan yang terbuka. Konsepsi tersebut berujung pada kontrol yang lebih baik terhadap pergerakan pekerja, pengungsi, dan teroris (Andreas dan Snyder, 2000).

Dalam konteks aselerasi pertumbuhan pasar global yang mengindikasikan adanya prinsip keterbukaan. Pengembangan perbatasan dipandang sebagai suatu hal yang mendesak, hal ini terlihat dari besarnya kesenjangan antara negara kaya dan miskin yang mengarah pada kondisi stabilitas dan keamanan (Giroux, 2005). Perubahan paradigma perbatasan kontemporer dapat dilihat dari pentingnya pendekatan keamanan dalam rangka ancaman global. Upaya ini dapat dipahami sebagai peningkatan kerjasama yang menguntungkan dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan dalam mengantisipasi dampak kerugian yang muncul akibat prinsip keterbukaan di kawasan perbatasan.

Wilayah perbatasan memiliki dimensi manusia dan pengalaman di dalamnya, hal tersebut menandakan dimensi penting tentang identitas komunitas yang berujung pada manajemen dan regulasi khusus masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh negara seharusnya lebih intensif pada kawasan perbatasan, meskipun mungkin secara geografis berada pada wilayah yang terpencil (*remote area*) dan berada di tapal batas kewenangan teritorial. Secara tradisional, perbatasan memiliki aspek dinamis dari sebuah negara, termasuk manusia dan pengalamannya, serta sebagai indikator dalam mengukur kekuatan sebuah negara (Giddens, 1985:49).

Kajian mengenai diskursus tentang perbatasan dalam konteks keamanan ataupun perbatasan dalam konteks jaringan, pendekatan keduanya dapat saja dipergunakan, namun hal yang perlu diperhatikan adalah sifat dari wilayah perbatasan itu bergerak dan menyebar. Kondisi demikian berakibat adanya kecenderungan untuk saling melintasi, beberapa hal penting yang terkait dengan cara pandang kita mengenai wilayah perbatasan bergantung pada beberapa hal, yaitu: 1) apa yang terdapat di

wilayah perbatasan; 2) kondisi politik apa yang ada; 3) bagaimanakah hubungan antarnegara dan komunitas sosial di dalamnya (Rumford, 2006).

### **2.1.1 Pengertian Wilayah Perbatasan**

Konsep yuridis Romawi mengenai wilayah perbatasan, sesuai dengan isu yang berkembang pada saat itu sudah mencirikan adanya penetapan wilayah dan konsep kerjasama sesuai dengan peraturan dan pemerintahan yang berkuasa. Konsep kerjasama dan penetapan batas ditentukan oleh kedua pihak yang bertetangga seperti yang dikatakan oleh Aelenei (2001), bahwa definisi dari perbatasan adalah sebagai berikut:

*“a definition of the border; a method of setting, delimiting and marking it; the papers drawn up by the neighbouring states stipulating the border line; the manner the state referred to regards the issue of bilateral border regime; the internal legislation regarding the border juridical regime” (Aelenei, 2001: 112).*

Dalam perkembangannya, perbatasan tersebut dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang meliputi:

1. mengelola dan mengawasi territorial *status quo*;
2. mengawasi territorial kekuasaan dengan peraturan yang dipengaruhi wilayah lainnya.

Pengertian *border* seringkali diartikan sebagai batas dari teritorial politik dan ruang tempat tinggal. Pada beberapa kasus, *border* memiliki arti yang lebih luas bagi kondisi politik dan ekonomi geografis dengan kasus tertentu untuk membagi kekuasaan atas wilayah yang berbatasan (Guo, 2005: 5). *Border area* atau dengan sinonim yang sama yaitu *cross-border area* secara luas berkaitan dengan heterogenitas spasial dalam istilah struktur ekonomi dan politik dengan terdiri atas dua atau lebih kekuasaan.

Berkaitan dengan perwujudan fisik batas wilayah perbatasan, menurut Guo (2005), batas wilayah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan:

1. *Natural Border*, yaitu wilayah dibatasi oleh batas alam seperti gunung, sungai, danau, laut, pantai, atau selat. Karena urgensinya terhadap kepentingan pertahanan batas tersebut seringkali dianggap sebagai batas politik.



2. *Artificial Border*, yaitu batas wilayah yang dapat terdiri dari batas buatan (batu, dinding), batas geometris (menggunakan batas koordinat bumi), dan batas *cultural*/budaya (perbedaan budaya, etnis, ideologi).

Secara spesifik wilayah perbatasan itu menjadi eksis apabila unit politik (pemerintahan antar kedua wilayah) terbentuk, batas tersebut membagi dua sistem otoritas politik. Dimana fungsi perbatasan tersebut dapat dilihat di Tabel II.1.

**TABEL II.1**  
**FUNGSI KAWASAN PERBATASAN**

Guo (2005)	Van Well (2006)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai fungsi <i>legal</i>, dimana garis perbatasan membagi wilayah secara formal dalam kewenangan negara;</li> <li>2. Sebagai fungsi <i>kontrol</i> dimana tercatatnya setiap kegiatan di perbatasan sebagai kontrol pemerintah;</li> <li>3. Sebagai fungsi <i>fiscal</i>, berkaitan dengan fungsi keuangan pada sebuah negara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai <i>barrier</i>/pembatas, yaitu membagi secara jelas mengenai aspek ekonomi, administrasi, hukum, kebudayaan dan psikologi;</li> <li>2. Sebagai <i>jembatan</i>, fungsinya adalah menjembatani sebuah program/jaringan strategis, peningkatan kapasitas;</li> <li>3. Batas sumber daya (<i>resources</i>), yaitu adanya kesempatan ekonomi dan politis dalam pemanfaatan sumber daya di kedua wilayah;</li> <li>4. Sebagai simbol <i>identitas</i>, lambang identitas suatu wilayah/bangsa/negara.</li> </ol>

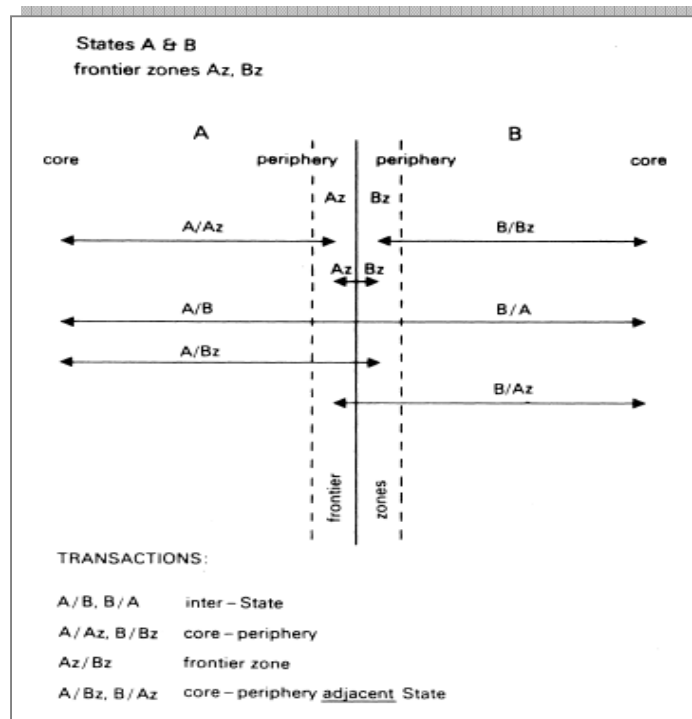
*Sumber: Guo (2005); Van Well (2006)*

### 2.1.2 Hubungan di Kawasan Perbatasan

Menurut Gottmann (1980), pada banyak negara termasuk negara-negara dalam bentuk regionalisasi, terdapat hal yang saling mempengaruhi kegiatan perekonomian di area perbatasan, antara “*center*” dan “*periphery*” (pusat dan pinggiran). Hubungan yang terjadi di wilayah perbatasan dalam kaitannya dengan pusat-pinggiran dan transaksi yang dilakukan dapat digambarkan dalam Gambar 2.1.

Pola transaksi yang terbentuk baik secara internal maupun eksternal (*crossing borders*) bervariasi, pola hubungan yang terjadi dapat berupa pusat-pinggiran dalam wilayah internal maupun eksternal, pinggiran-pinggiran secara eksternal, dan antarpusat secara eksternal. Gambar 2.1 yang berupa diagram *house's of transactions* tersebut pada

intinya mendefinisikan pada kawasan pinggiran (*frontiers area*) sebagai wilayah perbatasan, merupakan wilayah pinggiran sebuah negara (*Nation's Periphery*).



Sumber: House, 1980

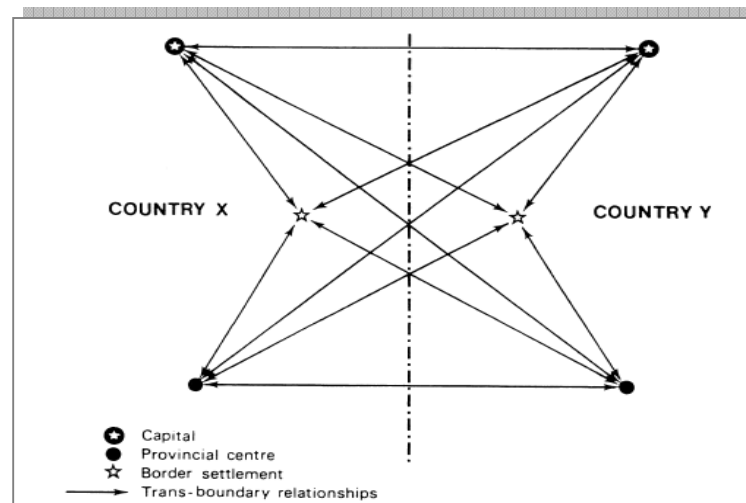
**GAMBAR 2.1**  
**MODEL TRANSAKSI DI WILAYAH PERBATASAN**

Wilayah perbatasan seringkali didefinisikan sebagai *periphery* dari sebuah negara. Model yang dimodifikasi oleh Prescott (1987) menunjukkan perbedaan yang jelas antara pusat negara dengan pusat provinsi dimana keduanya berperan dan terkait dengan wilayah perbatasan. Khususnya wilayah perbatasan, dapat berperan penting dalam kebijakan lebih luas, seperti terlihat di Gambar 2.2.

Meningkatnya pergerakan manusia di kawasan perbatasan menyebabkan implikasi di berbagai bidang, antara lain: 1) mengubah sifat/*nature* dari hubungan internasional yang terbentuk (terjadinya pergerakan manusia di kawasan perbatasan dapat mendorong pembangunan regional diantara negara yang relatif lebih maju dan membentuk kesempatan kerjasama), 2) adanya kecenderungan pemerintah lokal tidak mampu membentuk kerjasama internasional dalam menangani permasalahannya,

sehingga potensi konflik cenderung terjadi akibat perbedaan perspektif dan interest (Akaha dan Vassilieva, 2005:3). Kedua kemungkinan tersebut dapat terjadi seiring dengan kebijakan yang melandasi hubungan kedua wilayah yang berbatasan.

Perubahan kondisi hubungan di perbatasan menyebabkan terjadinya pergerakan arus manusia antarnegara. Hal ini menjadi perhatian penting dalam hubungan internasional, karena terjadinya migrasi di wilayah perbatasan disebabkan oleh motif peningkatan kesempatan ekonomi antara perusahaan dan individual. Kondisi tersebut berdampak pada perluasan jaringan sosial antara negara yang berbeda, sehingga membentuk komunitas transnasional dengan ciri etnis dan warisan budaya yang sama, namun hidup dalam negara yang berbeda (Akaha dan Vassilieva, 2005: 1).



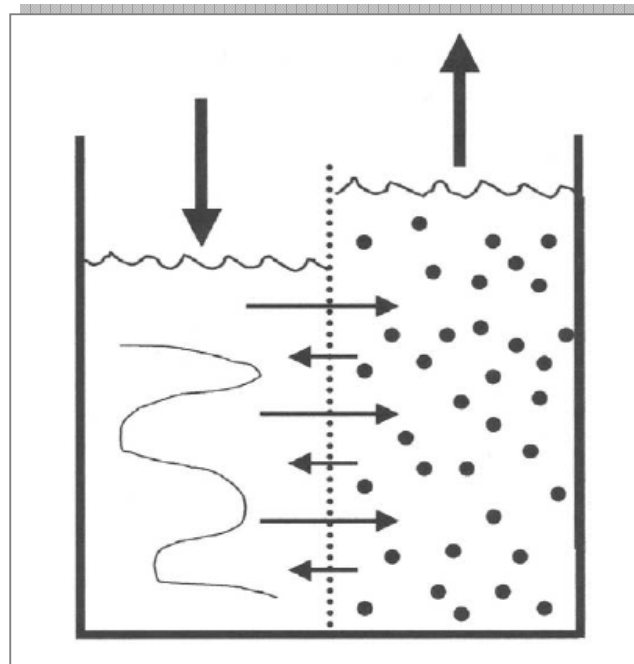
Sumber: Prescott, 1987

## GAMBAR 2.2

### HUBUNGAN DI WILAYAH PERBATASAN

Hubungan yang terjadi di wilayah perbatasan terkait dengan nilai ekonomi secara umum (*general economic value*) yang dapat dianalogikan dengan dunia fisika. Analogi tersebut dapat dijabarkan sebagai larutan yang dipisahkan oleh *semi-permeable membrane*, membran merepresentasikan sebuah garis perbatasan dan larutan merepresentasikan nilai ekonomi yang bergerak dipengaruhi oleh migrasi (pergerakan penduduk) dari wilayah yang bernilai ekonomi rendah ke tinggi. Kondisi tersebut berakibat pada banyaknya *undocumented workers* pada daerah lebih maju yang sangat produktif di wilayah itu, namun secara remunerasi memiliki nilai yang lebih rendah jika

dibandingkan dengan warga negara resmi. Selengkapnya teori osmosis yang dijelaskan oleh Kearney (2004) dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut.



*Sumber: Kearney, 2004:142*

**GAMBAR 2.3**  
**KONSEP OSMOSIS DALAM SEMI-PERMEABLE MEMBRAN**  
**(PERBATASAN)**

Kondisi tersebut terjadi di perbatasan Amerika Serikat-Mexico, kondisi Amerika Serikat yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi (cenderung semakin maju karena kondisi tersebut) menyebabkan imigran Mexico bergerak melintasi perbatasan untuk mendapatkan kesempatan ekonomi lebih tinggi, meskipun dengan upah gaji lebih rendah dalam standar Amerika Serikat.

### **2.1.3 Tipologi Pengembangan Wilayah Perbatasan**

Tipologi kawasan perbatasan ini secara esensial menjelaskan kunci karakteristik dari pengembangan kawasan perbatasan, sehingga setiap tahapan dapat diidentifikasi. Tipologi ini berfokus pada faktor penting yang berkontribusi ataupun

yang menghalangi dalam pengembangan wilayah perbatasan (Wu, 2001). Perkembangan sebuah kawasan perbatasan dapat dilihat dengan mengetahui berbagai faktor terkait dengan elemen penting dalam sebuah kawasan perbatasan.

Fokus dalam membuat tipologi ini menyoroti sisi hubungan ekonomi dan institusi, jaringan infrastruktur, biaya tenaga kerja, dan migrasi, seperti terlihat di Tabel II.2. Tipologi tersebut menggambarkan satu kesatuan dengan menggunakan terminologi Ratti (1993), yang bergerak dari *frontier* (wilayah terdepan) menjadi *barrier* (pembatas), kemudian menuju *border* (perbatasan) sebagai filter kemudian menjadi *border region* (wilayah perbatasan) sebagai zona kontak dimana kerjasama pembangunan lebih terlihat.

Kawasan perbatasan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan wilayah lainnya, berbagai tinjauan di atas menunjukkan bahwa kawasan perbatasan terkait dengan kondisi fisik wilayah, pergerakan barang dan manusia, kebijakan dan infrastruktur pendukung yang dapat menentukan tipologi sebuah kawasan perbatasan. Penentuan tipologi kawasan dengan berawal dari tinjauan secara karakteristik sangat penting bagi sebuah kawasan perbatasan. Hal ini terkait dengan konsep penanganan yang berbeda dan pendekatan yang berbeda pula dalam penanganannya.

**TABEL II.2**  
**TIPOLOGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN**

TYPE KAWASAN PERBATASAN	HUBUNGAN EKONOMI	KERANGKA KERJA INSTITUSI	TIPE PERUSAHAAN	JARINGAN INFRASTRUKTUR	MIGRASI	PERBEDAAN BIAYA TENAGA KERJA	CONTOH KASUS
<i><b>Border Regions</b></i>	Sedikit terjadi dan dikontrol dengan ketat	Sedikit	Individu atau UKM	<i>Bottlenecks</i> karena control perbatasan yang tidak praktis	Kontrol ketat	Sangat tinggi	Russia-China-Korea Utara (Tumen)
		Mendesak namun hanya pada satu sisi	Pembangunan secara spontan	Idem	Idem	Tinggi	Thailand-China-Burma-Laos
<i><b>Cross Borders Region</b></i>	Saling tergantung	Mekanisme konsultatif	Perusahaan besar dan UKM bergerak di bidangnya, adanya <i>joint venture</i>	<i>Consultative planning</i> , kontrol perbatasan masih penting	Kontrol migrasi (terhadap turis dan pelajar)	Tinggi  Semakin berkurang	Polandia – Jerman  Hongkong-Shenzen
<i><b>Trans Borders Region</b></i>	Saling menguntungkan	Kelembagaan yang kooperatif	Perusahaan jaringan (adanya transfer dan sharring terhadap teknologi)	Perencanaan infrastruktur yang terpadu	Prosedur yang mudah dan pergerakan yang bebas	Sedikit bahkan tidak ada	Uni Eropa

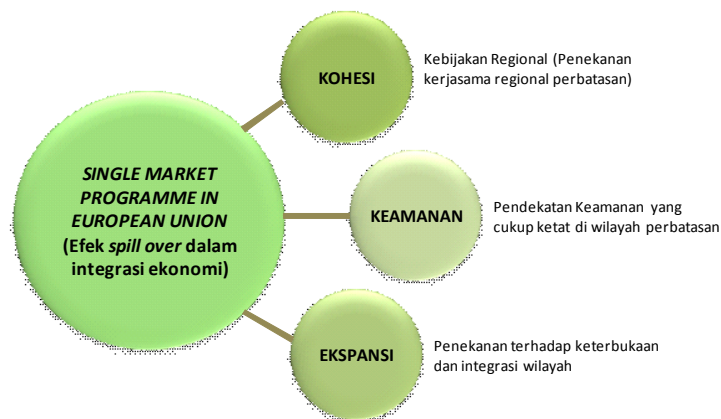
*Sumber: Wu, 2001:23*

## 2.2 Kebijakan di Wilayah Perbatasan

Konsep kebijakan di wilayah perbatasan pada saat ini merepresentasikan program dan komitmen yang mengarah pada demokrasi global. Komitmen terhadap demokrasi global tersebut pada realitanya menghadapi kondisi yang kompleks, karena unsur ideologi dan kultural yang spesifik di wilayah perbatasan (Couldry, 2004). Berkaitan dengan kebijakan di perbatasan, pada dasarnya hubungan yang terbentuk sangat menentukan kebijakan antara kedua wilayah, baik dalam konteks regional maupun internasional. Tanpa hubungan yang dapat diterima, kebijakan yang memuaskan, dan hubungan diplomatik, tidak mungkin hubungan tersebut berjalan dengan baik (Henrikson, 2000).

### 2.2.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Menurut Berg dan Ehin (2006), ide dan gagasan “*composite policy*” yang tepat dalam strategi pengembangan wilayah perbatasan Uni Eropa, terdiri dari tiga paradigma yang berbeda, yaitu: pendekatan penanganan dengan basis pada security, pendekatan pada sisi kohesi, dan pendekatan dari sisi ekspansi/ perluasan. Paradigma kebijakan tersebut dapat menjadi *spill-over effect* integrasi ekonomi bagi pengembangan Uni Eropa, secara jelas ketiga paradigma tersebut dapat dilihat di Gambar 2.4.



Sumber: Digambar Ulang dari Berg dan Ehin, 2006:57

**GAMBAR 2.4**

### TIGA PARADIGMA PENDEKATAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN INTEGRASI EKONOMI UNI EROPA

Integrasi ekonomi tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan lebih lanjut dalam mendukung pengembangan kawasan perbatasan di Uni Eropa.

Dalam kajiannya terhadap kebijakan pengembangan wilayah perbatasan di Eropa, Berg dan Ehin (2006) mengajukan kerangka kerja awal yang berfokus pada tiga karakteristik dalam wilayah perbatasan, yaitu: 1) tipe fungsi atribut perbatasan, 2) mode pemerintahan, dan 3) derajat keterbukaan, dimana kebijakan pengembangan perbatasan yang *fit* dengan kondisi tertentu perlu memandang ketiga aspek tersebut dalam perumusannya.

Dalam kaitannya terhadap konsep kebijakan pengembangan wilayah perbatasan, menurut Wu (2001), terdapat lima elemen kunci kebijakan yaitu *komplementaritas ekonomi, ketertarikan sektor swasta, intervensi pemerintah, kemampuan kerangka kerja institusi, dan faktor budaya* yang berimplikasi pada pengembangan perbatasan. Seperti dijelaskan dalam Tabel II.3 berikut.

**TABEL II.3**  
**ELEMEN KUNCI DALAM KEBIJAKAN**  
**PENGEMBANGAN PERBATASAN**

ELEMEN PENTING	IMPLIKASI
<i>Economic Complementarity</i>	Sifat dari komplementaritas, atau saling melengkapi dalam faktor produksi, terbukti mampu meningkatkan keuntungan dari kedua belah pihak, contoh sukses dari sisi ini adalah perbatasan Hong Kong – Shenzen dan SIJORI (Singapore – Johor – Riau).
<i>Private Sektor Interest</i>	Seperti halnya dengan pengembangan bidang lain, pengembangan <i>cross border</i> bergantung pada faktor lokasi yang menjanjikan, yang seringkali posisinya tidak sama dengan persepsi pemerintah, sebagai contoh adalah Shenzen yang relatif berkembang oleh faktor kedekatan ( <i>proximity</i> ), kemudahan transportasi, kerjasama pemerintah. Namun dari beberapa hal tersebut yang terpenting adalah <i>lokasi</i> dan <i>komplementaritas</i> untuk menarik sektor swasta berinvestasi.
<i>Government Intervention</i>	Tidak banyak pemerintah yang memiliki sumber daya dan <i>ideology</i> untuk membangun kawasan perbatasan tanpa melibatkan sektor swasta, meskipun dalam banyak kasus, keterlibatan sektor swasta berperan penting dalam kesuksesan pembangunan. Namun dalam hal investasi yang besar seperti di bidang infrastruktur perlu adanya intervensi pemerintah, dimana perannya sebagai penyedia kerangka kerja dan mengorganisasi kegiatan untuk merangsang sektor swasta ikut berpartisipasi.
<i>Institutional Framework</i>	Hal ini sangat penting ketika pembangunan secara spontan terjadi, institusi ini berguna sebagai transisi menuju fungsi formal dari <i>cross-</i>



ELEMEN PENTING	IMPLIKASI
<u>lanjutan</u>	<i>border development</i> , dan mempromosikan serta mengkolaborasikan pembangunan dengan melihat faktor social dan lingkungan sebagai bagian dari sustainability pembangunan.
<i>Cultural</i>	Beberapa penelitian mengindikasikan pentingnya elemen budaya dalam meminimasi jarak psikis dan kognitif. Sebagai contoh antara Jerman dan Belanda, meskipun perbedaan ekonomi sangat kecil, namun perbedaan budaya tetap menjadi batas dalam perlakuan transaksi. Kebijakan yang berasumsi bahwa pengembangan kawasan perbatasan akan lebih cepat bila berfokus pada aspek ekonomi tidak selalu tepat, program dan kebijakan yang relevan dengan budaya/kultur yang ada memungkinkan berhasilnya pengembangan kawasan perbatasan (aspek ini satu paket dengan pengembangan kawasan perbatasan).

*Sumber: Wu, 2001 (33:36)*

### 2.2.2 Pendekatan dalam Pengembangan Wilayah Perbatasan

Menurut Wu (2001), terdapat banyak pendekatan dalam pengembangan wilayah perbatasan, namun terdapat tiga faktor penting dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan lebih lanjut, yaitu: pengembangan yang didahului oleh perencanaan dan pengembangan *infrastruktur* (sebelum kegiatan pengembangan ekonomi), pengembangan *investasi* di sektor swasta, dan pengembangan *program kebijakan*.

#### a. Pengembangan dengan Basis Infrastruktur (*Infrastructure-Led Development*)

Pendekatan ini biasanya melibatkan pemerintah dan agen perencanaan agar pembangunan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, pendekatan ini biasa dilakukan dengan alasan lokasi yang terpencil (*remote area*), politik maupun alasan keamanan. Sebagai contohnya adalah *The Tumen River Development Zone* dan *Hong Kong–Shenzhen Special Economic Zone (SEZ) development*.

**TABEL II.4**  
**BEST PRACTICE INFRASTRUCTURE-LED DEVELOPMENT**

<i>TUMEN RIVER DEVELOPMENT ZONE</i>	<i>HONG KONG – SHENZEN SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipromosikan oleh UNDP, dimana kawasan ini dikenal akan sumber daya alam dan <u>lanjutan</u> an laut yang cukup dalam. UNDP <u>memulai</u> inisiasi kerjasama dalam mendapatkan momentum project.</li> <li>• Project tersebut terdiri dari zona tiga negara (Korut, Rusia dan Mongolia) yang berbatasan yang berfungsi sebagai kawasan industry, pusat transportasi, dan kawasan yang dinamis bagi 10 juta penduduk di dalamnya.</li> <li>• Terdapat kendala dalam perspektif Rusia dan Korea Utara dimana terdapat intens/ perhatian yang berbeda terhadap pengembangan perbatasan Tumen.</li> <li>• Project ini merepresentasikan <i>tipe top down planning</i> yang digerakan oleh agen internasional (UNDP), dimana faktor penting yang terkait dalam hal ini adalah: perhatian dan interest yang berbeda antarnegara, rendahnya komplementaritas ekonomi, konflik cultural dan etnik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah ini merupakan kawasan yang sangat menarik selama de-kade, dengan focus ada pertum-buhan yang pesat di Shenzhen dan di sepanjang delta Zhujiang.</li> <li>• Pembangunan ini dimulai sejak tahun 1979 dengan focus pada pengembangan ekonomi di Shenzhen dengan industry baru-nya dan Hong Kong dengan sektor manufaktur.</li> <li>• Studi kasus ini merupakan contoh yang cukup baik dimana kebijakan <i>top down</i> dapat membawa pada pengembangan yang cukup lama dan signifikan.</li> <li>• Prasyarat kedekatan komplemen-taritas ekonomi adalah yang utama, eksistensi dari pusat pertumbuhan Hong Kong dalam transformasi ekonomi sangat penting dalam pengembangan wilayah.</li> <li>• Meskipun konsep ini sukses dari sisi ekonomi, namun kawasan ini masih bermasalah dengan kelembagaan yang berperan dalam mengatasi isu-isu di kawasan perbatasan.</li> </ul>

*Sumber: Wu, 2001(28:30)*

#### **b. Pengembangan dengan Basis Investasi (*Investment-Led Development*)**

Konsep pengembangan dengan basis investasi ini banyak dilakukan di wilayah perbatasan, meskipun biasanya konsep ini didahului dengan dominasi sektor swasta kecil menengah (UKM), beberapa *best practice* dari pengembangan dengan basis ini terdapat di Polandia–Jerman Timur, Thai-China-Burma dan Laos (TCBL) dan China-Vietnam di Donxing dan Mong Cai, seperti dijelaskan dalam Tabel II.5.

**TABEL II.5**  
***BEST PRACTICE INVESTMENT - LED DEVELOPMENT***

<i>POLAND – EAST GERMANY</i>	<i>THAILAND CHINA BURMA LAOS (TCBL)</i>	<i>CHINA – VIETNAM</i>
Dengan fenomena kawasan perbatasan yang diwarnai konflik demokrasi dan politik di Eropa, pada kawasan perbatasan Polandia–Jerman, peranan dari <i>sektor informal</i> dalam <i>pengembangan perbatasan sangat signifikan</i> . Kecenderungan sektor ini	Meskipun Thailand telah berhasil dalam membangun kawasan perbatasannya dengan China, Burma dan Laos, namun keterlibatan negara-negara tersebut hampir belum ada. Beberapa insiatif yang ada	Kawasan perbatasan yang <i>berbasis pada perdagangan</i> (Guang Xi–Quang Ninh), dengan intensitas pembentukan zona industri guna menarik investasi. Demikian juga di Doangxing kota di Provinsi Guangxi yang

<b>POLAND – EAST GERMANY</b>	<b>THAILAND CHINA BURMA LAOS (TCBL)</b>	<b>CHINA – VIETNAM</b>
berlokasi di sedikit tempat terutama di tempat lintas batas ( <i>border crossings</i> ). <u>lanjutan</u> Keberadaan mereka menjamur, seiring dengan masyarakat Jerman Timur yang lebih suka berbelanja ke Polandia karena <i>high-cost item</i> barang produksi Jerman.  Upaya pengembangan ini menarik oleh pihak Jerman dikarenakan pengalaman manufaktur dan murah tenaga kerja yang didapatkan dari Polandia, namun demikian adanya institusi diperlukan untuk keterpaduan pembangunan.	seperti: <i>special economic zones, diregulasi free trade zones, master plan pariwisata, dan rencana fisik kota</i> dibangun di kawasan tersebut, namun faktanya para investor mengabaikan beberapa stimulant tersebut dan secara mengejutkan, pertumbuhan terjadi pada area yang tidak direncanakan, seperti di selatan perbatasan Sodao dekat dengan Malaysia, terjadi 50 % perdagangan ( <i>trade</i> ) di wilayah tersebut	menjadi border zone dengan Mong Cai (Vietnam). Hampir 50 % perdagangan di Provinsi tersebut melewati wilayah ini, sejak tahun 1990 perbatasan ini mengalami <i>booming trade</i> dan berhasil menarik investor asing dalam pengembangan industri.  Begitupun dari sisi Mong Cai (Vietnam), besarnya daya tarik wisata mengakibatkan besar-nya arus perlintasan orang menuju Vietnam, hal ini berdampak pada munculnya rencana investasi di berbagai bidang ( <i>industry, processing, residenti-al, tourism</i> ) dalam pengembangan China–Vietnam borders.

*Sumber: Wu, 2001 (30-33)*

### c. Pengembangan dengan Basis Kebijakan (*Policy-led Development*)

Dalam kaitannya dengan hal ini, kasus Uni Eropa merupakan pengembangan dengan basis pada kebijakan moneter dan kebijakan tanpa batas di Eropa (*borderless*). Dua kebijakan tersebut didukung oleh program yang spesifik dan bantuan finansial, beberapa zona eksisting industri besar yang berkembang seperti *the Upper Rhine, Baden Wuttenberg*, dan *Emilia-Romagna* dibangun di kawasan perbatasan dalam rangka pengembangan yang terpadu.

**TABEL II. 6**  
**TIGA PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN**

	<b>CONTOH KASUS</b>	<b>FAKTOR IMMOBILITAS</b>	<b>BIAYA TRANSAKSI</b>	<b>ISU KELEMBAGAAN</b>	<b>EKONOMI WILAYAH</b>	<b>KOMPLEMEN- TARITAS</b>	<b>SEKTOR INFORMAL</b>	<b>BATAS BUDAYA</b>
<b>Infrastructure-led</b>	Tumen (North East China)	Prasyarat penting	Sangat tinggi (karena terpendil)	Kompleks	Perbedaan pengalaman transisi ekonomi	Tidak jelas	Tidak dipertimbangkan sebagai bagian rencana	Kemungkinan antipati
	Hong Kong – Shenzhen	Garansi oleh Cina selama 50 Tahun	Birokrasi yang tidak nyaman	Semakin berkurang meskipun masih ada masalah	Semakin tertutup	Mendekati pusat pertumbuhan	Bukan bagian dari rencana asli	Punya daya tarik kebudayaan
<b>Investment-led</b>	Polandia – Jerman	Keuntungan dari ekonomi transisi		Semakin berkurang	Familiar dengan masalah ekonomi transisi	Produk berbiaya rendah untuk populasi berpendapatan rendah	Signifikan	Signifikan
	Thailand – wilayah tetangganya	Keuntungan dari ekonomi transisi		Semakin berkurang	Familiar dengan masalah ekonomi transisi	Produk berbiaya rendah untuk populasi berpendapatan rendah	Signifikan	Tinggi
<b>Policy-led</b>	Saling menguntungkan	Bukan isu lagi	Minimalis antarnegara Uni Eropa	Budaya atau Institusi local masih menghadapi masalah	Semakin tertutup	Tingkat bervariasi	Bukan sebagai isu	Jarak psikis masih menjadi masalah

*Sumber: Wu, 2001(29)*

### 2.3 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis sejarah pertumbuhan ekonomi di 13 negara berkembang di Eropa dan Jepang (Hamberg, 1971), ditemukan beberapa hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi:

- Berkembangnya sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian,
- Berkembangnya sektor industri berkaitan dengan mulai menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.
- Meningkatnya subsektor yang mendukung sektor industri yaitu: transportasi, fasilitas umum
- Subsektor lain yang dibangun oleh pemerintah yang meningkat pesat.

Beberapa temuan tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari kontribusi secara sektoral dalam struktur ekonomi wilayah. Kecenderungan pergeseran sektoral khususnya sektor pertanian tersebut merupakan salah satu indikasi dari terjadinya pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia hanya semenjak dua abad belakangan ini. Dalam periode tersebut dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sampai abad ke-18 mayoritas masyarakat di berbagai negara masih hidup pada tahap subsistensi dan mata pencarian utamanya adalah dari melakukan kegiatan di sektor pertanian, perikanan, dan berburu.

Konsep pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut, pertumbuhan yang terjadi diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga yang konstan (Tarigan, 2006). Kemakmuran suatu wilayah, selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah, ditentukan pula oleh *transfer-payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau masuk ke dalam wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dapat pula dinyatakan sebagai peningkatan sejumlah komoditas yang dapat dipergunakan dalam suatu wilayah. Konsep ini menyangkut pengaruh perdagangan, yaitu komoditas sebagai suplai hasil akhir

yang meningkat melalui pertukaran antarwilayah (Adisasmita, 2005). Aliran komoditas tersebut dapat diidentifikasi dengan asal, tujuan dan volumenya, analisis ini memberikan gambaran bagi peran wilayah dalam pola perdagangan. Selanjutnya dikaitkan dengan interval waktu, aliran komoditas ini memberikan input bagi pasar ekspor suatu wilayah dan memberikan arahan dalam pengembangannya (Bendavid-Val, 1991).

Pengembangan wilayah di perbatasan erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi wilayah, dilihat dari sudut pandang ekonomi, perkembangan wilayah terkait dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, yang dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Sedangkan untuk melihat pendapatan wilayah, dapat digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan wilayah tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi wilayah.

### 2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

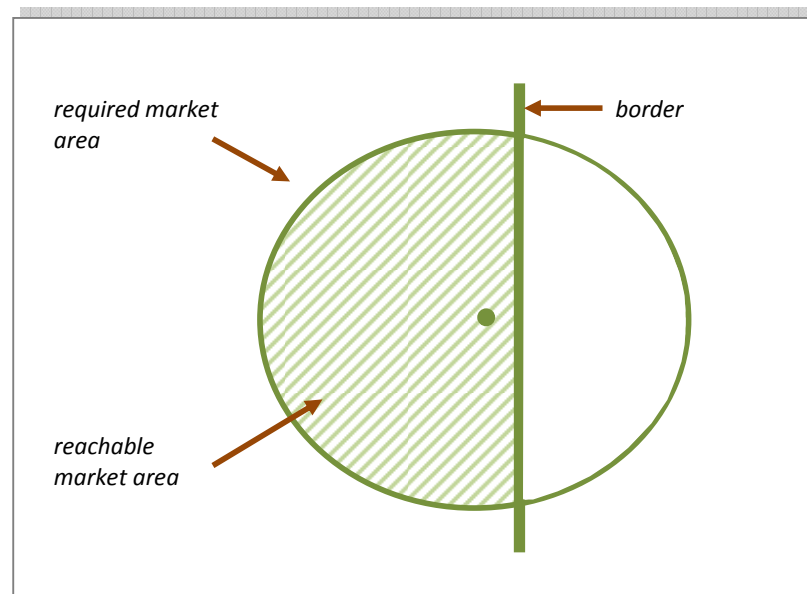
Perubahan paradigma perbatasan dari konsep *security* menuju konsep *prosperity* berimbas pada sisi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Interaksi yang terjadi mengakibatkan berkembangnya aktivitas dan kegiatan perekonomian masyarakat di perbatasan. Bagian berikut menjelaskan mengenai konsep-konsep dalam pertumbuhan ekonomi dan indikator terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan perspektif pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan, secara teoritis pertumbuhan ekonomi berimbas pada efek integrasi ekonomi yang diikuti oleh perubahan spasial atau penggunaan lahan. Kondisi tersebut terjadi dengan syarat adanya iklim yang sesuai antara model ekonomi, dampak keruangan, dan kebijakan untuk menunjang hal tersebut. Model lokasi tradisional dan model baru geografi ekonomi mengindikasikan bahwa perdagangan eksternal dapat mengubah pola spasial penggunaan lahan di wilayah perbatasan (Niebuhr & Stiller, 2001).

Berkaitan dengan perkembangan wilayah, menurut Branch (1998), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah, antara lain adalah: bentuk fisik (guna lahan dan struktur ruang), fungsi wilayah (fungsi

ekonomi, perdagangan dan industri) yang dipengaruhi aktivitas penduduk, sifat masyarakat (kultur dan kepercayaan, sosial dan gaya hidup), ketersediaan unsur umum (jaringan jalan, air bersih, dan lain-lain). Beberapa faktor tersebut berperan penting dalam perkembangan wilayah perbatasan. Tumbuhnya aktivitas ekonomi dapat dicirikan dengan terjadinya perubahan pada aspek spasial, sosial, dan infrastruktur yang berkembang.

Berkembangnya aktivitas ekonomi di perbatasan tidak terlepas dari potensi pasar yang dimilikinya. Dengan meninjau model lokasi dan pertimbangan area pemasaran pada sebuah wilayah, wilayah perbatasan dapat saja dipandang sebagai sebuah area yang kurang menguntungkan bagi berkembangnya potensi pasar. Pertimbangan tersebut didasarkan pada beberapa rintangan yang biasanya terjadi (tarif, kebijakan, dan hambatan lain) pada wilayah perbatasan yang menyebabkan potensi tumbuhnya perekonomian tidak terjadi secara optimal karena area jangkauan pemasaran yang berkurang (Niebuhr & Stiller, 2001). Secara lebih jelas kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Sumber: Diadopsi dari Niebuhr & Stiller, 2001:6

**GAMBAR 2.5**  
**DISTORSI AREA PASAR AKIBAT ADANYA BERBAGAI RINTANGAN**  
**DI WILAYAH PERBATASAN**

### 2.3.2 Struktur Ekonomi Wilayah

Struktur perkonomian yang ada di satu wilayah dibedakan menjadi 9 sektor lapangan usaha (PDRB Provinsi Kalimantan Barat, 2008), diantaranya adalah pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan air bersih, konstruksi bangunan, perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan/jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya. Dalam perekonomian wilayah itu sendiri ekonomi dibedakan menjadi dua karakteristik, yaitu perkotaan dan perdesaan. Dalam kategori perdesaan, sektor pertanian dan pertambangan adalah sektor primer yang masuk dalam sektor ekonomi perdesaan (Arsyad, 2005), sektor lainnya masuk dalam sektor sekunder dan tersier. Di perkotaan, seringkali sektor ekonominya berbasis pada perdagangan dan jasa (Tarigan, 2006).

Sektor ekonomi perkotaan dianggap menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan lebih baik daripada sektor perdesaan, sehingga dengan adanya anggapan tersebut, penduduk perdesaan mulai beralih ke perkotaan, karena tarikan ekonomi tersebut.

### 2.3.3 Teori Basis Ekonomi Wilayah

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut (Tarigan, 2006). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi di suatu daerah terkait dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah.

Dalam menentukan basis dari suatu wilayah, Daldjoeni (1998) membedakan adanya dua jenis kegiatan ekonomi:

1. Kegiatan ekonomi dasar, merupakan kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan ekspor;
2. Kegiatan ekonomi bukan dasar, kegiatan yang dialokasikan untuk kebutuhan lokal.

Dari kegiatan tersebut, kegiatan ekonomi dasar yang ada pada suatu wilayah akan menjadi basis dalam sektor ekonomi wilayah tersebut. Teori basis



ekonomi (Glasson, 1977) menyatakan perekonomian wilayah dibedakan dalam dua sektor, antara lain:

1. Sektor basis, sektor yang mampu mengeksport barang dan jasa ke luar wilayah dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah;
2. Sektor non basis, sektor yang bersifat lokal, yang hanya mampu memenuhi permintaan dari penduduk lokal.

Hanya sektor basis yang kemudian dapat mendorong perekonomian wilayah, ekspor adalah menjual barang/jasa ke luar wilayah, dan termasuk juga di dalamnya adalah tenaga kerja. Sedangkan untuk sektor non basis, masuk dalam sektor servis atau pelayanan, hal tersebut dikarenakan sektor basis hanya melayani kebutuhan lokal saja. (Tarigan, 2006). Teori basis ekonomi sangat berperan dalam menentukan kegiatan perekonomian yang ada pada suatu wilayah, sektor basis yang ada di suatu wilayah menunjukkan dominasi kegiatan ekonomi yang ada di wilayah tersebut.

#### **2.3.4 Kinerja Perekonomian Wilayah**

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, terdapat beberapa analisis, *shift share* merupakan analisis yang membantu menganalisis perubahan struktur perekonomian dibandingkan dengan perekonomian yang lebih luas, tujuan analisis ini adalah menentukan kinerja atau produktivitas perekonomian (Arsyad, 2005). Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu dengan yang lain (Bendavid-Val, 1991) yaitu pertumbuhan ekonomi, pergeseran proporsional (*proporsional shift*) dan pergeseran diferensial (*differensial shift*). Hasil analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu daerah/wilayah perbatasan Entikong dibandingkan secara relatif dengan sektor lainnya, apakah tumbuh cepat atau lambat.

### **2.4 Strategi Pengembangan**

Definisi strategi terkait dengan konteks penelitian dapat diartikan sebagai penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang, penetapan arah, tindakan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan dalam mencapai tujuan pengembangan (Chandler, 1962). Strategi tersebut memadukan tema pokok yang memberikan

koherensi terhadap arah tindakan yang akan diambil serta melibatkan komitmen atas sumber daya dalam jangka waktu tertentu. Strategi tersebut penting dan memberikan jalan keluar bagi permasalahan tertentu dan spesifik.

Dalam perumusan strategi terdapat empat karakteristik penting yang menentukan keberhasilan sebuah strategi, karakteristik tersebut adalah: 1) sasaran sederhana jangka panjang; 2) penilaian atas lingkungan dan persaingan/kondisi yang dihadapi; 3) penilaian atas sumber daya yang objektif; 4) penerapan yang efektif (McIntosh, 2001). Strategi pengembangan selain melibatkan karakteristik diatas, juga terkait dengan penilaian terhadap fleksibilitas perencanaan jangka pendek dan menengah (investasi), efisiensi biaya, adaptasi global terhadap kondisi internal, kompetisi, dan kolaborasi. Beberapa konsepsi strategi tersebut sangat terkait dengan strategi pengembangan wilayah perbatasan yang akan diformulasikan, hal ini melihat konteks wilayah perbatasan sebagai kawasan khusus yang memiliki keunikan dalam integrasinya secara global (antarnegara).

Keuntungan dalam pengelolaan sebuah strategi yang tepat dalam fungsinya untuk mencapai tujuan pengembangan adalah adanya kerangka kerja yang efektif, adanya fungsi koordinasi, penentuan terhadap prioritas, integrasi pelaku/*stakeholder* dalam mencapai tujuan. Berbagai keuntungan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam formulasi strategi yang tepat, terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

## 2.5 Sintesa Review Literatur

Berbagai tinjauan literatur maupun teoritis merupakan kajian atas fenomena yang terjadi di kawasan perbatasan. Kajian tersebut menunjukkan berbagai hal penting yang terkait dan menjelaskan tentang berbagai hal yang terjadi di wilayah perbatasan, yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan perbatasan di Entikong.

Beberapa kesimpulan terkait kajian literatur ini adalah sebagai berikut:

- Kawasan perbatasan memiliki ciri tertentu dengan berbagai dinamika hubungan yang terjadi. Khususnya di kawasan perbatasan darat, perbedaan

kondisi dengan wilayah yang berbatasan cenderung menuju ke arah pertumbuhan bidang ekonomi yang disertai dengan perubahan spasial.

- Terdapat berbagai elemen penting dalam fungsi pembelajaran/*best practice* terhadap pengembangan wilayah perbatasan darat antarnegara dengan basis pada pertumbuhan ekonomi, yaitu: komplementaritas ekonomi, ketertarikan sektor swasta, intervensi pemerintah, kerangka kerja institusi, budaya, pendekatan infrastruktur, pendekatan investasi, dan pendekatan kebijakan.
- Pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian yang tumbuh karena interaksi dan terbukanya akses di perbatasan serta adanya kebijakan yang berperan di kawasan tersebut.
- Pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dapat diindikasikan dari perubahan penggunaan lahan, struktur ruang, dan pertumbuhan penduduk akibat berkembangnya kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan.

Sintesa teori dan literatur terkait dengan kawasan perbatasan tersebut akan dipergunakan untuk menjawab tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, output aspek terkait akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk *variabel yang lebih operasional* sehingga lebih lanjut akan dipergunakan dalam tahap pengumpulan data dan analisis. Kerangka teoritis dalam kajian literatur ini dapat dilihat di Gambar 2.6, sedangkan sintesa literatur dan variabel operasional dapat dilihat pada Tabel II.7 dan Tabel II.8.



*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

**GAMBAR 2.6**  
**KONSTRUKSI TEORITIS**

**TABEL II. 7**  
**SINTESA PERSPEKTIF PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN**

NO.	DASAR TEORI/ LITERATUR	PENJELASAN	SUMBER	MANFAAT	TUJUAN	VARIABEL
1.	Pengertian, Fungsi, Tipologi kawasan perbatasan,	Karakteristik perbatasan, adanya perubahan paradigma dalam pengembangan kawasan perbatasan dari aspek <i>security</i> menjadi <i>prosperity</i> , sifat dari perbatasan yang <i>mobile</i> dan <i>dispersed</i>	Rumford (2006); Andreas dan Snyder (200), Giroux (2005), Guo (2005), Van Well (2006), Wu (2001)	Mengetahui karakteristik dan tipologi perbatasan dalam dinamika dan perkembangan kawasan perbatasan	Mendukung sasaran 1,3,4	- Kependudukan
2.	Hubungan di kawasan perbatasan	Terjadinya pola transaksi inter maupun intra wilayah dengan pergerakan orang maupun barang untuk berbagai kesempatan (ekonomi, sosial, budaya)	Gottman (1980), Presscot (1987), Akaha dan Vassileva (2005), Kearney (2004), Branch (1995)	Mengetahui aspek penting dalam hubungan di perbatasan (pusat-pinggiran) dan hubungan ekonomi di perbatasan.	Mendukung sasaran 1,2,3,4	- Struktur ruang - Struktur perekonomian - Penggunaan lahan
3.	Konsep kebijakan, pendekatan pengembangan dan <i>best practice</i> dan <i>lesson learned</i>	Konteks kebijakan dalam pengembangan perbatasan berdasar paradigma tertentu, berbagai elemen penting dalam kebijakan, pendekatan pengembangan dengan berbagai basis, <i>lesson learned</i> dan <i>best practice</i> negara dengan perbatasan darat	Berg dan Ehin (2006), Wu (2001), Ratti (1993).	Mengetahui konteks kebijakan yang fit, pendekatan yang sesuai serta <i>best practice</i> dari berbagai pendekatan	Mendukung sasaran 2,3,4	- Regulasi - Pendekatan Pengembangan Perbatasan - Aktivitas ekonomi
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dengan nilai riil, analisis regional yang menentukan pertumbuhan di wilayah perbatasan, perubahan guna lahan dan penduduk akibat tumbuhnya aktivitas ekonomi	Tarigan (2004), Adisasmita (2005), Arsyad (2005), Glasson (1977), Bendavid –Val (1991), Niebuhr & Stiller (2001), Hamberg (1971)	Mengetahui peran pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan dan indikator terkait	Mendukung sasaran 1,2,3	- Struktur perekonomian - Penggunaan Lahan - Struktur ruang
5	Strategi Pengembangan	Memadukan tema pokok yang memberikan koherensi terhadap arah tindakan yang akan diambil serta melibatkan komitmen atas sumber daya dalam jangka waktu tertentu	Chandler (1962), McIntosh (2001)	Mengetahui konsepsi dan formulasi strategi pengembangan	Mendukung sasaran 4	- Regulasi - Elemen-elemen <i>best practice</i>

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

**Tabel II. 8**  
**VARIABEL PENELITIAN**

NO.	TEORI/LITERATUR	VARIABEL	ELEMEN
1.	<i>Pengertian, fungsi, tipologi kawasan perbatasan</i> Rumford (2006); Andreas dan Snyder (2000), Giroux (2005), Guo (2005), Van Well (2006), Wu (2001)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi Penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertumbuhan penduduk</li> <li>▪ Komposisi penduduk</li> </ul>
2.	<i>Hubungan di kawasan perbatasan</i> Gottman (1980), Presscot (1987), Akaha dan Vassileva (2005), Kearney (2004), Bendavid – Val (1991)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Struktur ekonomi</li> <li>▪ Penggunaan lahan</li> <li>▪ Struktur ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontribusi sektor ekonomi</li> <li>▪ Sektor ekonomi basis</li> <li>▪ Kinerja sektor ekonomi</li> <li>▪ Perubahan penggunaan lahan</li> <li>▪ Perubahan struktur ruang</li> </ul>
3.	<i>Konsep kebijakan, pendekatan pengembangan, best practice dan lesson learned</i> Berg dan Ehin (2006), Wu (2001), Ratti (1993)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elemen pengembangan</li> <li>▪ Pendekatan pengembangan perbatasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regulasi</li> <li>▪ Elemen-elemen <i>best practice</i></li> </ul>
4.	<i>Pertumbuhan Ekonomi</i> Tarigan (2004), Adisasmita (2005), Arsyad (2005), Glasson (1977), Bendavid – Val (1991), Niebuhr & Stiller (2001), Hamberg (1971), Branch (1995)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Struktur perekonomian</li> <li>▪ Penggunaan Lahan</li> <li>▪ Kondisi struktur ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontribusi sektor ekonomi</li> <li>▪ Laju pertumbuhan ekonomi</li> <li>▪ Sektor ekonomi basis</li> <li>▪ Kinerja sektor ekonomi</li> <li>▪ Perubahan penggunaan lahan</li> <li>▪ Perubahan struktur ruang</li> </ul>
5	<i>Perumusan Strategi</i> Chandler, (1962), McIntosh (2001)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elemen pengembangan</li> <li>▪ Pendekatan pengembangan perbatasan</li> <li>▪ Kondisi spasial dan ekonomi kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regulasi</li> <li>▪ Elemen-elemen <i>best practice</i></li> </ul>

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

### **BAB III**

## **TINJAUAN WILAYAH PERBATASAN ENTIKONG**

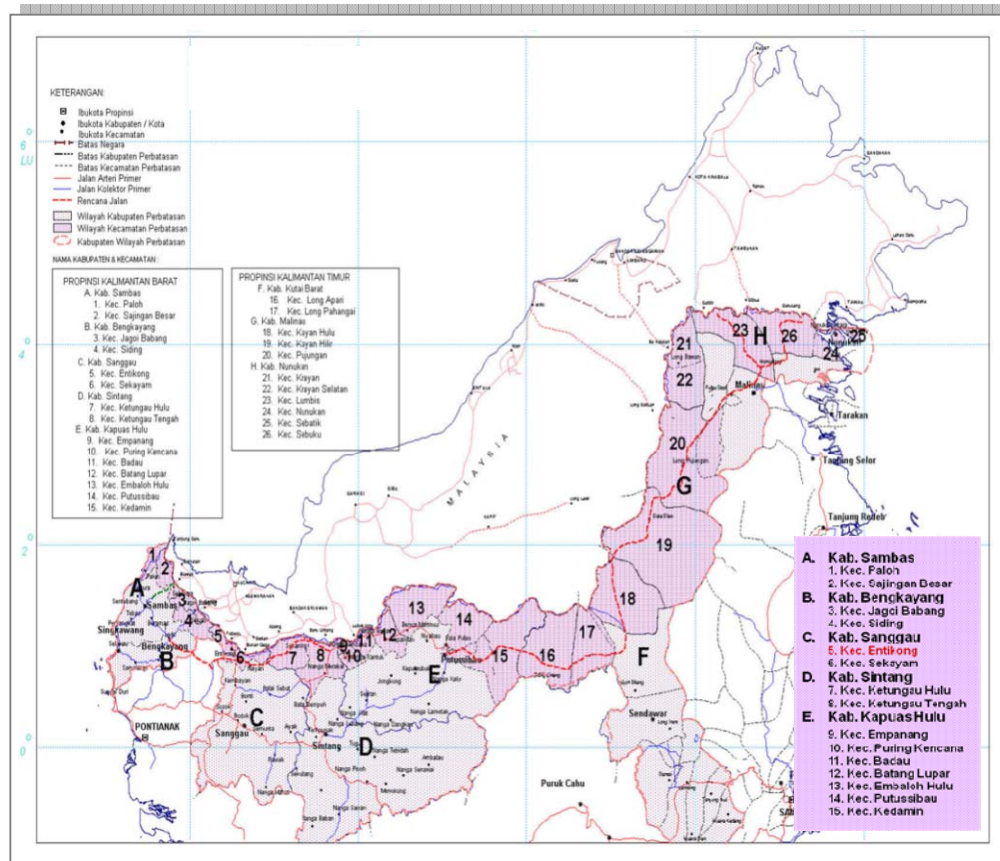
Tinjauan wilayah perbatasan Entikong ini memberikan gambaran karakteristik wilayah penelitian yang terkait dengan analisis yang akan dilakukan pada pembahasan selanjutnya. Tinjauan ini membahas mengenai konteks wilayah penelitian yang meliputi kondisi wilayah perbatasan Entikong, isu dan permasalahan, kebijakan yang berperan secara internal, serta sekilas kondisi Kawasan Perbatasan Sarawak yang dikomparasikan dengan Entikong.

### **3.1 Kondisi Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat**

Panjang wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia) sekitar 1200 km. Panjang garis perbatasan tersebut sebesar 70,58% berada di Provinsi Kalimantan Barat (847,3 km), serta melintasi lima daerah kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu, meliputi 14 daerah kecamatan (Gambar 3.3).

Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak (Malaysia) lebih maju dibandingkan daerah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Ishak, 2003). Pada kawasan perbatasan Kalimantan Barat telah ditetapkan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi yang pertama (Entikong–Tebedu) di Kabupaten Sanggau yang dibangun pada tahun 1991 dan yang kedua dibangun di Nanga Badau–Lubuk Antu yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. PPLB itu merupakan bagian dari enam PPLB yang telah disepakati dengan pihak Sarawak untuk dibuka di perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak (Paloh, Sajingan Besar, Jagoibabang, Entikong, Jasa Karangas Kagau, dan Nanga Badau).

Selain PPLB tersebut, terdapat pula pos lintas batas (PLB) yang tidak resmi, yaitu sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak. Hingga saat ini, yang telah disepakati kedua negara baru 10 buah desa di Kalimantan Barat dan 7 kampung lainnya di Sarawak.

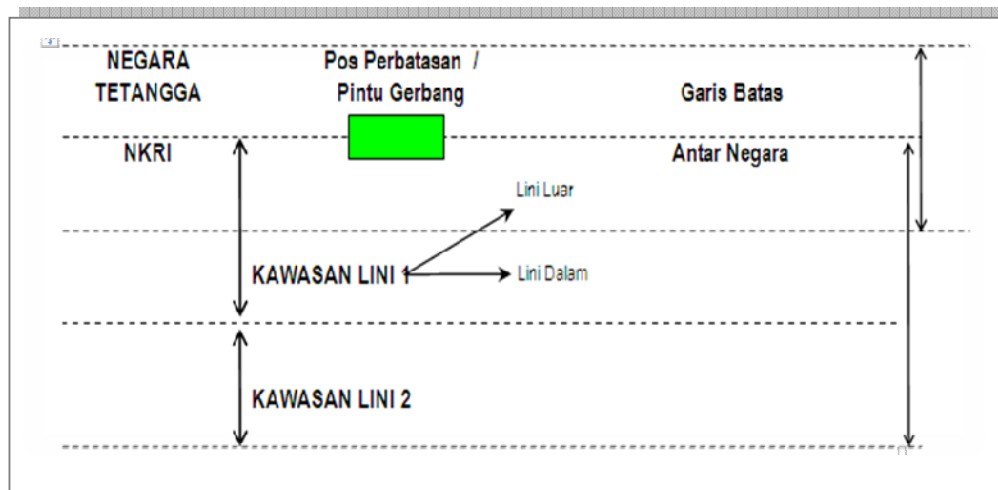


Sumber: Ditjen Cipta Karya, 2007

**GAMBAR 3.1**  
**PETA CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN KALBAR**

Kondisi kawasan perbatasan terbagi menjadi beberapa lini. Lini tersebut berfungsi sebagai garis yang membagi fungsi di kawasan perbatasan. Terdapat 2 (dua) lini kawasan, untuk *lini pertama* terbagi menjadi lini luar dan lini dalam. Lini luar merupakan garis daerah yang memanjang dan sejajar dengan garis perbatasan, merupakan kawasan lindung yang jaraknya ke dalam sekitar 4 km, sedangkan lini dalam adalah garis daerah sejajar dengan lini luar, merupakan kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan dan penyediaan prasarana sarana dasar. *Lini kedua* adalah garis daerah yang memanjang di lini belakang pertama, yang kedalamannya sampai batas 1 (satu) kabupaten. Selengkapanya dapat dilihat di Gambar 3.2.





Sumber: Ditjen Cipta Karya, 2009

**GAMBAR 3.2**  
**ILUSTRASI LINI PADA KAWASAN PERBATASAN**

Kawasan perbatasan Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam cukup besar, yaitu potensi sumber daya tambang batu bara, emas, hutan seluas 80.000 ha, perikanan air tawar yang cukup menjanjikan, serta perkebunan rakyat seperti coklat, lada, karet. Sayangnya, potensi tersebut belum dikembangkan secara optimal, sehingga belum mampu mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Aktivitas perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan sebagian besar masih bersifat tradisional, baik pada sektor pertanian maupun sektor perdagangan (masih menggunakan sistem *barter*). Wilayah ini cenderung sebagai *hinterland* perekonomian Sarawak, hingga saat ini nilai tambah dari terbukanya aktivitas perbatasan belum terlihat. Kondisi demikian menunjukkan kondisi perekonomian Malaysia yang lebih maju dibandingkan Kalimantan Barat.

Pengembangan kawasan perbatasan pada saat ini belum dikelola secara baik dan belum adanya konsep pembangunan yang jelas, komprehensif dan integratif. Aktivitas pembangunan masih berupa rencana pembangunan parsial dengan pendekatan sektoral. Contohnya adalah eksploitasi kawasan hutan (legal dan ilegal) dengan sasaran pokok hanya pada pertumbuhan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal tanpa mempertimbangkan aspek sustainabilitas.

### 3.2 Kondisi Kecamatan Entikong

Kecamatan Entikong merupakan salah satu dari 22 kecamatan yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Sanggau dengan batas-batas sebagai berikut (Gambar 3.3):

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Landak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sekayam
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang

Kecamatan Entikong secara administratif terdiri dari 5 desa dan 18 dusun, dengan rincian sebagai berikut.

**TABEL III.1**  
**LUAS WILAYAH ADMINISTRASI KOTA ENTIKONG**  
**KABUPATEN SANGGAU**

NO.	NAMA DESA	DUSUN	LUAS (km <sup>2</sup> )	PERESENTASE
1.	Entikong	4	110.98	21.89
2.	Semanget	3	62.54	12.34
3.	Nekan	4	100.40	19.81
4.	Pela Pasang	3	85.15	16.80
5.	Suruh Tembawang	4	148.82	29.36
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>506.89</b>	<b>100</b>

*Sumber: BP2KKP, 2006*

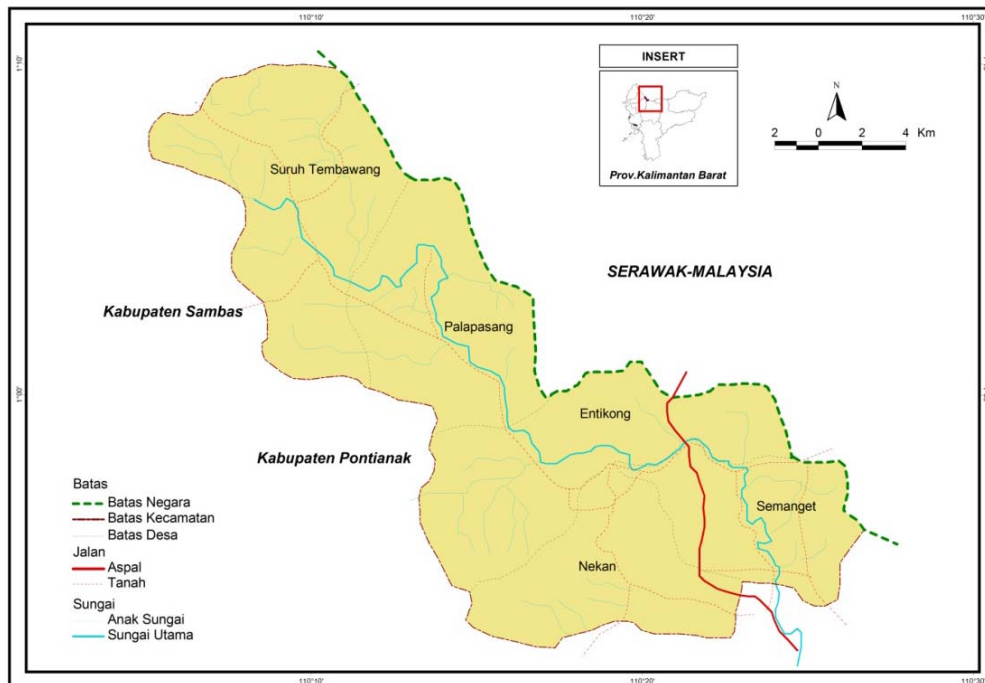
Jangkauan jarak dari desa di Kecamatan Entikong wilayah perbatasan Entikong ke pusat-pusat kegiatan dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut.

**TABEL III.2**  
**JARAK DARI DESA DI KOTA ENTIKONG KE IBUKOTA KECAMATAN,**  
**KABUPATEN, PROVINSI**

NO.	NAMA DESA	JARAK TEMPUH KE IBUKOTA (km <sup>2</sup> )
-----	-----------	--

		KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI
1.	Entikong	0	145	317
2.	Semanget	6	139	311
3.	Nekan	135	158.5	330.5
4.	Pela Pasang	30	175	347
5.	Suruh Tembawang	42	187	359

Sumber: BP2KKP, 2006



Sumber: Bappeda Kabupaten Sanggau, 2009

### GAMBAR 3.3 WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN ENTIKONG

Secara geografis, dari 5 desa di Kecamatan Entikong, hampir seluruh desa berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, kecuali Desa Nekan. Dari 4 desa atau 9 dusun yang berbatasan langsung, pada umumnya mudah diakses oleh warga setempat untuk berinteraksi dengan masyarakat di kawasan Sarawak Malaysia. Hal ini disebabkan karena di desa/dusun diatas sudah sejak lama terbina hubungan baik (ikatan sosial) antarkampung di Sarawak yang terhubung melalui jalan setapak dan ojek. Kondisi demikian berperan bagi terjadinya aliran perekonomian dari Indonesia-Malaysia melalui pintu non resmi, dan resiko kebocoran terhadap pemanfaatan sumber daya menjadi isu yang kental di kawasan tersebut. Selengkapanya desa dan dusun yang berbatasan langsung dengan Sarawak dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut.

**TABEL III.3**  
**NAMA DESA DAN DUSUN YANG BERBATAS LANGSUNG DENGAN**  
**SARAWAK**

NO.	NAMA DESA	NAMA DUSUN	PERBATASAN NEGARA TETANGGA	PANJANG JALAN (km)
1.	Entikong	Entikong Sontas Serangkang	Kampung Entubuh/ Tebedu Kampung Entubuh/ Tebedu Kampung Temung	1
2.	Semanget	Panga	Kampung Kujang Saing dan Pang Amu	8
3.	Nekan	-	-	-
4.	Pela Pasang	Pala Pasang Mangkau Entabang	Kampung Sadir Kampung Tepui Kampung Tepui	8
5.	Suruh Tembawang	Gun Tembawang Gun Jemak	Kampung Sapit Kampung Sapit	1

*Sumber: BP2KKP, 2006*

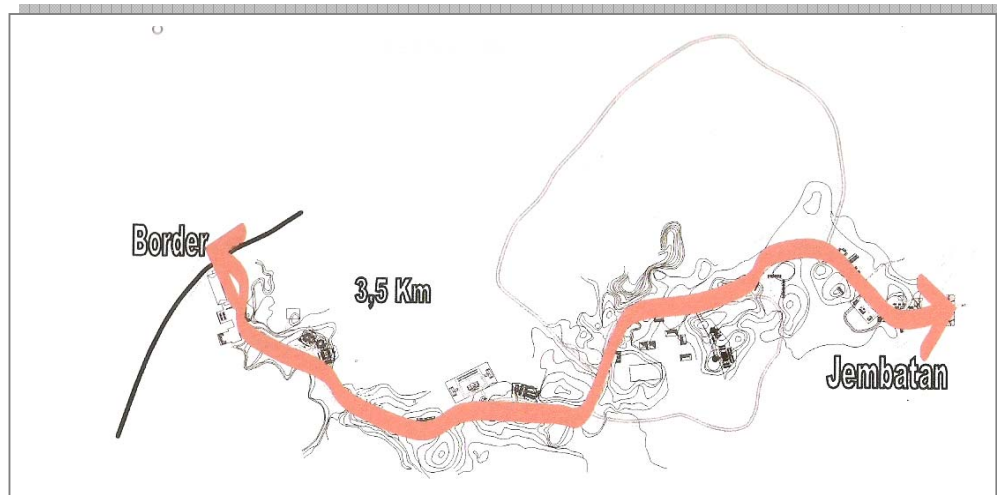
### 3.2.1 Penggunaan Lahan dan Struktur Ruang

Penggunaan lahan di wilayah studi secara umum dibedakan menjadi kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun adalah suatu kawasan yang penggunaan lahannya didominasi oleh bangunan perkotaan yang intensif ataupun produktif, sedangkan kawasan tidak terbangun adalah kawasan yang bentuk alamiahnya masih sangat dominan.

Pola pemanfaatan ruang di Kecamatan Entikong masih didominasi oleh kawasan lindung dan hutan produksi (2003-2007). Kawasan lindung tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu konservasi dan sempadan sungai. Luas keseluruhan kawasan konservasi tersebut mencapai  $\pm 80\%$  dari total luas wilayah kecamatan, tidak seluruh bagian kawasan direncanakan untuk mendukung kegiatan budidaya karena fungsi konservasi tersebut.

Secara eksisting, perkembangan dan pertumbuhan kota relatif pesat terjadi pada koridor jalan arteri primer/nasional. Dimulai dari jembatan Kota Entikong sampai dengan batas antarnegara, arah perkembangan cenderung mengarah pada pola linier (*ribbon development*). Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan kegiatan ekonomi formal dan informal pada kawasan sekitar border (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, 2009).

Pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat terjadi pada koridor jalan arteri primer terjadi sepanjang 3,5 km (Jembatan–PPLB). Berbagai kegiatan perekonomian mulai menimbulkan dampak berbagai pelanggaran bangunan dan lingkungan seiring dengan tidak terarahnya penataan bangunan di sepanjang koridor tersebut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, 2009.

**GAMBAR 3.4**  
**PERTUMBUHAN AKTIVITAS SEPANJANG JALAN ARTERI MENUJU**  
**PERBATASAN**

### 3.2.2 Kependudukan

Penduduk Kecamatan Entikong pada tahun 2007 berjumlah 13.083 jiwa dan tersebar di lima desa yaitu Desa Entikong, Semanget, Nekan, Pala Pasang, dan Desa Suruh Tembawang. Distribusi penduduk terbesar di Kecamatan Entikong yaitu sebesar 45,81% dari total jumlah penduduk (5.994 jiwa) berada di Desa Entikong, sedangkan yang terendah adalah Desa Suruh Tembawang yaitu sebesar 6,47% (846 jiwa). Kepadatan penduduk Kecamatan Entikong yang memiliki luas wilayah 506,89 km<sup>2</sup> adalah 29 jiwa/km<sup>2</sup>.

**TABEL III.4**  
**PENDUDUK KECAMATAN ENTIKONG TAHUN 2007**

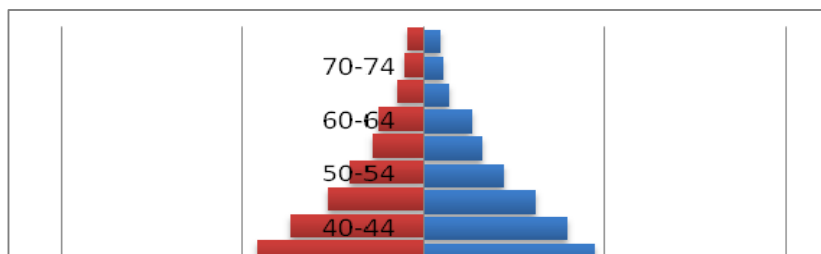
DESA/KELURAHAN	LUAS (KM <sup>2</sup> )	PENDUDUK (JIWA)	KEPADATAN/KM <sup>2</sup>
Nekan	100,63	2.008	20
Semanget	62,54	1.831	29
Entikong	110,98	5.944	54
Suruh Tembawang	84,02	846	10
Pala Pasang	148,82	2.454	16
<b>JUMLAH</b>	<b>506,89</b>	<b>13.083</b>	<b>29</b>

Sumber: Kecamatan Entikong dalam Angka, 2007

**TABEL III.5**  
**KOMPOSISI PENDUDUK KECAMATAN ENTIKONG TAHUN 2007**

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0-4	727	729	1456
5-9	745	731	1476
10-14	774	773	1547
15-19	712	726	1438
20-24	623	666	1289
25-29	582	603	1185
30-34	510	590	1100
35-39	474	458	932
40-44	401	365	466
45-49	308	265	573
50-54	223	202	425
55-59	160	142	302
60-64	133	123	256
65-69	71	71	142
70-74	54	52	106
75+	46	44	90
<b>JUMLAH</b>	<b>6.543</b>	<b>6.540</b>	<b>13.083</b>

Sumber: Kecamatan Entikong Dalam Angka, 2007



*Sumber: Kecamatan Entikong dalam Angka, 2007*

**GAMBAR 3.5**  
**PIRAMIDA PENDUDUK KECAMATAN ENTIKONG**

Berdasarkan piramida penduduk di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Entikong termasuk dalam kategori penduduk usia produktif (Usia 11-55 tahun sebesar 60%). Banyaknya penduduk usia produktif di daerah ini menjadi potensi tersendiri bagi Kecamatan Entikong karena banyak tersedia tenaga kerja produktif.

Kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah cukup tingginya jumlah pendatang atau transmigran yang masuk ke Kecamatan Entikong. Kecenderungan tersebut kemungkinan besar akan tetap terjadi dimasa depan, mengingat Kecamatan Entikong sebagai kawasan perbatasan yang strategis dengan luasan wilayah yang cukup luas berpotensi untuk menarik penduduk bertempat tinggal di wilayah tersebut. Untuk daftar mutasi atau migrasi dapat dilihat pada Tabel III.6 berikut:

**TABEL III.6**  
**KOMPOSISI PENDUDUK MIGRASI KECAMATAN ENTIKONG**  
**TAHUN 2007**

DESA/KELURAHAN	LAHIR	MENINGGAL	PINDAH	DATANG
Nekan	13	7	3	2
Semanget	11	5	1	2
Entikong	21	9	21	35
Suruh Tembawang	4	2	-	-
Pala Pasang	32	50	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>81</b>	<b>73</b>	<b>25</b>	<b>39</b>

*Sumber: Kecamatan Entikong dalam Angka, 2007*

### 3.2.3 Perekonomian Kawasan

Kecamatan Entikong merupakan kawasan sentra ekonomi yang relatif cepat perkembangannya. Kawasan ini memiliki sumber daya unggulan yang potensial untuk dikembangkan. Meskipun belum dimantapkan secara optimal, keanekaragaman sumber daya yang dimiliki sampai saat ini mampu mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong kegiatan unit-unit ekonomi kawasan.

Potensi lainnya adalah posisi strategis kawasan yang memungkinkan kecamatan ini memiliki akses langsung dengan Sarawak (Malaysia). Posisi strategis sebagai wilayah perbatasan yang memiliki akses langsung dengan negara tetangga merupakan faktor pendorong (*push factor*) bagi perkembangan perekonomian Kawasan Entikong.

Sebagai kawasan perbatasan, perekonomian Entikong mengalami kemajuan sejak dibukanya PPLB. Akses jalur darat secara langsung ke Sarawak (Malaysia) berdampak pada kegiatan ekonomi maupun sosial budaya. Negara tetangga tersebut merupakan pasar potensial, tidak hanya bagi kepentingan produsen lokal di kawasan Entikong tetapi secara internal dapat dimanfaatkan oleh produsen yang ada di Kabupaten Sanggau maupun Kalimantan Barat atau bahkan oleh produsen nasional. Dengan demikian, keberadaan PPLB disamping memberikan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian Kawasan Entikong, juga menjadikan produktivitas ekonomi kawasan maupun regional akan meningkat secara keseluruhan.

Potensi pertanian di Kecamatan Entikong cukup bervariasi. Berbagai potensi pertanian terbagi menjadi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.7 berikut.



**TABEL III.7**  
**POTENSI PERTANIAN DI KECAMATAN ENTIKONG**

NO.	KATEGORI	JENIS KOMODITAS	VOLUME	KETERANGAN
1.	Tanaman Pangan	Padi	4.930 Ton	Luas lahan 2.077 Ha
		Jagung	114 Ton	Luas panen 60 Ha
2.	Perkebunan	Karet	494 Ton	Luas areal 1.235 Ha
		Kakao	20 Ton	Luas areal 334 Ha
		Lada	88,50 Ton	Luas areal 159 Ha
3.	Peternakan	Babi	16,004 Ton	Ternak terbesar

*Sumber: BP2KKP, 2005*

Potensi ekonomi lain di Kecamatan Entikong dapat terbagi menjadi industri dan perdagangan, seperti terlihat di Tabel III.8.

**TABEL III.8**  
**POTENSI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI KECAMATAN ENTIKONG**

NO.	KATEGORI	JENIS KOMODITAS	VOL.	KETERANGAN
1.	Industri (Kecil, Menengah, Besar)	Moulding, Daun Pintu, Jendela	7 Buah	Nilai Investasi 3.083.235.000,- dan Nilai Produksi 5.265.000.000,-
2.	Perdagangan (kecil, menengah, besar)	-	92 Unit	
		Pasar Tenda	720 kios	Ukuran kios (1,5 m2 x 3 m2) dengan jumlah pedagang 296 orang

*Sumber: BP2KKP, 2005*

Potensi pariwisata terdapat juga di Kecamatan Entikong. Sebagian besar potensi wisata tersebut adalah wisata alam. Objek wisata yang terdapat di Kecamatan Entikong dapat dilihat pada Tabel III.9 berikut:

**TABEL III.9**  
**POTENSI PARIWISATA DI KECAMATAN ENTIKONG**

NO.	JENIS PARIWISATA	LOKASI	JARAK DARI IBUKOTA KECAMATAN (KM)
1.	Air terjun Sungai Mahas	Dusun Sontas	6
2.	Air terjun Raja Lipan	Dusun Tapau	10
3.	Air terjun Sungai Aweet	Desa Suruh Tembawang	23
4.	Hutan lindung Gunung Senyang	Dusun Sontas	

5	Hutan lindung Gunung Entik	Dusun Merau	12
6	Hutan lindung Gunung Veneresen	Dusun Pala Pasang	6
7	Riam Benyawi	Dusun Sekejang	26
8	Riam Planduk	Desa Suruh Tembawang	27
			23

Sumber: BP2KKP, 2005

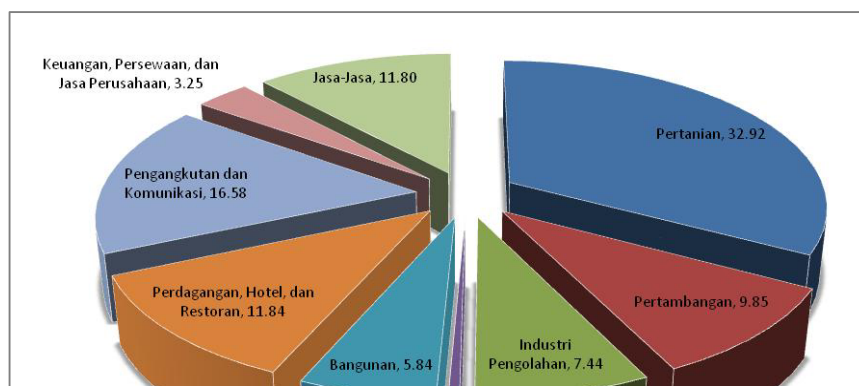
### 3.2.3.1 Struktur Ekonomi Kecamatan Entikong dan Kabupaten Sanggau

Dinamika perekonomian Kecamatan Entikong tidak terlepas dari peran sektor-sektor ekonominya. Mengacu pada komposisi sektor yang ada (data tahun 2007), menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup besar yakni sekitar 32,92%. Selanjutnya yang memiliki peranan cukup penting adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (16,58%).

**TABEL III.10**  
**PDRB KECAMATAN ENTIKONG TAHUN 2007 BERDASARKAN HARGA KONSTAN TAHUN 2000**

NO.	SEKTOR/SUB SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007
1	Pertanian	14,547.64	13939.73	15792.77	16949.83	17561.12
2	Pertambangan dan penggalan	6960.05	6857.87	6165.54	5448.89	5607.11
3	Industri pengolahan	2848.32	3264.91	3425.06	3641.16	3724.75
4	Listrik, gas, dan air bersih	147.64	174.60	178.88	218.75	252.87
5	Bangunan	2400.49	2467.19	2498.64	2797.18	3053.68
6	Perdagangan, restoran, dan hotel	5715.19	5569.79	5935.70	6052.09	6447.41
7	Pengangkutan dan komunikasi	6192.69	6217.84	7468.37	7760.87	8324.68
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1573.25	1611.51	1621.51	1646.79	1859.49
9	Jasa-jasa	4994.11	5170.50	5567.95	6144.23	6508.40
	Jumlah	45379.38	45273.94	48654.42	50659.79	53339.51

Sumber: Kecamatan Entikong dalam Angka, 2007



Sumber: Kecamatan Entikong dalam Angka, 2007

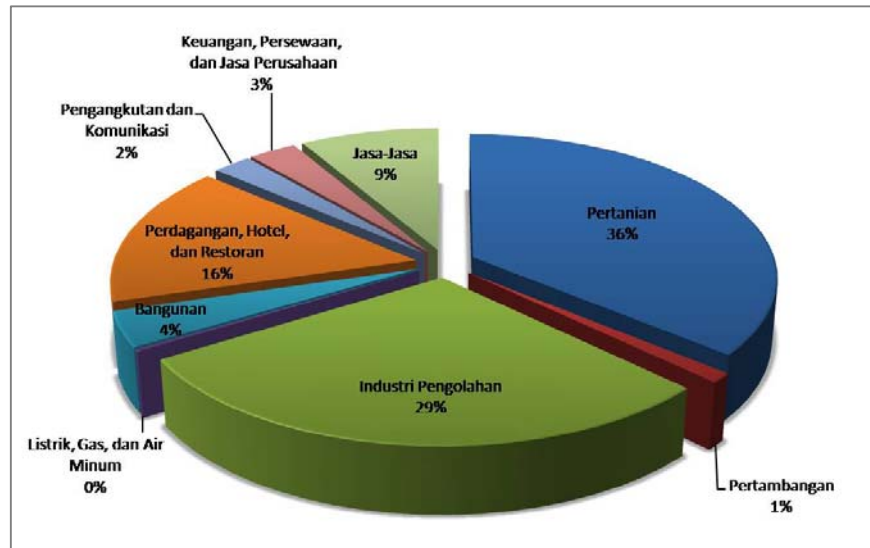
**GAMBAR 3.6**  
**DISTRIBUSI PERSENTASE KONTRIBUSI EKONOMI KECAMATAN**  
**ENTIKONG PERSEKTOR TAHUN 2007**

Kondisi 5 tahun terakhir ini menunjukkan struktur perekonomian Kabupaten Sanggau tidak banyak berubah dan sektor pertanian masih menjadi *leading sector* yang menyumbang sebesar 38,18% (tahun 2007). Sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan sawit, mempengaruhi industri pengolahan. Sebagian output industri makanan adalah CPO dan inti sawit. Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 28,75% yang diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang memberikan sumbangan sebesar 15,1%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.8 dan Gambar 3.5.

**TABEL III.11**  
**PDRB KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2003- 2007 BERDASARKAN HARGA**  
**KONSTAN TAHUN 2000**

NO	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007
1	Pertanian	680524.12	709935.16	739094.25	818181.06	849193.57
2	Pertambangan dan penggalan	28466.71	27543.80	25810.39	25255.63	25913.38
3	Industri pengolahan	516542.57	605071.36	623262.91	658689.68	685364.13
4	Industri listrik, gas, dan air bersih	4289.55	5045.82	5486.83	5756.98	6345.96
5	Bangunan	73093.73	75124.64	76082.36	85172.70	92983.03
6	Perdagangan, restoran, dan hotel	292595.98	313944.39	327709.86	349704.58	373739.99
7	Pengangkutan dan komunikasi	41851.60	41654.97	50710.37	52052.44	55435.31
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	56713.34	58265.59	59152.72	61106.09	68452.55
9	Jasa-jasa	156118.84	160862.14	156982.38	178213.13	199174.77
	Jumlah	1850196.44	1997447.87	2064292.07	2234132.30	2356602.68

Sumber: Kabupaten Sanggau dalam Angka, 2007



Sumber: Kabupaten Sanggau dalam Angka, 2007

**GAMBAR 3.7**  
**DISTRIBUSI PERSENTASE KONTRIBUSI EKONOMI KABUPATEN**  
**SANGGAU PERSEKTOR TAHUN 2007**

### **3.2.3.2 Aktivitas Perdagangan dan Komoditas**

Kawasan perbatasan Entikong dengan Sarawak memiliki keterkaitan secara langsung. Kondisi Sarawak yang relatif lebih maju menjadi daya tarik dan mempengaruhi orientasi sosial ekonomi kawasan Entikong khususnya dan Kalimantan Barat umumnya. Keterkaitan tersebut memberikan perubahan nyata terhadap perekonomian Kawasan Entikong. Dibukanya PPLB Entikong menjadikan arus barang dan jasa ke Sarawak semakin lancar. Aktivitas produksi dan distribusi berkembang dan menjadikan perdagangan sebagai kegiatan usaha yang diusahakan masyarakat di kawasan ini.

Kegiatan perdagangan di Pasar Tenda Entikong merupakan salah satu aktivitas di perbatasan. Pembangunannya ditujukan untuk memfasilitasi dan mengakomodir berkembangnya usaha perdagangan skala mikro. Sebagai perwujudan aktivitas perekonomian di lingkup kecamatan, pasar tersebut merepresentasikan kegiatan ekonomi yang memadukan produksi dan distribusi meskipun belum sepenuhnya

berorientasi pada pasar. Barang yang diperdagangkan di Pasar Tenda sangat beragam, meliputi beberapa komoditi hasil bumi, produk pertanian dan perkebunan, sembako dan bahan makanan dan minuman, serta pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya (lihat Tabel III.12).

**TABEL III.12**  
**KOMODITAS DAN JUMLAH PEDAGANG DI PASAR TENDA KECAMATAN**  
**ENTIKONG**

NO.	JENIS KOMODITAS	PEDAGANG (ORANG)	PERSENTASE (%)
1.	Sembako dan hasil bumi	48	8,30
2.	Makanan dan Minuman	275	47,58
3.	Aneka Produk Campuran	255	44,12
	Total	578	100

*Sumber: DinasPermukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, 2003*

Kegiatan lain yang diusahakan selain perdagangan tradisional yaitu perusahaan ekspor impor yang fokusnya adalah agribisnis, seperti produk pertanian, perkebunan dan kehutanan. Pada tahun 2003 tercatat ada 13 perusahaan yang bergerak di komoditas hasil bumi, dengan kontribusi sebesar 44,80%. Hal ini menandakan potensi sumber daya pertanian dan perkebunan memiliki prospek yang cukup baik.

### **3.2.3.3 Isu dan Permasalahan Perekonomian**

Permasalahan yang dihadapi masyarakat di kawasan perbatasan biasanya selalu terkait dengan pembangunan ekonomi negara tetangga dan ketertinggalan yang dihadapi. Permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Terjadinya kemajuan ekonomi Malaysia di satu pihak dan kemerosotan ekonomi Indonesia di lain pihak menuntut perlunya peningkatan kerjasama ekonomi di antara kedua negara dalam rangka kerjasama ekonomi BIMP-EAGA dan AFTA.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut penentu kebijakan di Kalimantan Barat yang memiliki kawasan perbatasan langsung dengan negara tetangga, untuk memikirkan kembali akan reinvestasi di sektor produktif sebagai akibat dari surplus penghasilan daerah, baik dari minyak dan gas, serta hasil hutan dan perkebunan guna pengembangan kawasan perbatasan.

3. Tingginya kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat dengan masyarakat perbatasan di Negara Bagian Sarawak. Kesenjangan tingkat kemajuan ekonomi akibat adanya selisih *kurs valuta, sistem hukum* yang berbeda, kelemahan *metode dan sistem pengawasan*, mendorong perdagangan ilegal yang dapat merugikan keuangan negara dan telah merusak system pemanfaatan sumber daya alam yang ada.
4. Adanya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kota dan desa di kawasan perbatasan.
5. Terjadinya impor konsumtif yang terus meningkat dan akan mengganggu penggunaan produksi buatan Indonesia.
6. Potensi sumber daya alam yang besar belum menghasilkan suatu produk unggulan yang bernilai tambah tinggi melalui proses industri. Sehingga perlu dilakukan pemantapan satu atau beberapa produk seperti industri pengolahan kayu yang dapat menjadi penentu pasar dunia.
7. Belum berkembangnya sektor pertanian yang mempunyai keunggulan komparatif dalam rangka menciptakan ketahanan pangan dan memanfaatkan peluang pasar yang ada di Malaysia.

### **3.2.4 Pintu Lintas Batas Kawasan Perbatasan Entikong (Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong)**

*Border Arrangement on Border Crossing* yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1967, merupakan pemufakatan dasar lintas batas antara Indonesia–Malaysia. Perjanjian itu diwujudkan dalam pembentukan Pos Lintas Batas (PLB). Pemufakatan dasar tentang payung hukum perjanjian lintas batas ini dinyatakan berlaku sejak 26 November 1968.

Dalam perkembangannya perubahan-perubahan terus terjadi. Tercatat pada tahun 1984 terjadi penambahan dari 10 menjadi 15 PLB dan terakhir pada tahun 2002 bertambah lagi menjadi 16 buah. Perubahan tersebut melalui berbagai sidang pembahasan yang baru ditandatangani pada Februari 2006 oleh Menteri Dalam Negeri.

Untuk mengatur lalu lintas barang (perdagangan tradisional) bagi masyarakat perbatasan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan kesepakatan yang tertuang dalam “Perjanjian tentang

Perdagangan Lintas Batas” yang ditandatangani 24 Agustus 1970, dasar dari perjanjian tersebut adalah:

1. Pelaksanaan pasal XI dari *basic agreement on border crossings* yang disetujui dan ditandatangani pada tahun 1967;
2. Menciptakan tata cara guna mengatur pelaksanaan perdagangan lintas batas sebagaimana tertera dalam *basic arrangement on trade and economic relation* yang ditandatangani tahun 1967.

Dalam perjanjian lintas batas tahun 1970 telah diatur mengenai:

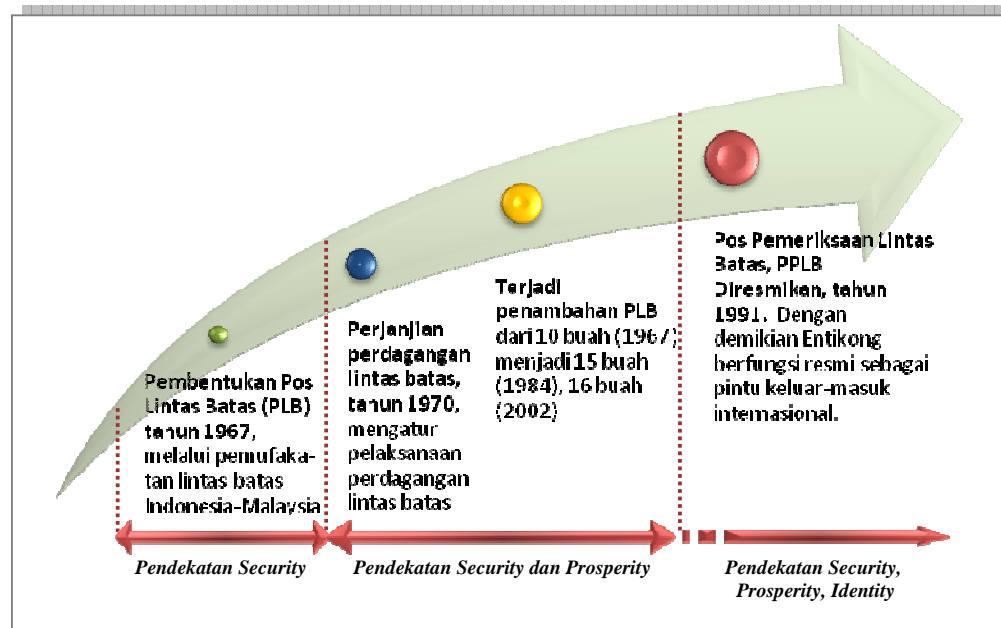
1. Penentuan daerah-daerah perbatasan untuk perdagangan di darat dan di laut sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian lintas batas;
2. Barang-barang yang dibenarkan untuk perdagangan;
3. Pelaku yang dibenarkan melakukan perdagangan di lintas batas, hanya masyarakat yang berdomisili di kawasan perbatasan di kedua negara;
4. Nilai barang yang dibawa, setiap orang hanya boleh membawa barang senilai 600 RM (Ringgit Malaysia) per orang per bulan.

Perkembangan PLB berlanjut dengan diresmikannya PPLB Entikong pada 25 Februari 1991, yang dilanjutkan dengan penyambungan jalan raya Entikong-Tebedu. Perbedaan antara PLB dan PPLB dapat dijelaskan bahwa PLB adalah pintu keluar-masuk antarnegara yang dilakukan secara tradisional dan dokumen yang digunakan hanyalah dokumen laksana paspor, sementara itu Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) merupakan pintu keluar-masuk antarnegara yang berlaku secara internasional (menggunakan paspor resmi), sehingga mancanegara dapat menggunakan jasa PPLB sebagai akses internasional. Pos Lintas Batas Entikong memiliki beberapa fungsi:

1. Sebagai pintu keluar-masuk, bagi pelintas batas tradisional, penduduk daerah perbatasan;
2. Sebagai pintu keluar-masuk (*legal exit* dan *entry point*) bagi pelintas batas non tradisional;
3. Sebagai pintu gerbang lalu lintas kendaraan antar negara (internasional).

Berbagai kegiatan perdagangan (ekspor-impor) yang terjadi di PPLB Entikong sangat dinamis dan mengalami peningkatan. Begitu pula arus keluar masuk orang dengan berbagai tujuan. Sampai dengan saat ini tercatat bahwa PPLB Entikong

merupakan formal *cross borders facility* yang ada di sepanjang perbatasan Kalimantan. Selengkapnya, *milestone* perkembangan pintu perlintasan Entikong ini dapat dilihat di Gambar 3.8 berikut.



Sumber: BP2KKP, 2006 dan hasil analisis, 2009

**GAMBAR 3.8**  
**MILESTONE PERKEMBANGAN STATUS PLB MENJADI PPLB ENTIKONG**

### 3.3 Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong

Kebijakan pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong yang ada saat ini dapat ditinjau dari kebijakan makro dan mikro.

#### 3.3.1 Kebijakan Makro

Fungsi kawasan dapat dirumuskan berdasarkan dua hal. Pertama, fungsi kawasan muncul sebagai sesuatu yang sudah ditentukan (*given*), dalam hal ini bisa merupakan penjabaran dari kebijaksanaan pada tingkatan yang lebih umum. Kedua,



fungsi kawasan timbul sebagai kristalisasi dari peranannya yang selama ini berkembang dan cenderung tidak akan mengalami perubahan yang berarti di masa mendatang.

Dalam kaitannya dengan fungsi Kawasan Perbatasan Entikong, kedua pendekatan tersebut dipergunakan secara bersama, sehingga hasil akhirnya merupakan pertemuan antara *bottom-up* dan *top-down*. Dengan latar belakang tersebut, maka fungsi utama Kawasan Entikong adalah sebagai berikut:

- Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan, fungsinya dalam hierarki perkotaan disiapkan menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang termasuk dalam penataan ruang nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008). Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai pusat permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi, yang berfungsi strategis dalam rangka kerjasama ekonomi sub regional BIMP-EAGA.
- Pusat Pelayanan Wilayah Belakang. Fungsi sebagai pusat pelayanan daerah belakang berarti penyediaan pelayanan bagi daerah belakangnya. Fungsi tersebut terutama dalam bidang ekonomi. Produsen dari daerah pedesaan yang berada di *hinterland* Entikong (petani, peternak, dan lain-lain) mengangkut hasil produksi ke Kota Entikong, sementara Kawasan Entikong menyediakan sarana dan jasa pemasaran sekaligus memasok sarana produksi dan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan penduduk pedesaan. Di samping itu Kawasan Entikong juga menyediakan banyak macam jasa-jasa sosial (pendidikan, kesehatan, rekreasi dan hiburan, ritual keagamaan dan lainnya). Terakhir, Kota Entikong merupakan pusat kegiatan pemerintah yang mencakup tidak saja wilayah kotanya sendiri, tetapi juga wilayah belakangnya.
- Pusat Perhubungan Antarwilayah. Entikong memainkan peranan yang sangat penting sebagai pusat perhubungan antarwilayah. Barang-barang yang dihasilkan di wilayah belakang dikumpulkan untuk dikirimkan ke wilayah lain atau diekspor. Tidak saja barang, perhubungan antarwilayah tersebut juga mencakup manusia.
- Pusat Industri Pengolahan. Sebagai pusat industri pengolahan, Entikong akan menjadi tempat untuk pabrik, pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi (*manufacturing*). Tetapi penampakan fisik itu saja belum cukup. Sebagai pusat industri pengolahan, di Kawasan Entikong ini, sektor industri harus menjadi sektor unggulan (*leading sector*), yang menjadi tulang punggung perekonomian, tidak saja bagi kawasan itu sendiri, tetapi juga wilayah di sekitarnya.

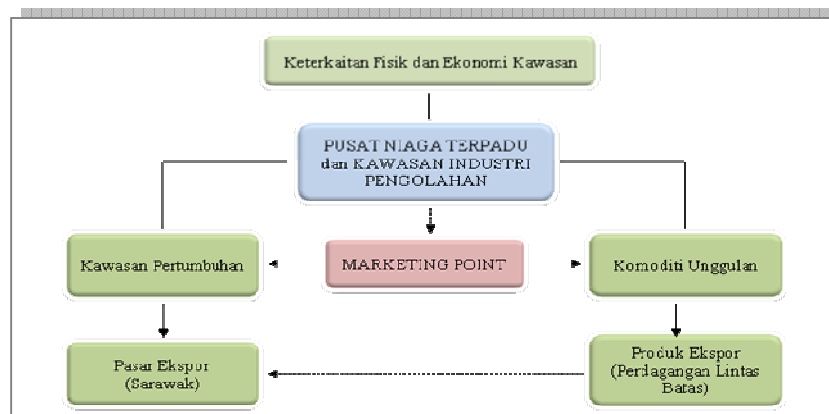
### 3.3.2 Kebijakan Mikro

Dalam konteks kebijakan mikro, terdapat Rencana Pengembangan Pusat Niaga Terpadu dan Industri Pengolahan Entikong yang ada dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Entikong (IKK Kecamatan Entikong). Kebijakan tersebut bertujuan antara lain:

1. Menciptakan ruang bagi pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan industri yang berskala nasional dan internasional sehingga dapat menjadi *counter magnet* bagi perkembangan wilayah Sarawak;
2. Mencapai pengembangan ruang yang lebih berimbang, berarti kesenjangan antara kawasan satu dengan kawasan lain pada tingkat minimal, serta hirarki pusat pelayanan berjalan dengan efektif;
3. Mencapai tingkat integrasi wilayah yang lebih baik, hal ini dicirikan dengan semakin membaiknya hubungan antar subkawasan, sehingga setiap lokasi dapat dijangkau secara mudah;
4. Menyediakan sarana perkotaan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia secara umum, khususnya penduduk Entikong;
5. Melindungi lingkungan hidup, ini berarti di dalam penataan ruang kawasan, perhatian tidak saja diberikan terhadap bentuk fisik terbangun saja, tetapi juga jalur hijau dan ruang terbuka, sehingga tercapai keseimbangan antara fisik binaan dan alam;
6. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja, karena dengan pola/model pengembangan kawasan berbasis sektor industri, memungkinkan munculnya sektor ekonomi ikutan, sehingga kesempatan kerja akan muncul tidak hanya pada sektor industri saja, melainkan juga pada sektor ikutannya.

Berdasarkan rancangan Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan-Sarawak-Sabah, Kawasan Entikong merupakan salah satu wilayah yang dijadikan prioritas penanganan dalam rangka percepatan dan keterpaduan pembangunan di kawasan perbatasan antara Indonesia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur) dengan Malaysia (Sarawak dan Sabah). Begitu juga dengan Rencana Detail Tata Ruangnya.

Pengembangan Kecamatan Entikong diarahkan sebagai Kawasan Pusat Niaga Terpadu dan Industri Pengolahan yang pada dasarnya merupakan bagian dari rencana fisik (*physical planning*) pengembangan kawasan. Untuk itu konsep *marketing point* dalam mewujudkan kawasan pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan. Selengkapnya konsep ini dapat dilihat pada Gambar 3.9.



Sumber: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, 2003

**GAMBAR 3.9**  
**DESAIN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN KAWASAN ENTIKONG**

Sesuai dengan penetapan fungsi kawasan, maka sektor-sektor yang mendapatkan prioritas pengembangan di Kawasan Entikong adalah sektor industri, perdagangan dan jasa, transportasi, perumahan dan permukiman, serta kependudukan dan tenaga kerja. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.13.

**TABEL III.13**  
**SEKTOR PRIORITAS DI KECAMATAN ENTIKONG**

NO.	SEKTOR	ARAHAN	KETERANGAN
1.	Industri	Memperkokoh struktur perekonomian wilayah yang semakin seimbang, serta menciptakan keterkaitan yang kuat antar sektor, antar kelompok industri, serta dengan sektor ekonomi lain yang memasok bahan baku industri.	Proses industrialisasi diarahkan untuk meningkatkan industri yang mengolah bahan jadi menjadi industri yang mengolah bahan jadi, terutama yang mengolah hasil pertanian untuk menjadi sektor unggulan ( <i>leading sector</i> ) Kegiatan industri yang berbasis pertanian terutama industri hasil hutan kayu dan dengan diversifikasi jenis industri kayu. Disamping itu juga dikembangkan industri lain khususnya yang

		berkaitan dengan pengembangan perkebunan di wilayah hulu misalnya CPO, karet, remah.
2.	Perdagangan	Menunjang fungsi kawasan Entikong sebagai pusat perdagangan kawasan perbatasan dan pusat distribusi barang konsumsi ke wilayah belakangnya.
3.	Transportasi	Memperkuat titik simpul semua sistem transportasi yang ada, khususnya untuk mendukung arus perhubungan regional yang semakin berkembang.
4.	Perumahan dan Permukiman	Pengembangan sektor perumahan secara umum harus mengacu pada kebijaksanaan pemerintah yang berlaku.
5.	Kependudukan dan Tenaga Kerja	Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dari pelaksanaan pembangunan kawasan.

Kegiatan perdagangan grosir dan perdagangan eceran yang memiliki orientasi pelayanan ke negara tetangga (Sarawak) dialokasikan di pintu gerbang yang sekarang menjadi zona perdagangan bebas (*free trade zone*) untuk memudahkan jangkauan pelayanan.

Penetapan jalur regional dan jalur lokal dengan lebih integratif perlu dilakukan untuk menghindari konflik antara arus perhubungan regional dengan arus perhubungan lokal. Pengembangan sarana angkutan antarwilayah untuk memperlancar arus barang dan penumpang serta untuk mendukung kegiatan industri.

Proporsi keseimbangan antara rumah sederhana, menengah dan mewah sebesar 6:3:1.

Pengendalian terhadap kuantitas, mobilitas, dan penyebaran penduduk terus ditingkatkan.

Sumber: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, 2003

### 3.4 Kondisi Wilayah Sarawak

Daerah Sarawak terletak antara 0°-52° LU dan 5° LU serta antara 109°-351° BT dan 150°-45° BT dengan luas wilayah 124.449 km<sup>2</sup>. Di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan, di sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, dan di sebelah timur berbatasan dengan Sabah (Malaysia Timur), Brunei Darussalam, dan Kalimantan Timur. Keadaan medan perbatasan umumnya dataran tinggi, semakin ke utara semakin rendah. Tanahnya cukup subur. Sepanjang perbatasan terdapat hutan tropis yang lebat. Penduduknya banyak yang bertanam coklat sebagai pertanian utama. Jaring lalu-lintas searah garis perbatasan sudah tergelar baik sebagai urat nadi perhubungan penduduk. Jaringan-jaringan jalan yang menembus daerah pedalaman cukup banyak. Selain itu, juga telah dibangun jaring-jalan daerah Kuching sampai ke Pontianak melewati perbatasan di Tebedu (Malaysia) dan Entikong (Indonesia).

Jumlah penduduk Sarawak ±500.000 jiwa dengan 25% Melayu, 44,1% Dayak, 30,3% Cina, 0,3% India, 0,80% Eropa, dan 0,2% suku lain. Penyebaran penduduk tidak merata, umumnya mereka tinggal di perkotaan. Hal menonjol adalah orang-orang keturunan Cina memegang dominasi hampir di semua bidang terutama di bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Sarawak cukup tinggi dengan adanya peningkatan komoditi ekspor. Titik berat pembangunan terletak pada bidang pertanian, dan perdagangan dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara optimal. Harga barang kebutuhan sehari-hari antara kota dan desa relatif sama dan stabil.

Fasilitas yang terdapat di Sarawak antara lain fasilitas pendidikan yaitu sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi cukup banyak tersedia, yang berprestasi berkesempatan mendapat beasiswa gratis atau mendapatkan pinjaman lunak dari pemerintah. Pendidikan kejuruan cukup digalakkan untuk mengejar kemajuannya dari daerah semenanjung lain yang lebih maju dan baik.

Secara resmi agama Islam ditetapkan sebagai agama negara, tetapi agama dan kepercayaan lain tetap tumbuh berdampingan. Kerawanan biasa muncul akibat pertentangan antar agama atau golongan ekstrim Islam yang berhaluan Kerawanan yang cukup tinggi juga terjadi akibat ketimpangan pendapatan pribumi dengan etnis Cina, serta perimbangan kekuatan mayoritas antara Cina dan Melayu.

### **3.5 Komparasi antara Kawasan Perbatasan Entikong dengan Distrik Tebedu Sarawak**

Komparasi ini bermaksud untuk memberikan gambaran atas kondisi di Entikong dan Sarawak. Komparasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek wilayah, terkait dengan dimensi ekonomi. Secara umum terlihat adanya perbedaan yang cukup jauh dari sisi penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi di perbatasan. Sarawak terlihat sudah menyiapkan berbagai infrastruktur yang mendukung pengembangan sebuah kawasan perbatasan.

**TABEL III.14**  
**KOMPARASI KONDISI TERKAIT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI**  
**ENTIKONG DAN TEDEDU (SARAWAK-MALAYSIA)**

NO.	DIMENSI PERTUMBUHAN EKONOMI	PERBANDINGAN KONDISI	
		ENTIKONG	TEBEDU

1. Infrastruktur jalan menuju *cross border area*



Kondisi infrastruktur jalan menuju akses cek point PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas) dengan kondisi yang rusak/berlubang dengan pertumbuhan guna lahan permukiman dan komersial di kedua sisinya.



Kondisi infastruktur jalan yang sangat baik, lengkap dengan berbagai rambu lalu lintas. Wilayah *green belt* yang benar-benar tertata dengan baik dan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan kontur perbukitan.

#### lanjutan

2. Aktivitas Permukiman



Lokasi permukiman yang berda di tepi jalan utama/ arteri, sehingga kesan ketidakteraturan kawasan yang tumbuh dan berkembang akibat berbagai aktivitas ekonomi masyarakat setempat.



Lokasi kampung tidak terletak di tepi jalan arteri utama, melainkan masuk sejauh  $\pm 500$  m dari jalan utama, kondisi relatif sepi dengan kondisi yang tertata dengan baik, bangunan dengan kondisi baik dengan sempadan jalan dan bangunan yang representatif.

3. Fasilitas di kawasan perbatasan




Fasilitas yang masih dalam



Fasilitas yang cukup kompak di

NO.	DIMENSI PERTUMBUHAN EKONOMI	PERBANDINGAN KONDISI	
		ENTIKONG	TEBEDU
		<p>tahap pembangunan yang terletak di tepi jalan utama dan tidak terlihat kompak seperti di Tebedu</p> <p>Entikong belum memiliki fasilitas <i>inland port</i> yang berfungsi sebagai tempat pemeriksaan khusus barang yang keluar-masuk di perbatasan.</p>	<p>sebuah kawasan khusus di Tebedu, terlihat tempat berkumpul masyarakat dengan fasilitas yang sangat baik</p>  <p>Fasilitas pelabuhan darat (<i>inland port</i>) yang masih dalam tahap pembangunan, sangat terlihat bahwa Malaysia-Sarawak menyiapkan segala infrastruktur yang mendukung perekonomian.</p>
		 <p>Fasilitas pasar yang terletak di tepi jalan utama, cukup baik.</p>	 <p>Pasar yang dipersiapkan dalam kompleks khusus.</p>
		 <p>Pasar tradisional yang terletak di dalam area kampung, terlihat sangat kumuh dan tidak teratur.</p>	 <p>Pasar yang terintegrasi dengan pusat kegiatan lainnya (rusun, pos polisi, balai warga)</p>
4.	Keberadaan industri	<p>Belum terlihat adanya aktivitas industri di sekitar kawasan perbatasan Entikong, dalam dokumen RDTR Entikong memang terdapat rencana bagi</p>	

NO.	DIMENSI PERTUMBUHAN EKONOMI	PERBANDINGAN KONDISI	
		ENTIKONG	TEBEDU
		pembangunan industri pengolahan untuk meningkatkan <i>value added</i> bagi produk yang diperjualbelikan.	<p>Pada jarak sekitar 1 km dari PPLB terdapat industri yang cukup besar dan terkenal dimana produknya dapat dinikmati di seluruh dunia.</p>  <p>Keberadaan industri-industri di jalan akses menuju perbatasan menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi yang berorientasi ekspor (seperti produk Milo dan 7-up).</p>

*Sumber: Observasi Lapangan, 2009*

Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap berbagai dimensi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Entikong-Tebedu, terlihat kondisi yang sangat berbeda. Perhatian pihak Malaysia terhadap pengembangan perbatasan sangat serius dilakukan, terlihat dari penataan ruang yang sangat baik dan akomodatif terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan kesempatan yang muncul dari pengembangan perbatasan. Kontras dengan kondisi di Entikong yang terlihat masih membenahi pembangunan di berbagai hal (pengembangan Balai Latihan Kerja, Pasar Tradisional yang bertaraf internasional, kondisi jalan dan infrastruktur lainnya), pembangunan di Kawasan Perbatasan Entikong sangat jauh tertinggal dibanding Tebedu.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PERBATASAN ENTIKONG**

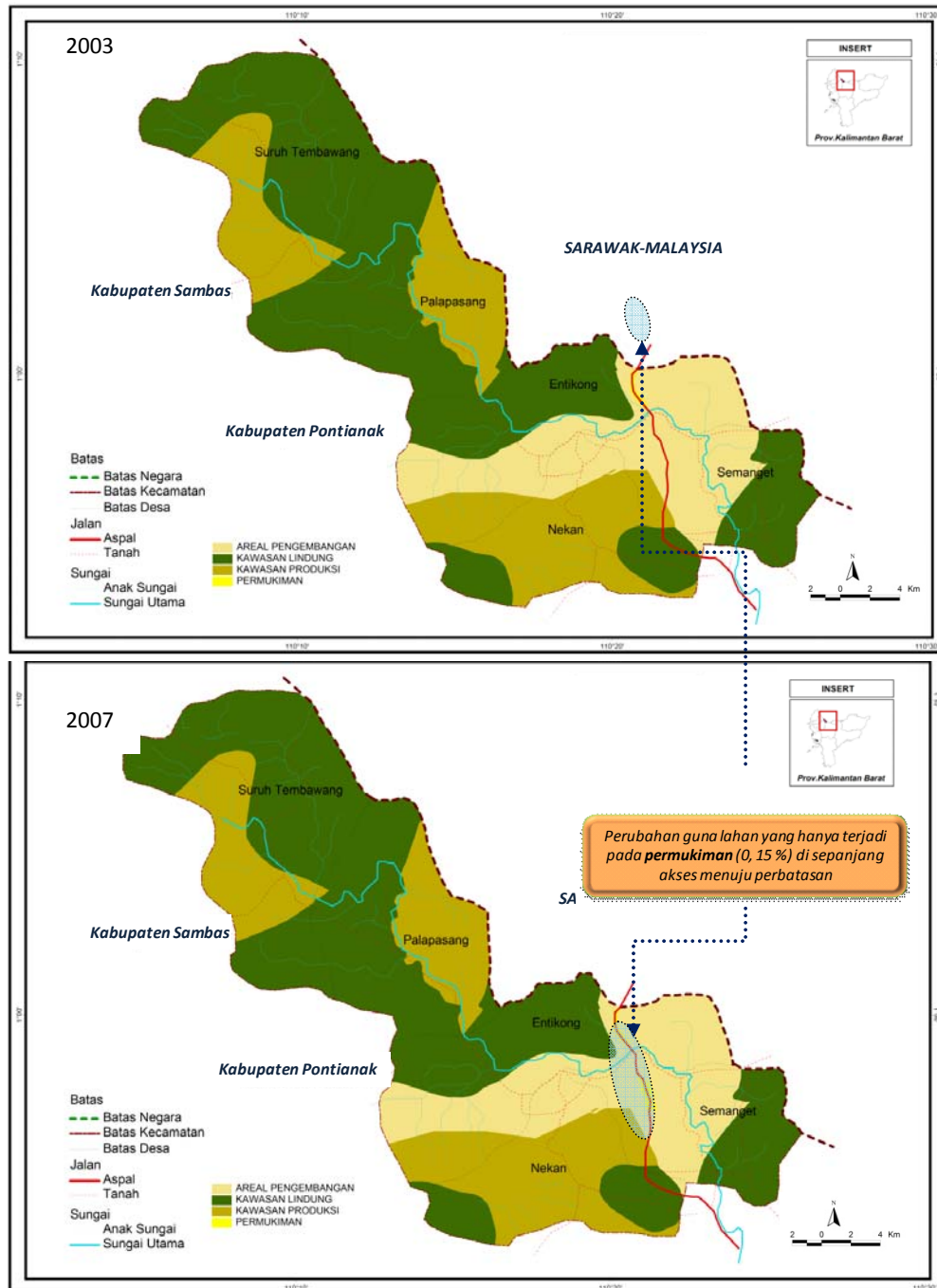
Bagian ini membahas aspek pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan untuk perumusan strategi pengembangan. Bagian awal membahas aspek spasial dan ekonomi, selanjutnya dibahas tentang implikasi elemen pengembangan yang akan digunakan dalam formulasi strategi pengembangan wilayah perbatasan ditinjau dari aspek pertumbuhan dan pengembangan.

#### **4.1 Analisis Spasial Wilayah Perbatasan Entikong**

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan, dinamika pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat menyebabkan adanya efek integrasi ekonomi yang diikuti oleh perubahan spasial di wilayah perbatasan (Niebuhr dan Stiller, 2001). Kondisi spasial merupakan faktor penting dalam melihat perkembangan sebuah wilayah perbatasan yang tercermin dari penggunaan lahan, struktur ruang dan aktivitas penduduk dalam ruang tersebut (Branch, 1995). Perubahan yang terjadi pada beberapa aspek ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Entikong.

##### **4.1.1 Penggunaan Lahan**

Data penggunaan lahan tahun 2003-2007 menunjukkan perubahan hanya terjadi pada daerah di sepanjang jalur utama kawasan dan hanya pada daerah di Ibukota Kecamatan Entikong saja (Desa Entikong). Perubahan terjadi pada perkembangan permukiman di jalur utama ke arah perbatasan sebesar 0,15%, sedangkan jenis pemanfaatan yang lain belum begitu berkembang. Hal ini karena beberapa fungsi kawasan sudah ditentukan sebagai hutan lindung dan hutan produksi, selain itu keterbatasan juga pada masalah topografi yang tidak datar khususnya di Desa Palapasang dan Suruh Tembawang. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat di Gambar 4.1 dan Tabel IV.1.



**GAMBAR 4.1**  
**PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN ENTIKONG 2003-2007**  
**TABEL IV.1**  
**PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN ENTIKONG TAHUN 2003-2007**

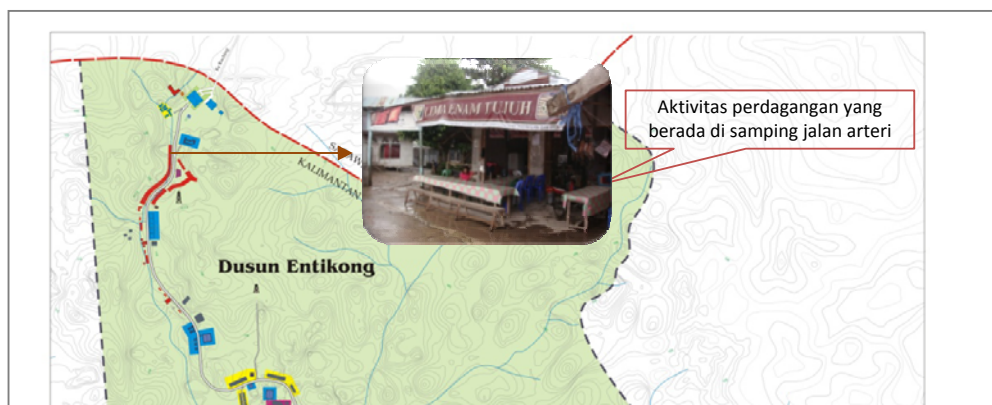
NO.	PENGGUNAAN	2003	2007	PERSENTASE
-----	------------	------	------	------------

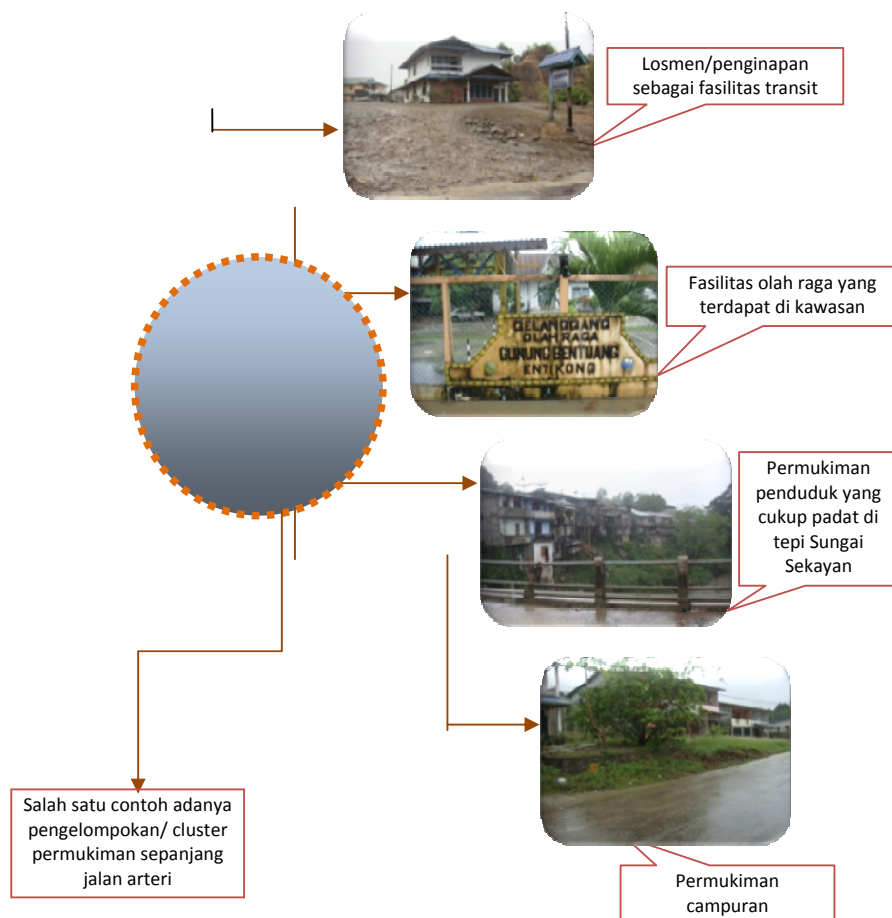
	LAHAN	Luasan (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Luasan (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	PERUBAHAN
1	Permukiman	0,55	0.10	1.33	0.26	0.15
2	Area pengembangan	85.29	16.84	84.51	16.69	-0.15
3	Kawasan Lindung	308.16	60.86	308.16	60.86	0
4	Kawasan Produksi	112.33	22.18	112.33	22.18	0
	<b>TOTAL</b>	<b>506.33</b>	<b>100</b>	<b>506.33</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Sumber: Citra Landsat ETM-7 2003-2007

Kecamatan Entikong terus mengalami perkembangan. Letaknya yang strategis karena merupakan wilayah perbatasan (terdapat Pintu Pos Pemeriksaan Lintas Batas), berdampak pada pergerakan yang semakin intensif dan terus mengalami peningkatan, begitu juga dengan kebutuhan ruang untuk mewadahi berbagai aktivitas penduduk juga semakin meningkat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan munculnya kawasan terbangun di sepanjang jalan arteri primer, bahkan di sebelah selatan Sungai Sekayam tampak kawasan terbangun yang cukup padat (mencapai 500 meter di sebelah kanan dan kiri jalan). Topografi Kecamatan Entikong yang cenderung bergelombang menyebabkan kawasan terbangun tersebut membentuk kelompok-kelompok atau *cluster* kecil di sepanjang jalan arteri (Gambar 4.2).

Kawasan terbangun di Kecamatan Entikong sampai saat ini di dominasi oleh permukiman penduduk yang letaknya sudah tidak lagi berdekatan dengan sungai melainkan mengikuti arah jalan utama. Adanya Kegiatan transmigrasi merupakan salah satu aktivitas penduduk yang mendorong kawasan permukiman kawasan ini berkembang dengan pesat, hal ini terjadi karena Kecamatan Entikong merupakan kawasan perbatasan yang memiliki ketersediaan lahan yang masih luas.





#### KETERANGAN :

	Jaringan Jalan
	Sungai / anak sungai
	Batas Negara
	Batas Dusun
	Batas Perencanaan
	Lokasi Kantor Camat
	Jembatan
	Garis Kontur

	Pemerintahan
	Perdagangan
	Permukiman
	Pendidikan
	Militer
	Olah Raga
	Kesehatan

	Terminal
	Kantor Perbatasan
	Industri
	Daerah Perencanaan

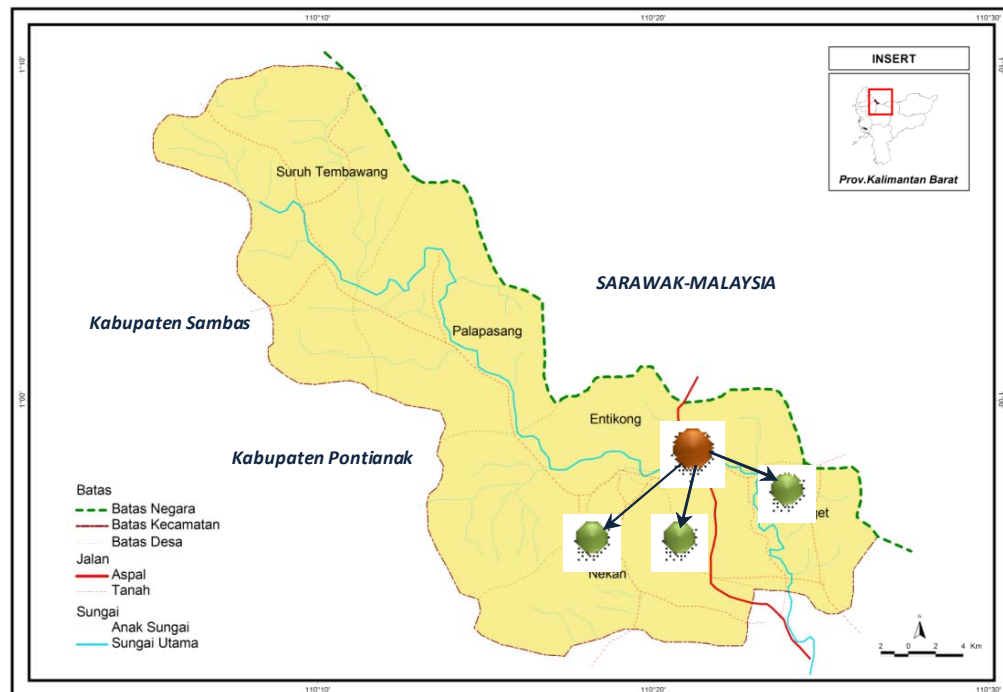
Sumber: Bappeda Kabupaten Sanggau, 2009; Observasi Lapangan, 2009

### GAMBAR 4.2 PENGUNAAN LAHAN DI SEPANJANG KORIDOR ARTERI MENUJU PINTU LINTAS BATAS ENTIKONG-SARAWAK

#### 4.1.2 Struktur Ruang

Perkembangan struktur ruang Kecamatan Entikong ditunjukkan dengan perkembangan aktivitas dan guna lahan di kecamatan tersebut. Perubahan guna lahan yang tampak adalah pada ibukota kecamatan Entikong yaitu di Desa Entikong dan selanjutnya dapat dikembangkan ke desa terdekat yaitu Nekan dan Semanget. Untuk

pengembangan struktur ruang ke daerah lain belum dapat dilakukan karena ada faktor pembatas yaitu topografi alam dan beberapa penetapan fungsi kawasan untuk hutan lindung sehingga perkembangan aktivitas masyarakat saat ini hanya terpusat di Desa Entikong saja. Berikut pola perkembangan struktur ruang Kecamatan Entikong dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut:



Dari gambar tersebut dapat kita lihat warna merah merupakan pusat kegiatan masyarakat Entikong, sedangkan warna biru adalah daerah yang memungkinkan untuk perkembangan aktivitas dan pemanfaatan ruang di wilayah Entikong. Struktur ruang ini juga mencerminkan pemanfaatan lahan yang ada saat ini dimana permukiman hanya memusat pada ibukota Kecamatan Entikong saja dan berkembang di sepanjang jalur utama (*ribbon development*).

Melalui analisis ini dapat ditarik arah perkembangan Entikong ke tiga arah yaitu ke dua desa terdekat dan sejalan dengan jalur akses utama. Untuk perkembangannya sebaiknya perlu adanya perbaikan infrastruktur jaringan jalan untuk memperbaiki akses ke dua arah pengembangan (Nekan dan Semanget) seperti perbaikan jalan dari jalan tanah ke aspal dan merencanakan untuk permukiman dan perdagangan untuk daerah di sepanjang jalur-jalur strategis yang menjadi akses ke arah Sarawak-Malaysia.

Dengan diketahuinya arah perkembangan Kota Entikong tersebut maka dapat diprediksikan bahwa akan terjadi perubahan guna lahan yang harus direncanakan untuk daerah yang akan berkembang seperti di sepanjang jalan-jalan utama arteri maupun di dekatar Sungai Sekayam terutama dalam penyediaan permukiman dan perdagangan jasa serta infrastrukturnya. Hal lain yang perlu dilakukan untuk memicu proses pembangunan di Kecamatan Entikong yaitu usaha akan perlunya menciptakan koordinasi, menjalin dan memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah terkait dengan pemerintah negara tetangga dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat maupun pemanfaatan lahan bersama yang terikat secara fungsional di wilayah perbatasan.

Sektor-sektor yang berpotensi untuk terus berkembang dan mempengaruhi struktur ruang kota yaitu luasan kawasan permukiman yang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah dan aktivitas penduduk serta perkembangan jaringan jalan dan transportasi dimasa mendatang. Arah perkembangan Kota Entikong diperkirakan masih menempati jalan arteri utama di daerah Desa Entikong yang berbatasan langsung dengan daerah Sarawak Malaysia, kemudian meluas ke jalan-jalan kolektor sehingga membentuk *cluster-cluster* permukiman yang lebih kecil. Untuk menghindari pemusatan aktivitas maka perlu adanya intervensi pemerintah dalam mengendalikan pembangunan di kawasan perbatasan agar perkembangan struktur ruang kotanya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perencanaan-perencanaan sebelumnya, ibukota kecamatan Entikong telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan industri yang berbasis pada pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Wilayah rencana perkembangan industri masih berada di sekitar Desa Entikong yang khusus dipersiapkan menjadi Kawasan Berikat (*Bonded Zone*), dengan dilengkapi dengan tempat penimbunan barang. Fasilitas perdagangan dan jasa juga direncanakan di lokasi pintu gerbang utama atau disebut dengan Area Perdagangan Bebas (sekitar kawasan perbatasan Entikong-Sarawak). Kawasan perdagangan ini diperkirakan terus bertambah seiring perkembangan jaringan jalan dan transportasi yang terintegrasi dengan kawasan permukiman.

#### **4.1.3 Kependudukan**

Kondisi penduduk erat kaitannya dengan perkembangan sebuah wilayah. Pertumbuhan jumlah penduduk mengindikasikan adanya pergerakan dan aktivitas perekonomian yang berujung pada perkembangan fisik kota (Soekanto, 2003). Aspek kependudukan dalam kajian ini akan menjelaskan aktivitas yang terjadi dan kecenderungan pemusatan penduduk berkaitan dengan fungsi Kawasan Entikong sebagai sebuah kawasan perbatasan.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Entikong termasuk dalam kategori penduduk usia produktif (Kecamatan Entikong dalam Angka, 2007). Banyaknya penduduk usia produktif di daerah ini (usia 11-55 tahun) menjadi potensi tersendiri bagi Kecamatan Entikong karena banyak tersedia tenaga kerja produktif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan bagi tumbuh kembangnya aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.

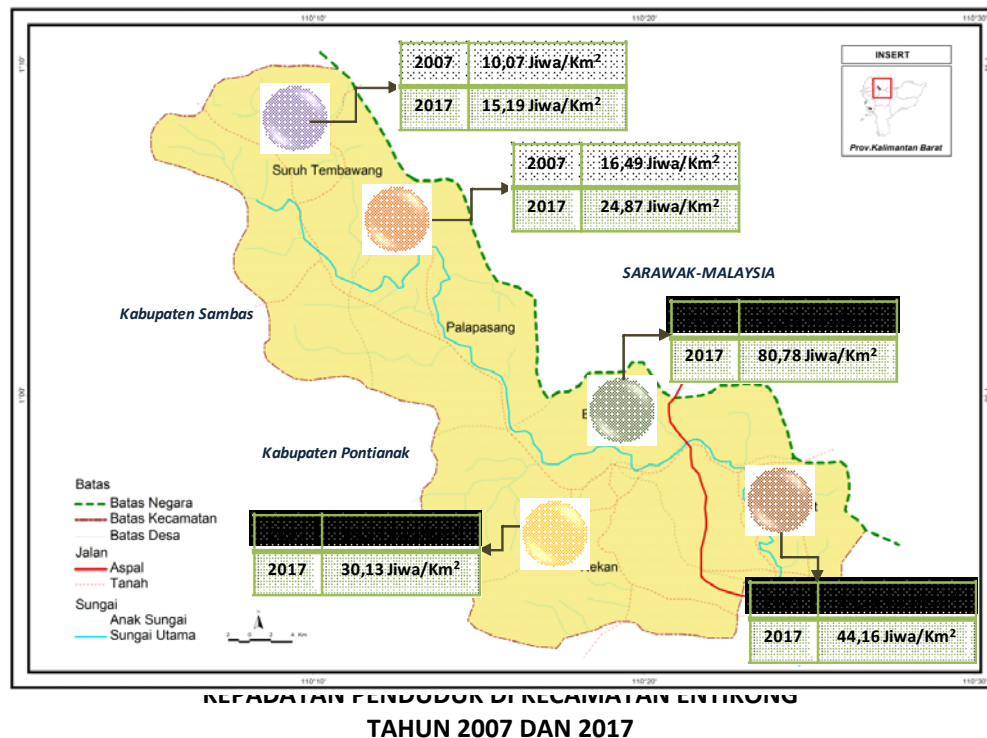
Terkait dengan perkembangan kawasan perbatasan Entikong. Diperlukan adanya proyeksi atas pertumbuhan penduduk untuk mengetahui konsentrasi wilayah tertentu yang akan berkembang. Proyeksi tersebut diperlukan bagi analisis spasial karena terkait dengan aktivitas penduduk dalam sebuah ruang.

**TABEL IV. 2**  
**HASIL ANALISIS PROYEKSI PENDUDUK TAHUN 2001-2007, KEPADATAN PENDUDUK**  
**DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK**

DESA/ KELURAHAN	PENDUDUK (JIWA)				JUMLAH PENDUDUK		LUAS (KM <sup>2</sup> )	KEPADATAN PENDUDUK (NETTO)		KEPADATAN PENDUDUK (NETTO)	
	2001	2003	2005	2007	2017	2027		2001	2007	2017	2027
Nekan	2226	2059	2152	2008	3029	4563	100.53	22.14	19.97	30.13	45.39
Semanget	2206	1936	2038	1831	2762	4161	62.54	35.27	29.28	44.16	66.54
Entikong	4096	4930	5718	5944	8.965	13.508	110.98	36.91	53.56	80.78	121.72
Suruh	2490	2606	2234	846	1276	1923	84.02	29.64	10.07	15.19	22.88
Tembawang											
Pala Pasang	1168	918	996	2454	3701	5577	148.82	7.85	16.49	24.87	37.47
JUMLAH	12186	12449	13138	13083	19732	29732	506.89	24.04	25.81	195.12	294.00
Laju Pertumbuhan		1.07%	2.69%	-0.21%							
Laju Pertumbuhan Rata-rata		1.18 %									

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

Berdasarkan analisis proyeksi tersebut, tingkat kepadatan dan sebaran penduduk tertinggi terjadi di Desa Entikong sebesar 80,78 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan Desa Suruh Tembawang memiliki tingkat kepadatan terendah sebesar 15,19 jiwa/km<sup>2</sup>. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepadatan di Kecamatan Entikong hanya terpusat di Desa Entikong saja dan termasuk dalam tingkat kepadatan yang tidak terlalu tinggi karena memang wilayahnya cukup luas. Faktor kelengkapan dan kualitas fasilitas ini menjadi salah satu unsur penarik bagi penduduk dari desa atau daerah lain yang berasal dari luar kota untuk melakukan aktivitas di bidang sosial, ekonomi dan budaya di Desa Entikong.



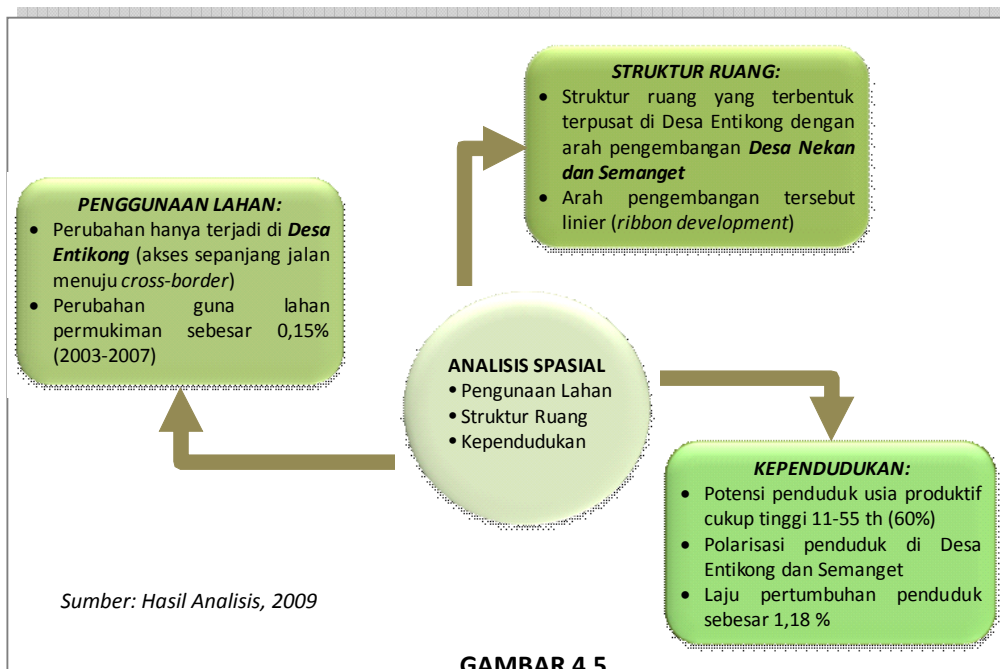
Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Entikong rata-rata pertahun sebesar 1,18%. Berdasarkan proyeksi kepadatan penduduk (Gambar 4.4), pemusatan penduduk hanya akan berkembang di satu tempat yaitu Desa Entikong. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak seimbang antara satu daerah yang satu dengan lainnya karena beban yang diterima masing-masing daerah tidak sama.

Adanya pemusatan penduduk yang sebagian besar hanya terpusat di Desa Entikong mengindikasikan bahwa hampir semua fasilitas pemenuhan kebutuhan tersedia di daerah ini. Selain itu pola permukiman penduduk yang mengikuti jalan utama yang melintas di daerah ini juga merupakan faktor yang mendorong penduduk untuk menetap di Desa Entikong. Kondisi tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang mendorong penduduk untuk bermukim, seiring dengan akses menuju perbatasan yang semakin baik.

Sebagai kawasan perbatasan yang strategis, Kecamatan Entikong merupakan daerah yang berpotensi dalam memicu perkembangan aktivitas penduduk khususnya dalam rangka proses pembangunan wilayah. Namun sejauh perkembangan yang ada, Kecamatan Entikong belum mengalami perkembangan yang nyata khususnya dalam



peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk secara signifikan. Berdasarkan analisis guna lahan, struktur ruang kota, proyeksi penduduk yang telah dilakukan sebelumnya, selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2001 hingga 2007 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas penduduk. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan perkembangan pembangunan jaringan jalan mulai tampak seiring dengan kebutuhan akan pencapaian pusat kota dari daerah perbatasan maupun daerah lainnya yang terus berkembang sebagai kawasan budidaya yang pada umumnya dikembangkan sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa.



**GAMBAR 4.5**  
**RINGKASAN HASIL ANALISIS KONDISI SPASIAL**  
**PERBATASAN ENTIKONG**

## 4.2 Analisis Ekonomi Wilayah Entikong

Perkembangan ekonomi suatu wilayah ditandai dengan adanya besaran pendapatan daerah. Untuk mengidentifikasi peranan perekonomian suatu daerah terhadap wilayah yang lebih luas, digunakan parameter besaran kontribusi pendapatan daerah tersebut dalam konstelasi yang lebih luas. Pendapatan daerah yang dimaksud ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merepresentasikan besarnya nilai tambah produksi total suatu daerah yang dinyatakan dalam satuan uang (rupiah). Dengan menghitung kontribusi PDRB Kecamatan Entikong terhadap Kabupaten Sanggau, maka dapat diketahui peranan

perekonomian kecamatan ini dalam mendukung perekonomian Kabupaten Sanggau.

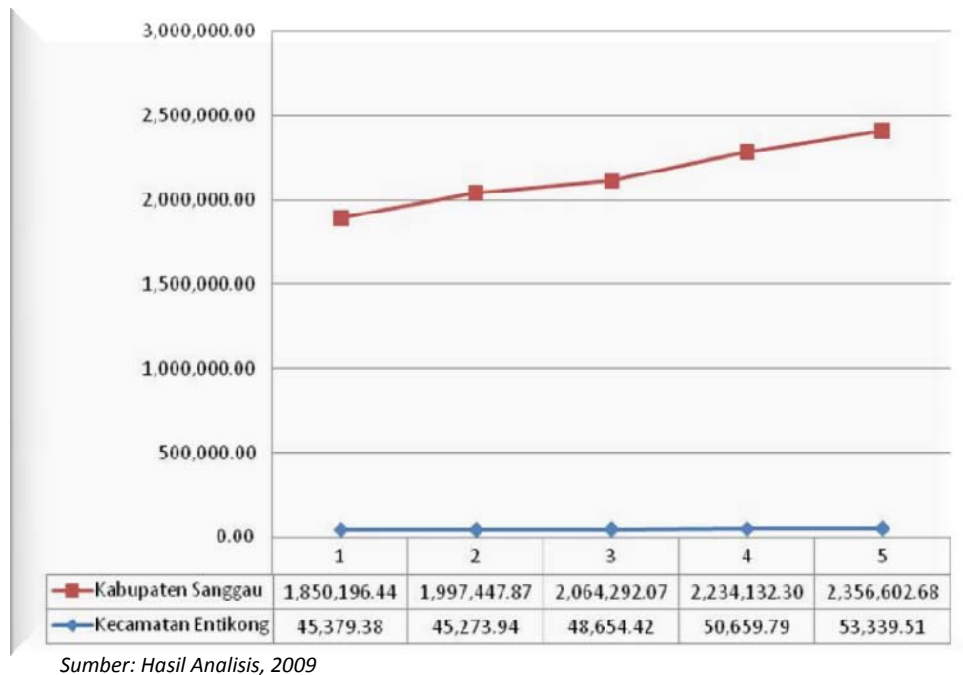
Dengan melihat angka kontribusi PDRB berdasarkan harga konstan 2000, dalam rentang waktu 5 tahun yaitu berawal dari tahun 2003–2007 peranan perekonomian Kecamatan Entikong terhadap perekonomian Kabupaten Sanggau secara umum menunjukkan kecenderungan yang menurun walaupun tidak signifikan dari tahun ke tahun, kenaikan persentase kontribusi Kecamatan Entikong hanya terjadi 2 kali yaitu di tahun 2003 dan tahun 2005. Hal tersebut dapat dilihat secara rinci dari Tabel IV.3 di bawah ini:

**TABEL IV.3**  
**KONTRIBUSI PDRB KECAMATAN ENTIKONG TERHADAP PDRB**  
**KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2003–2007 ATAS DASAR HARGA**  
**KONSTAN 2000**

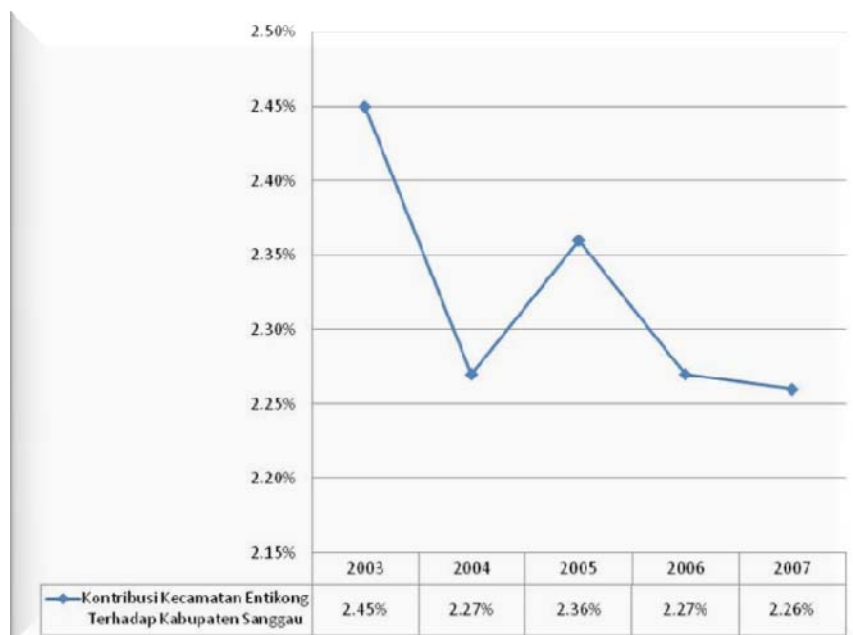
URAIAN	NILAI PDRB					RATA-RATA
	2003	2004	2005	2006	2007	
Kecamatan Entikong	45,379.38	45,273.94	48,654.42	50,659.79	53,339.51	
Kabupaten Sanggau	1,850,196.44	1,997,447.87	2,064,292.07	2,234,132.30	2,356,602.68	
Kontribusi	2.45%	2.27%	2.36%	2.27%	2.26%	2.32%

*Sumber: Kecamatan Entikong dalam angka; Kabupaten Sanggau dalam angka; Hasil analisis, 2009*

Berdasarkan hasil analisis diatas, Kecamatan Entikong menyumbangkan kontribusi PDRB rata-rata pertahun sebesar 2,32% dalam mengembangkan kondisi perekonomian di Kabupaten Sanggau. Kontribusi tersebut di dominasi oleh sektor pertanian dan sektor perangkutan dan komunikasi. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Kecamatan Entikong dalam mendukung aktivitas perekonomian di Kabupaten Sanggau masih tergolong rendah. Perlu adanya pemberdayaan serta pengelolaan lebih lanjut terhadap potensi-potensi sumber daya lokal secara optimal serta penguatan pengembangan ekonomi lokal untuk memacu dan meningkatkan daya perekonomian kecamatan yang tentunya akan berdampak juga terhadap kondisi perekonomian kabupaten. Potensi dalam pengembangan kondisi perekonomian Kecamatan entikong juga didukung oleh lokasi Kecamatan Entikong yang letaknya cukup strategis dalam konstelasi wilayah perbatasan khususnya dengan Malaysia, dengan potensi perekonomian yang tinggi.



**GAMBAR 4.6**  
**PDRB KABUPATEN SANGGAU DAN KECAMATAN ENTIKONG TAHUN 2003-2007**



*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

**GAMBAR 4.7**  
**GRAFIK KONTRIBUSI PDRB KECAMATAN ENTIKONG TERHADAP PDRB KABUPATEN**  
**SANGGAU TAHUN 2003-2007**

#### **4.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

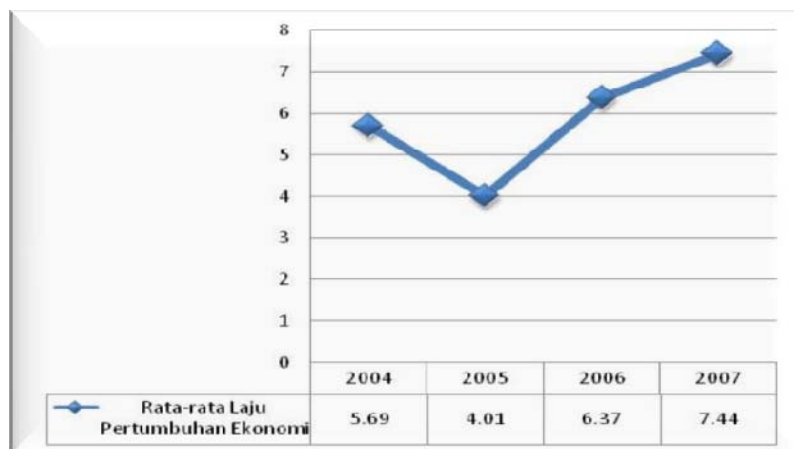
Analisis laju pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Entikong menunjukkan adanya pertumbuhan sektoral tertinggi pada sektor listrik, gas dan air minum (10,38%), perangkutan dan komunikasi (7,60%), dan industri pengolahan (7,47%). Sedangkan pertumbuhan minus terdapat pada sektor pertambangan (-2,27%). Laju pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Entikong terlihat cukup fluktuatif dengan besaran kontribusi yang sempat menurun (tahun 2005). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.4 berikut.

**TABEL IV.4**  
**LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) SEKTORAL**  
**TAHUN 2003-2007**

NO.	LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	RATA-RATA SEKTORAL
1	Pertanian	4,32	4,11	10,70	3,79	5,73
2	Pertambangan	-3,24	-6,29	-2,15	2,60	-2,27
3	Industri pengolahan	17,14	3,01	5,68	4,05	7,47
4	Listrik, gas dan air minum	17,63	8,74	4,92	10,23	10,38
5	Bangunan	2,78	1,27	11,95	9,17	6,29
6	Perdagangan, hotel dan restoran	7,30	4,38	6,71	6,87	6,32
7	Pengangkutan dan komunikasi	-0,47	21,74	2,65	6,50	7,60
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	2,74	1,52	3,30	12,02	4,90
9	Jasa-jasa	3,04	-2,41	13,52	11,76	6,48
	Rata-Rata LPE	5,69	4,01	6,37	7,44	5,88

*Sumber: PDRB Kecamatan Entikong; Hasil Analisis 2009*

Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kecamatan Entikong relatif mengalami peningkatan, kecuali tahun 2005 yang mengalami penurunan 1,68%. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi secara rata-rata sektoral mencapai 5,88%. Fluktuasi laju pertumbuhan dapat dilihat pada Gambar 4.8.



Sumber: Hasil Analisis, 2009

**GAMBAR 4.8**  
**LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KECAMATAN ENTIKONG**  
**TAHUN 2003-2007**

#### **4.2.2 Sektor Basis Kecamatan Entikong**

Sektor lapangan usaha merupakan media aktivitas penyelenggaraan proses pembangunan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah guna mencapai tujuan mensejahterakan kehidupan penduduknya. Oleh karenanya pertumbuhan sektoral itu menjadi penting, karena dari sektor-sektor itulah seluruh potensi yang dimiliki daerah dapat diberdayakan untuk memberikan kontribusi terhadap kebutuhan penyelenggaraan pembangunan.

Dalam upaya pengembangan sektor ekonomi guna meningkatkan perekonomian daerah, diperlukan juga informasi dan pemahaman terhadap sektor yang menjadi sektor unggulan. Sektor unggulan perlu diidentifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sektor. Untuk mengidentifikasi suatu sektor tergolong unggulan atau bukan, analisisnya tidak hanya didasarkan pada besar kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian, melainkan memerlukan beberapa pendekatan/analisis lain yang bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Suatu sektor unggulan tidak hanya memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian, tetapi memiliki tingkat kompetitif yang tinggi dibandingkan sektor lain serta memiliki kinerja yang baik.

Ekonomi basis merupakan analisis untuk mengetahui sektor-sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Untuk mengetahui sektor yang berpengaruh kuat terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah digunakanlah metode LQ (*Location Quotient*) yang dapat dilihat pada Tabel IV.5.

**TABEL IV.5**  
**NILAI LQ SETIAP SEKTOR USAHA DI KECAMATAN ENTIKONG**  
**TAHUN 2003-2007 (DALAM JUTAAN RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2003			2007		
	KEC. ENTIKONG	KAB. SANGGAU	LQ	KEC. ENTIKONG	KAB. SANGGAU	LQ
Pertanian	14,547.64	680,524.12	0.87	17,561.12	849,193.57	0.91
Pertambangan	6,960.05	28,466.71	9.97	5,607.11	25,913.38	9.56

LAPANGAN USAHA	2003			2007		
	KEC. ENTIKONG	KAB. SANGGAU	LQ	KEC. ENTIKONG	KAB. SANGGAU	LQ
<del>Industri</del> Pengolahan	2,848.32	516,542.57	0.22	3,724.75	685,364.13	0.24
Listrik,Gas dan Air						
Minum	147.64	4,289.55	1.40	252.87	6,345.96	1.76
Bangunan	2,400.49	73,093.73	1.34	3,053.68	92,983.03	1.45
Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,715.19	292,595.98	0.80	6,447.41	373,739.99	0.76
Pengangkutan dan Komunikasi	6,192.69	41,851.60	6.03	8,324.68	55,435.31	6.63
Kuangan,Persewaan & Jasa Perusahaan	1,573.25	56,713.34	1.13	1,859.49	68,452.55	1.20
Jasa-jasa	4,994.11	156,118.84	1.30	6,508.40	199,174.77	1.44
<b>JUMLAH</b>	<b>45,379.38</b>	<b>1,850,196.44</b>		<b>53,339.51</b>	<b>2,356,602.68</b>	

Sumber: Hasil Analisis, 2009

**Keterangan:**

- Nilai LQ < 1, berarti daerah yang bersangkutan mempunyai kecenderungan untuk impor dari daerah lain.
- Nilai LQ = 1, berarti daerah yang bersangkutan mampu mencukupi daerah sendiri dalam kegiatan tertentu.
- Nilai LQ > 1, berarti daerah yang bersangkutan mampu memenuhi pada sektor tertentu dan memiliki kecenderungan ekspor ke daerah lain.

Berdasarkan hasil analisis LQ di atas maka dapat disimpulkan sektor basis di Kecamatan Entikong adalah sektor pertambangan, pengangkutan dan komunikasi, listrik, gas dan air minum, bangunan, jasa-jasa, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan yang termasuk sektor non basis adalah sektor pertanian, industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan metode LQ, diperoleh beberapa alternatif sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan yaitu sektor pertambangan dengan nilai LQ paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Kemudian sektor kedua yang berpotensi menjadi sektor unggulan adalah pengangkutan dan komunikasi. Dengan nilai LQ yang relatif besar, maka kedua sektor tersebut merupakan *sektor basis* dan memiliki tingkat spesialisasi tinggi dan mampu memenuhi pada sektor tertentu dan memiliki kecenderungan ekspor ke daerah lain, khususnya sektor pengangkutan dan komunikasi terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2007.

Dengan memperhatikan analisis di atas, maka secara umum terlihat bahwa sektor-sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan di Kecamatan

Entikong adalah sektor pertambangan, pengangkutan dan komunikasi, serta listrik, gas dan air minum. Sedangkan sektor lainnya seperti industri pengolahan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan cenderung kurang kompetitif dan mempunyai kecenderungan untuk impor dari daerah lain, sehingga kurang dapat bersaing dengan wilayah di sekitarnya.

#### **4.2.3 Kinerja Sektor Perekonomian Kecamatan Entikong**

Sektor unggulan merupakan dambaan bagi setiap daerah, karena dengan sektor unggulan itu suatu daerah akan berpeluang lebih besar untuk mengembangkan potensi yang ada menuju kemandirian daerah.

Untuk mengetahui sektor unggulan pada Kecamatan Entikong, akan dijelaskan melalui metode *Shift-Share*. Metode tersebut merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah, sehingga dengan penjelasan itu dapat pula diketahui komposisi perekonomian wilayah dan pergeseran relatif struktur sektor lapangan usaha dalam perekonomian. Dengan demikian sektor unggulan daerah dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian dalam wilayah yang lebih luas akan teridentifikasi.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi sektor unggulan lapangan usaha dari suatu kondisi perekonomian di Kecamatan Entikong berpedoman pada:

- 
- KPPW (+) ; KPP (+) : sektor lapangan usaha wilayah unggul
  - KPPW (+) ; KPP (-) : sektor lapangan usaha wilayah cukup unggul
  - KPPW (-) ; KPP (+) : sektor lapangan usaha wilayah mengalami kemunduran
  - KPPW (-) ; KPP (-) : sektor lapangan usaha wilayah sangat mengalami kemunduran



**TABEL IV.6**  
**HASIL PENGOLAHAN SHIFT-SHARE TAHUN 2003-2007**  
**(PDRB DALAM JUTAAN RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	KAB.SANGGAU		KEC.ENTIKONG		KOMPONEN			PEK
	2003	2007	2003	2007	KPW	KPP	KPPW	
Pertanian	680,524.12	849,193.57	14,547.64	17,561.12	0.27	-	-	0.21
Pertambangan	28,466.71	25,913.38	6,960.05	5,607.11	0.27	-	-	-
Industri Pengolahan	516,542.57	685,364.13	2,848.32	3,724.75	0.27	0.03	0.04	0.19
Listrik,Gas dan Air Minum	4,289.55	6,345.96	147.64	252.87	0.27	0.05	-	0.31
Bangunan	73,093.73	92,983.03	2,400.49	3,053.68	0.27	0.21	0.23	0.71
Perdagangan, Hotel dan Restoran	292,595.98	373,739.99	5,715.19	6,447.41	0.27	0.00	0.00	0.27
Pengangkutan dan Komunikasi	41,851.60	55,435.31	6,192.69	8,324.68	0.27	-	-	0.13
Keuangan,Persewaan & Jasa Perusahaan	56,713.34	68,452.55	1,573.25	1,859.49	0.27	0.05	0.02	0.34
Jasa-jasa	156,118.84	199,174.77	4,994.11	6,508.40	0.27	0.07	0.03	0.18
JUMLAH	1,850,196.44	2,356,602.68	45,379.38	53,339.51	0.27	0.00	0.03	0.30

*Sumber: Hasil Analisis, 2009*

Berdasarkan pada perhitungan analisis *shift share* untuk Kecamatan Entikong (Tabel IV.6), sektor listrik, gas, dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi, industri pengolahan dan jasa-jasa, berkemampuan tumbuh pesat dan dimungkinkan berpengaruh secara positif terhadap peningkatan perekonomian dan pendapatan Kecamatan Entikong. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai positif yang dihasilkan antara KPK dan KPP. Sedangkan sektor pertanian, pertambangan dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masih merupakan sektor yang mengalami kemunduran karena nilai negatif yang dihasilkan antara komponen KPP dan KPPW.

Dalam konteks mundurnya sektor pertanian dalam kinerja perekonomian wilayah, jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga Malaysia, terlihat adanya ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan. Kawasan perbatasan yang kaya akan SDA seharusnya merupakan kawasan yang maju dan sejahtera,

namun kenyataannya menjadi sangat tertinggal. Padahal jika dicermati, terjadi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi khususnya yang terkait dengan pertanian. Tetapi karena proses produksinya tidak terjadi di Kalimantan, daerah ini hanya mendapatkan nilai tambah yang kecil.

*“Tidak adanya industri pengolahan di Entikong, sehingga produk mentah begitu saja mengalir ke Malaysia, beberapa komoditas yang penting seperti kakao, karet dan sawit” (MSL/UPT-03/01/05).*

*“Produk makanan minuman/kebutuhan pokok banyak mengalir dari pihak Malaysia, sedangkan komoditas hasil bumi cenderung dari pihak Indonesia, kondisi tersebut cenderung menguntungkan pihak Malaysia karena sumberdaya mentah dari Indonesia mereka olah dan kembali di ekspor dengan nilai tambah yang lebih tinggi” (MSL/UPT-03/01/02).*

Pemerintah Kecamatan Entikong dapat mengarahkan program pembangunannya pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan tersebut, sehingga pada masanya akan tumbuh menjadi sektor yang mampu menyediakan lapangan kerja bagi penduduk yang belum memperoleh lapangan pekerjaan. Adapun arahan kesempatan kerja berada pada sektor listrik, gas, dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi, serta jasa-jasa.

Dalam upaya untuk mengidentifikasi sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan, maka dapat diperoleh dengan mengkombinasikan komponen KPP dengan KPPW. Untuk lebih jelas perhatikan matrik pada Gambar 4.9 berikut ini.

		Komponen Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Sanggau (KPP)	
		Positif (+)	Negatif (-)
Komponen Pertumbuhan Sektoral Kecamatan Entikong (KPPW)	Positif (+)	<i>Sektor unggul:</i> - listrik, gas dan air bersih - bangunan - pengangkutan dan komunikasi - jasa-jasa	<i>Sektor agak unggul:</i> - Tidak ada
	Negatif (-)	<i>Sektor agak mundur:</i> - Industri pengolahan - Perdagangan, hotel, dan jasa perusahaan	<i>Sektor mundur:</i> - Pertanian - Pertambangan - Keuangan, persewaan, dan jasa

Sumber: Hasil Analisis, 2009

**GAMBAR 4.9**  
**PENGELOMPOKAN SEKTOR BERDASARKAN ANALISIS** **SHIFT-SHARE 2003-2007**

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode *shift share* ini, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

- sektor *unggulan* dalam perekonomian Kecamatan Entikong lebih didominasi oleh sektor-sektor yang tergolong kepada sektor tersier yang dalam hal ini ditunjukkan oleh sektor listrik, gas, dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, serta jasa-jasa
- sektor *agak mundur* adalah industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan jasa perusahaan.
- Kemudian sektor pertanian, pertambangan dan keuangan, persewaan, dan jasa menjadi sektor yang *mundur* di Kecamatan Entikong.

Berdasarkan analisis LQ sebelumnya, sektor pertambangan dan sektor keuangan dan jasa merupakan sektor yang berpotensi untuk menjadi sektor unggulan. Adanya pengaruh eksternal yang negatif dan pengelolaan yang kurang optimal dapat mengakibatkan sektor ini berada pada sektor yang mundur, sehingga perlu dilakukan peningkatan atau perbaikan secara intensif untuk menjadikan kedua sektor ini menjadi kompetitif.

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja perekonomian di Kecamatan Entikong antara lain kurangnya sumber daya manusia terlatih maupun terdidik yang mampu mengolah sumber daya lokal yang ada secara optimal. Kemudian kurangnya upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk merangsang kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh misalnya kondisi keamanan dan iklim kebijakan investasi yang tidak stabil mempengaruhi calon-calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Kecamatan Entikong.

*“Potensi investasi yang terdapat di kawasan perbatasan cukup tinggi (banyaknya minat investasi), namun akibat tidak jelasnya kebijakan pengembangan perbatasan tersebut akan dibawa kemana, akhirnya investasi tersebut menunggu untuk diimplementasikan”* (MSL/KKP-02/01/07).

Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam melarang melakukan ekspor impor (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:60/M-DAG/PER/12/2008) merupakan hal yang bertentangan dengan rencana pengembangan Kecamatan Entikong itu sendiri. Dalam rencana pengembangan disebutkan bahwa Kecamatan Entikong akan dikembangkan sebagai pusat niaga berskala nasional. Salah satu arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah baik barang maupun jasa, apabila permintaan dari luar meningkat, maka sektor basis akan berkembang dan pada gilirannya juga akan mendorong perkembangan sektor non basis wilayah terkait. Dengan

adanya kebijakan itu tentunya akan menghambat sektor-sektor yang berpotensi untuk berkembang dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap aktivitas perniagaan dimana kegiatan ekspor impor merupakan salah satu pendukung dalam aktivitas tersebut.

*“Keterkaitan antar sektor mengarah pada kondisi yang lebih baik, dengan perkembangan yang paling baik pada sektor perdagangan, namun sekali lagi perkembangannya akan terbentur oleh peraturan menperindag (tentang 5 pelabuhan yang akan melakukan ekspor-impor) akibatnya beberapa kegiatan yang sudah direncanakan oleh pusat-daerah bagi pengembangan perbatasan Entikong seperti pasar, rusunawa, Balai Latihan Kerja (BLK), pesimis untuk berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi” (MSL/KKP-02/07/05).*

*“Impact dari kebijakan yang baru (Kepmendag No. 60) membuat gairah ekonomi masyarakat menjadi lesu, termasuk sepinya pasar tradisional yang berada di Entikong yang biasanya dikunjungi oleh warga Malaysia” (KBJ/UPT-03/04/10).*

*“Penurunan kegiatan ekspor impor sebagai impact dari Kepmendag yang baru, terlihat dari menurunnya volume truk yang keluar-masuk di perbatasan, sementara untuk angkutan barang pribadi cukup banyak (sekitar 5-7 kendaraan) dengan membawa komoditas ikan dari kuching (impor)” (KBJ/HUB-04/07/03).*

Berdasarkan nilai KPP dan KPPW pada analisis perekonomian, industri pengolahan Kecamatan Entikong termasuk dalam sektor lapangan usaha yang cukup unggul. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor ini sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan (*leading sector*). Tidak adanya tindak lanjut dari pengolahan hasil panen pertanian di Kecamatan Entikong merupakan salah satu hambatan yang menjadikan nilai jual komoditas tersebut rendah. Adanya rencana penciptaan usaha industri pengolahan yang berbasis pada hasil pertanian sangat membuka peluang pengembangan lebih lanjut khususnya dalam meningkatkan nilai jual komoditas pertanian sehingga mampu bersaing dengan komoditas sejenis di wilayah lainnya.

#### **4.2.4 Sektor Prioritas**

Analisis ini menggunakan hasil analisis sebelumnya, yaitu LQ dan *Shift Share*. Komponen pergeseran bersih (PB) yang didapatkan dari penjumlahan atas KPP dan KPPW digabungkan dengan perhitungan LQ, sehingga sektor-sektor tersebut dapat diidentifikasi dalam kuadran tertentu. Selengkapnya dapat dilihat di Tabel IV.7 dan Gambar 4.10.

Berdasarkan analisis LQ dan *Shift Share* maka dapat diambil kesimpulan, bahwa sebaiknya pengembangan sektor lapangan usaha dikonsentrasikan pada sektor-sektor yang basisnya sudah kuat seperti *listrik, gas, dan air bersih, pengangkutan dan*

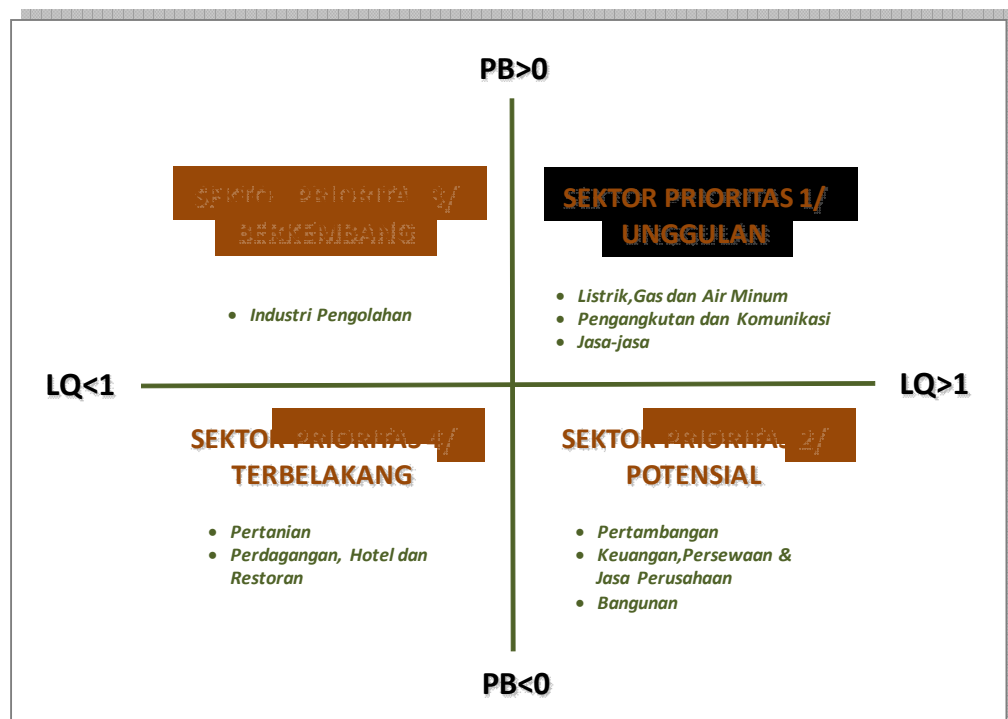
*komunikasi, serta jasa-jasa.* Namun demikian, sektor-sektor lain yang sudah tumbuh dan kemungkinan memiliki kemampuan dalam menunjang kemajuan perekonomian seperti pertanian, industri pengolahan, pertambangan, dan bangunan dapat lebih berkembang meningkatkan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Sementara sektor lain yang bukan merupakan sektor basis tetap diupayakan agar pertumbuhannya terhadap kontribusi PDRB terus mengalami kemajuan.

**TABEL IV. 7**  
**NILAI PERGESERAN BERSIH (PB) DAN *LOCATION QUOTIENT* PER SEKTOR DI**  
**KECAMATAN ENTIKONG**

NO.	LAPANGAN USAHA	KOMPONEN		PB (KPP+KPPW)		KET.	LQ		KET.
		KPP	KPPW						
1	Pertanian	-0.03	-0.04	-0.07	PB<0	Mundur	0.91	LQ<1	Non Basis
2	Pertambangan	-0.36	-0.10	-0.46	PB<0	Mundur	9.56	LQ>1	Basis
3	Industri Pengolahan	0.05	-0.02	0.03	PB>0	Progresif	0.24	LQ<1	Non Basis
4	Listrik,Gas dan Air Minum	0.21	0.23	0.44	PB>0	Progresif	1.76	LQ>1	Basis
5	Bangunan	0.00	0.00	0	PB<0	Mundur	1.45	LQ>1	Basis
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.00	-0.15	-0.15	PB<0	Mundur	0.76	LQ<1	Non Basis
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.05	0.02	0.07	PB>0	Progresif	6.63	LQ>1	Basis
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-0.07	-0.03	-0.10	PB<0	Mundur	1.20	LQ>1	Basis
9	Jasa-jasa	0.00	0.03	0.03	PB>0	Progresif	1.44	LQ>1	Basis

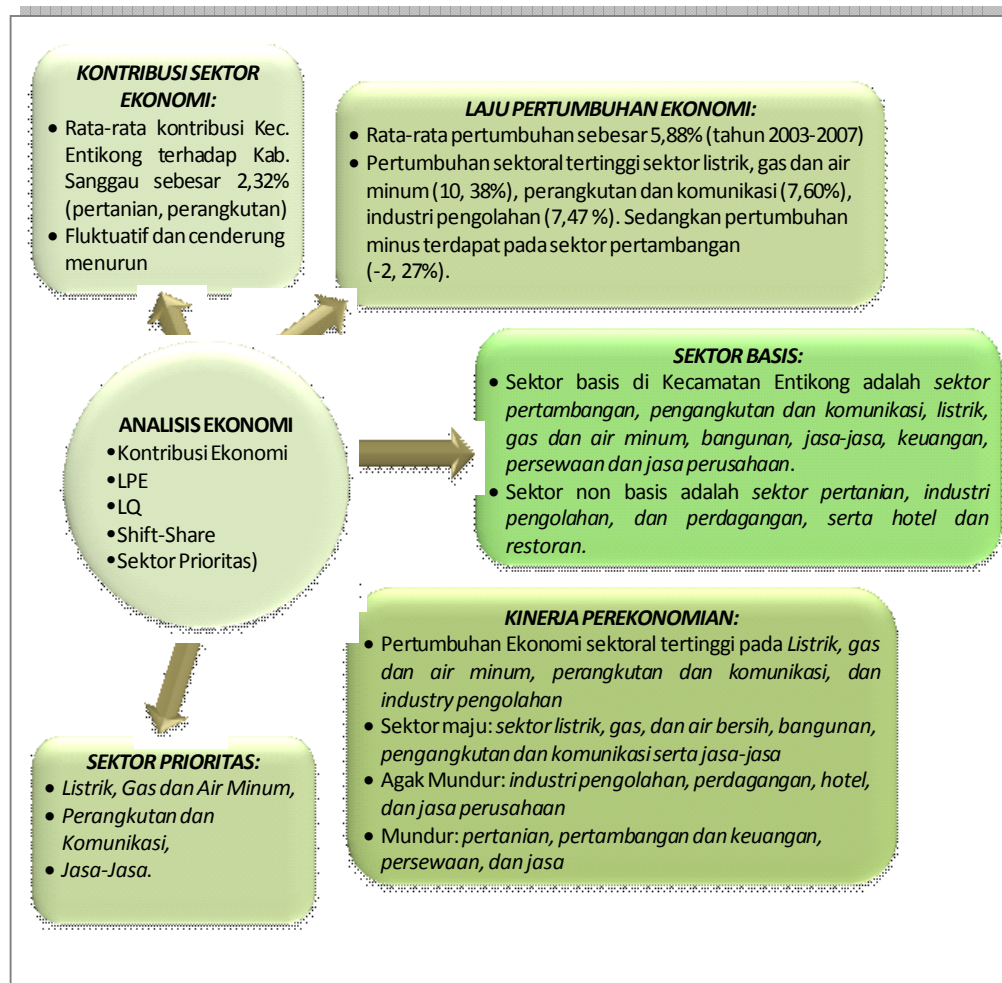
Sumber: Hasil Analisis, 2009

Hasil perhitungan PB dan LQ diatas, selanjutnya dilakukan *plotting* pada kuadran tertentu dalam menentukan sektor unggulan di Kecamatan Entikong.



Sumber: Hasil Analisis, 2009

**GAMBAR 4.10**  
**IDENTIFIKASI SEKTOR PRIORITAS DI KECAMATAN ENTIKONG**



Sumber: Hasil Analisis, 2009

**GAMBAR 4.11**  
**RINGKASAN HASIL ANALISIS EKONOMI KECAMATAN ENTIKONG**

### **4.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong**

Analisis ini berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Entikong. Berkaitan dengan pertanyaan penelitian tentang strategi pengembangan kawasan perbatasan ditinjau dari pembangunan ekonomi, analisis ini akan membahas mengenai benang merah dari analisis spasial dan ekonomi, serta adanya input kebijakan dan tinjauan teoritis bagi pengembangan perbatasan.

#### **4.3.1 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Perbatasan Entikong**

Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan sebelumnya, menjelaskan adanya perubahan penggunaan lahan, struktur ruang dan kependudukan, yang mengindikasikan pada tumbuhnya aktivitas ekonomi di Kecamatan Entikong (Niebuhr dan Stiller; 2001; Soekanto, 2003; Branch, 1995; Hasil Analisis, 2009). Perubahan spasial tersebut menunjukkan adanya kecenderungan perubahan guna lahan bagi permukiman (0,15%), polarisasi penduduk yang terletak pada Desa Entikong (kepadatan yang paling tinggi) dan terbentuknya pola linier dalam perkembangan kawasan mengikuti jalan arteri (*ribbon development*). Berdasarkan tinjauan secara teoritis dan empiris, maka kondisi diatas menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi kawasan, sesuai dengan fungsi kawasan sebagai kawasan perbatasan.

Pertumbuhan ekonomi dapat pula diketahui dari besarnya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2005). Dari hasil analisis yang dilakukan, laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Entikong mencapai angka 5,88% yang lebih tinggi dari angka laju pertumbuhan penduduk, yaitu 1,18%. Kondisi tersebut mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi, karena laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk.

Kontribusi ekonomi yang dimiliki oleh Entikong terhadap Kabupaten Sanggau rata-rata sebesar 2,32% (Tahun 2003-2007), dengan kondisi yang relatif menurun sejak tahun 2004. Menurunnya kontribusi Entikong dalam mendukung perekonomian Kabupaten Sanggau cenderung menunjukkan stagnasi fungsi kawasan perbatasan Entikong yang seharusnya mampu menjadi pusat pertumbuhan bagi kawasan sekitarnya. Kondisi tersebut perlu dicermati dalam perkembangannya karena Entikong menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berperan penting, baik secara internal kawasan perbatasan ataupun eksternal (Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak).

*“Dengan adanya PPLB, tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan tersebut sudah meningkat (khusus di wilayah tertentu yang dekat dengan akses*

*PPLB), namun tidak merata di seluruh hinterland perbatasan, fenomena tersebut direspon oleh pemerintah dengan pembangunan infrastruktur di wilayah hinterland agar memudahkan akses menuju PPLB (belum terlaksana)” (PT/SOS-01/03/07).*

Kondisi pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Entikong tidak terlepas dari sektor basis yang berperan penting dalam perkembangan perekonomian. Sektor pertambangan (LQ=9,56) dan sektor pengangkutan komunikasi (LQ=6,63) menjadi sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Lain halnya dengan sektor pertanian yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB kecamatan, sektor ini memiliki LQ=0,91 (bukan merupakan sektor basis). Apabila dilihat dari konteks pertumbuhan ekonomi, menurut Hamberg (1971) berkurangnya peran sektor pertanian yang mengarah pada sektor pendukung lain seperti perangkutan/transportasi dan komunikasi menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah.

Menurunnya peran sektor pertanian terlihat juga pada analisis *shift share* yang mengindikasikan kinerja sektor dalam perekonomian wilayah dan identifikasi sektor prioritas dari gabungan antara LQ dan *Shift Share*. Sektor pertanian tergolong mundur dengan nilai pergeseran yang minus (KPP dan KPPW). Sejalan dengan analisis LQ, ternyata dalam analisis kinerja perekonomian, sektor perangkutan dan komunikasi, litrik, gas dan air minum, jasa-jasa memiliki kinerja perekonomian yang maju. Kondisi ini menunjukkan perkembangan kegiatan di sektor non primer, khususnya di sektor perangkutan dan komunikasi, Kecamatan Entikong yang berperan sebagai kawasan perbatasan menunjukkan potensi peningkatan kegiatan akibat terbukanya akses yang tercermin dari kontribusi sektor perangkutan dan telekomunikasi yang kinerja ekonominya relatif maju.

Dari analisis kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan, menunjukan terjadinya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Entikong. Dengan mempertimbangkan kawasan perbatasan yang menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang memiliki fasilitas PPLB, pengelolaan di kawasan ini menjadi wewenang dari pemerintah pusat dan daerah. Terkait dengan kecilnya kontribusi Entikong relatif terhadap wilayah yang diatasnya (pengukuran secara agregat), hal tersebut terjadi karena kontribusi yang ada di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) tidak masuk dalam pendapatan daerah, melainkan ke pemerintah pusat. Pendapatan yang mencapai ± Rp. 15 M/bulan (sebelum diterapkannya kebijakan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2008 mengenai ekspor-impor) praktis tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

*“Setiap tahun departemen custom pendapatan mencapai 15 M, belum dari imigrasi (pembuatan paspor) dan karantina (penentuan lolos/tidaknya barang yang diperdagangkan) artinya pendapatan yang sangat besar didapatkan di PPLB tersebut” (PT/SOS-01/07/11).*

*“Terbukanya akses perbatasan Entikong terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut memiliki implikasi yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun berbanding terbalik dengan implikasinya terhadap pemerintah daerah, karena pihak yang berperan dalam pengelolaan perbatasan tersebut adalah pemerintah pusat (Bea Cukai, Imigrasi) sehingga praktis penerimaan dari PPLB mengalir ke pusat. Dalam hal pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, perubahan tersebut terjadi di Entikong, namun sangat lambat dan cenderung tidak*



*berkontribusi terhadap perkembangan sebuah kawasan perbatasan” (MSL/KKP-02/01/01).*

*“Perkembangan terbaru dengan adanya peraturan Menperindag yang intinya hanya 5 pintu pelabuhan yang boleh melakukan kegiatan ekspor-impor, dimana Entikong tidak termasuk dalam pelabuhan tersebut” (KBJ/KKP-02/03/02).*

*“Keberadaan PPLB tidak berkontribusi bagi daerah provinsi/kabupaten karena pendapatan mengalir ke pusat dan tidak ada sharring untuk daerah perbatasan”(MSL/UPT-03/03/04).*

Peran kebijakan yang sangat sensitif bagi pertumbuhan ekonomi di perbatasan Entikong merupakan *barrier* yang membatasi pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi Kawasan perbatasan Entikong sangat tergantung pada kebijakan pusat dan kebijakan bilateral (tanpa melibatkan pusat) yaitu adanya forum Sosek Malindo. Dengan demikian diperlukan adanya iklim yang kondusif dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk penyiapan kebijakan yang *fit* dengan kondisi perbatasan dan pengembangannya.

Menurut Niebuhr dan Stiller (2001), sebuah kawasan perbatasan memiliki suatu keunikan dalam melihat potensi pasar yang dimiliki, jangkauan pemasaran sangat mungkin terdistorsi akibat adanya kebijakan dan regulasi di garis perbatasan (seperti terlihat pada Gambar 4.12). Kondisi Entikong yang termasuk dalam tipologi *border region*<sup>1</sup>, mencirikan kondisi yang belum mengarah pada kondisi kawasan perbatasan dengan hubungan ekonomi yang menguntungkan dan minimnya distorsi pasar terhadap wilayah yang berbatasan (*transborder region*). Untuk itu, kebijakan yang ada sebaiknya menunjang kedua belah pihak, khususnya Entikong dengan potensi koneksitas yang tinggi dengan Sarawak (ditunjukkan dengan berkembangnya sektor tersier sebagai sektor prioritas: *perangkutan dan komunikasi, jasa-jasa*) untuk mengembangkan perekonomiannya dan mampu mengembangkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan.

Potensi kebocoran ekonomi (*leakage*) yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi pula oleh kondisi infrastruktur yang belum menjangkau *hinterland* kawasan perbatasan. Kondisi ini sangat memungkinkan bagi mengalirnya sumber daya secara informal (*illegal*) di wilayah yang perbatasan karena sulitnya menjangkau PPLB Entikong.

*“Kendala dalam pemanfaatan potensi yang ada di hinterland kawasan perbatasan adalah penyiapan infrastruktur bagi wilayah-wilayah tersebut, menuju akses perbatasan (PPLB Entikong), karena penggunaan jalan tikus bagi illegal trade sudah tidak memungkinkan karena dijaga oleh pasukan libas (Lintas Batas)” (MSL/SOS-01/08/16).*

*“Dalam hal illegal activity keberadaan border belum cukup mampu menangkal fenomena tersebut, interaksi social/ ikatan social yang kuat di perbatasan menjadi salah satu penyebab dalam ilegal (logging, trafficking, fishing (Aruk),*

---

<sup>1</sup> Menurut Terminologi Wu (2001: 23), Entikong terlihat secara *hubungan ekonomi dikontrol dengan ketat, infrastruktur yang bottleneck, dan perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antar wilayah yang berbatasan*, sehingga masuk dalam kategori tipologi *border region*.

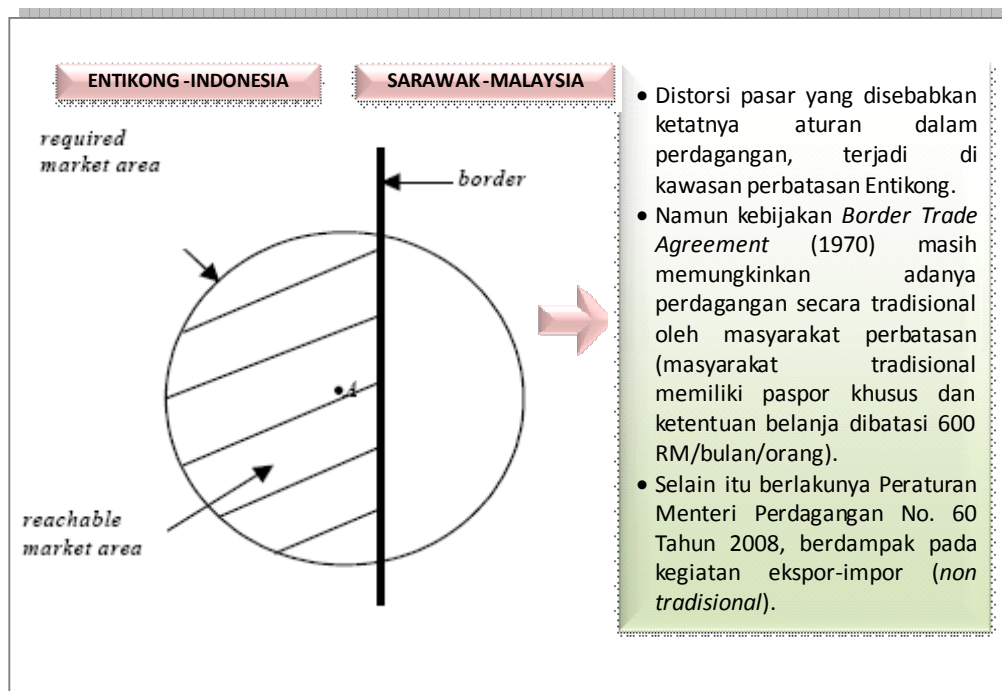
hasil perkebunan). Kegiatan tersebut sudah bisa di tekan di pintu resmi, namun di akses perbatasan non resmi masih terus berjalan” (MSL/KKP-02/04/11).

“Pengembangan kawasan perbatasan yang terpadu dan menyeluruh seharusnya didukung oleh infrastruktur yang handal. Tanpa perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang dapat menjangkau wilayah perbatasan, mustahil fungsi optimal sebuah kawasan perbatasan sebagai beranda negara dapat ditangani dengan baik” (PNG/PU-06/03/01).

Menurut Kearney (2004), perbedaan kondisi ekonomi (Malaysia-Indonesia) memungkinkan terjadinya aliran sumber daya dari wilayah yang lebih rendah secara ekonomi, menuju ke wilayah yang lebih maju melalui *semi permeable membrane* yaitu batas wilayah yang ada (Gambar 4.13). Kondisi tersebut terjadi di perbatasan Entikong, perbedaan kondisi yang ada menyebabkan Malaysia menikmati semua keuntungan, karena praktis dari segala aspek lebih maju dan mampu menyediakan *supply* bagi masyarakat Entikong.

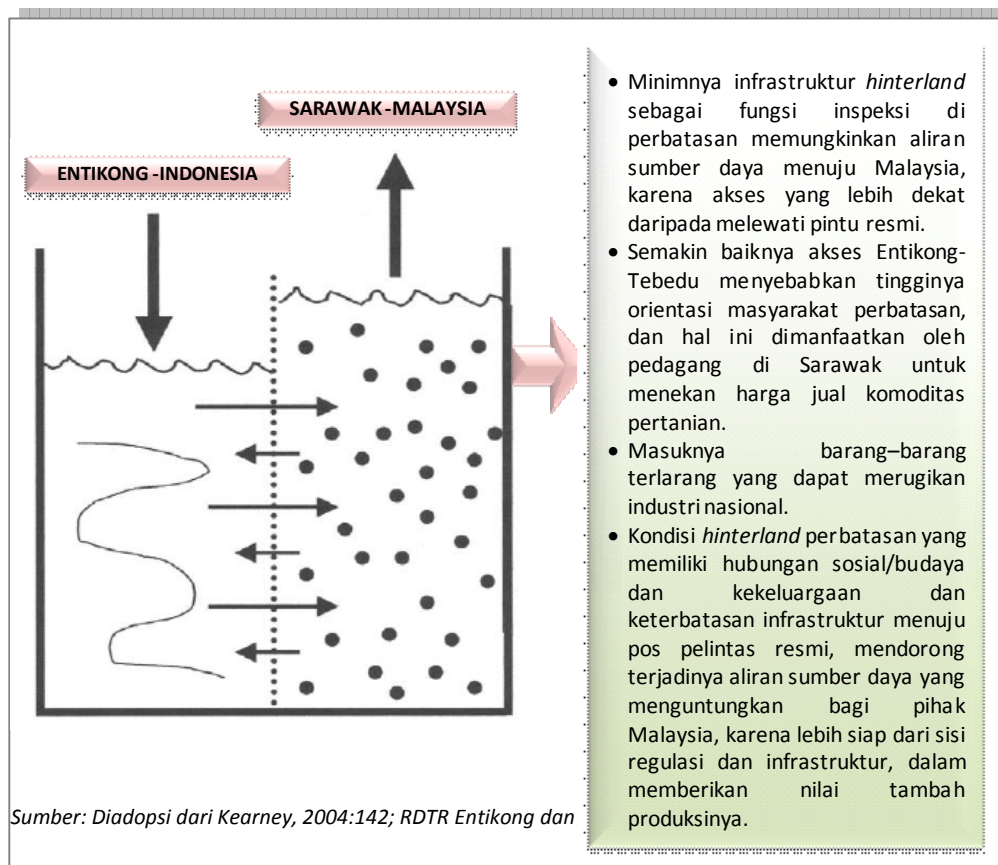
“Pada kasus Entikong, yang terjadi adalah ketergantungan yang sangat tinggi dengan pihak Malaysia, karena belum ada solusi untuk membuat produk yang bisa di ekspor, sementara sebelum border dibuka sampai dengan sesudah dibuka, masyarakat selalu berorientasi untuk berbelanja ke seberang (alasan harga, kualitas, prosedur, birokrasi yang lebih baik). Sementara itu di pihak Malaysia, birokrasi untuk partai kecil tidak begitu menyulitkan” (MSL/SOS-01/08/20).

“Perbedaan kondisi yang ada menyebabkan Malaysia menikmati semua keuntungan, karena praktis dari segala aspek mereka lebih maju dan mampu menyediakan *supply* bagi masyarakat Entikong” (MSL/KKP-02/09/15).



Sumber: Diadopsi dari Niebuhr dan Stiller, 2001:6; Hasil Analisis, 2009

**GAMBAR 4.12**  
**DISTORSI PASAR PADA KAWASAN PERBATASAN ENTIKONG YANG MENJADI *BARRIER***  
**DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI**



**GAMBAR 4.13**  
**KONSEP OSMOSIS DALAM PERGERAKAN ALIRAN PEREKONOMIAN DI PERBATASAN**

Berbagai kondisi diatas menjelaskan adanya limitasi dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Entikong. Peran kebijakan pusat di kawasan perbatasan

sangat penting dalam kontribusinya terhadap pengembangan kawasan perbatasan, khususnya di sisi ekonomi. Upaya pembangunan Entikong sebagai PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) dan dukungan Kebijakan Regional (RTRW) sebagai *Border Development Centre*, atau sebagai pusat pertumbuhan akan menghadapi kesulitan apabila dihadapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2008, karena Entikong tidak lagi menjadi pelabuhan ekspor-impor. Dengan adanya peraturan tersebut praktis hanya perdagangan oleh masyarakat perbatasan yang dapat dilakukan<sup>2</sup>, dan berbagai fasilitas yang sudah dirintis pemerintah (*Free Trade Zone*, *Dry Port*, Balai Latihan Kerja, Rusunawa) diperkirakan tidak optimal karena adanya kebijakan tersebut.

*Keterkaitan antarsektor mengarah pada kondisi yang lebih baik, dengan perkembangan yang paling baik pada sektor perdagangan, namun sekali lagi perkembangannya akan terbentur oleh peraturan menperindag (tentang 5 pelabuhan yang akan melakukan ekspor-impor) akibatnya beberapa kegiatan yang sudah direncanakan oleh pusat-daerah bagi pengembangan perbatasan Entikong seperti pasar, rusunawa, Balai Latihan Kerja (BLK), pesimis untuk berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi. (MSL/KKP-02/07/05).*

Peran kawasan perbatasan Entikong sebagai PKSN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, merupakan kawasan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara dan kawasan sekitarnya. Kriteria penetapan Entikong sebagai PKSN tersebut antara lain karena Entikong dianggap mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya yang didukung oleh keberadaan PPLB di wilayah tersebut, fungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga, dan kawasan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya.

Dari hasil analisis yang dilakukan, terlihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kawasan ini belum menunjukkan peran kawasan dalam mendorong kawasan sekitarnya yang tercermin dari minimnya infrastruktur yang menghubungkan antar kawasan dan konsentrasi pembangunan hanya pada lokasi tertentu (Desa Entikong) yang merupakan lokasi PPLB. Dari 5 desa di Kecamatan Entikong, 4 diantaranya berbatasan langsung dengan Sarawak, namun koneksitas antarwilayah tersebut relatif belum baik (akses infrastruktur jalan masih jalan tanah) dan kebutuhan energi listrik yang masih menjadi masalah di Kecamatan Entikong.

*"Salah satu masalah yang pelik di Entikong adalah listrik yang tidak dapat dipenuhi oleh Entikong, dimana hal ini menjadi penyebab bagi mundurnya potensi investasi, kendala ini akhirnya diatasi dengan membeli listrik dari Malaysia yang notabene*

---

<sup>2</sup> Kegiatan perdagangan masyarakat tradisional dilakukan sejak *Border Trade Agreement* (BTA) tahun 1970, sebesar 600 RM/bulan/orang, saat ini Forum Kerjasama Sosek Malindo sedang mengupayakan kenaikan sebesar 1500 RM/bulan/orang karena pertimbangan kurs dan kebutuhan masyarakat perbatasan.

*menjadi polemik yang cukup berarti bagi keberlanjutannya akibat kecenderungan kondisi kedua negara yang relatif bergejolak” (MSL/KKP-02/08/13).*

#### **4.3.2 Analisis Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong**

Sebagai kawasan perbatasan darat yang memiliki potensi dalam pengembangan perekonomian, Entikong perlu dilihat dan dikomparasikan dengan wilayah Tebedu (Sarawak). Komparasi tersebut untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang terjadi di Entikong, sehingga beberapa *lesson learned* dan *best practice* yang ada di wilayah lain dapat dianalisis dan diaplikasikan dalam pengembangan perbatasan Entikong.

Tinjauan terhadap analisis komparasi Entikong-Tebedu yang dikaitkan *best practice* dan sintesa teoritis dalam pengembangan kawasan perbatasan darat antarnegara diharapkan akan menunjukkan adanya embrio penting bagi pengembangan Kawasan Perbatasan Entikong lebih lanjut. Elemen yang tersintesa dari *best practice* dan teoritis tersebut adalah komplementaritas ekonomi, ketertarikan sektor swasta, intervensi pemerintah, kerangka kerja institusi, budaya, pendekatan berbasis pada infrastruktur, investasi dan kebijakan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada Tabel IV.8 berikut.

**TABEL IV.8**  
**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI TERKAIT ELEMEN *BEST PRACTICE* PENGEMBANGAN PERBATASAN DARAT ANTARNEGARA**

NO.	ANALISIS DALAM PENELITIAN	TUJUAN	ELEMEN <i>BEST PRACTICE</i> TERKAIT	IMPLIKASI ENTIKONG-TEBEDU
1.	Kondisi spasial Kawasan Perbatasan Entikong (Penggunaan Lahan, Struktur Ruang, Kependudukan)	Mengetahui pertumbuhan ekonomi bagi pengembangan kawasan perbatasan dari aspek spasial kawasan perbatasan	<p><b><i>Pendekatan berbasis infrastruktur</i></b></p> <p><b><i>Pendekatan berbasis kebijakan</i></b></p>	<p>Pendekatan ini telah dilakukan baik di sisi Entikong maupun di Tebedu, namun ketertinggalan infrastruktur di pihak Entikong dan kebijakan yang tidak sinkron (pusat-daerah) menyebabkan pertumbuhan dan pengembangan perbatasan yang terjadi berjalan lambat (PT/SOS-01/03/07). Selain itu diperlukan adanya kerjasama dalam pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia (khususnya wilayah yang terisolir).</p> <p>Kebijakan merupakan kendala yang cukup berperan dalam pengembangan kawasan perbatasan. Posisi Entikong sebagai PKSN (Pusat Kawasan Strategis Nasional) yang memiliki keuntungan dari sisi perdagangan, melalui Kepmen Perdagangan No. 80 Tahun 2008, tidak menjadikan Entikong sebagai pelabuhan darat, hal ini berdampak pada pengurangan aktivitas ekonomi di perbatasan. Hal ini bertolak belakang dengan rencana pengembangan infrastruktur dan perekonomian yang seharusnya dapat berkembang, namun terhambat oleh kebijakan perdagangan tersebut. Berbeda dengan Kebijakan Pemerintah Sarawak yang responsif terhadap pengembangan kawasan perbatasan dari sisi kebijakan pengembangan kawasan.</p>
2.	Ekonomi Wilayah (pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor)	Mengetahui pertumbuhan ekonomi melalui penilaian atas indikator-indikator pertumbuhan ekonomi dalam struktur ekonomi	<p><b><i>Ketertarikan Sektor Swasta</i></b></p> <p><b><i>Intervensi Pemerintah</i></b></p>	<p>Lingkungan investasi yang kondusif sangat berperan dalam elemen ini, dari komparasi kondisi yang dilakukan, terlihat bahwa pihak Tebedu sudah sangat baik dalam menyiapkan berbagai fasilitas dan infrastruktur bagi investasi yang akan masuk, namun berbeda dengan kondisi Entikong yang pembangunannya masih terkendala berbagai masalah alokasi dana pembangunan dan wewenang pengelolaan (MSL/SOS-01/03/09). Elemen ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan infrastruktur. Besarnya minat investasi cukup tinggi di kawasan perbatasan Entikong, namun mereka menunggu kebijakan dan infrastruktur yang kondusif bagi iklim usahanya (MSL/KKP-02/01/07).</p> <p>Kedua wilayah perbatasan tersebut terlihat memerlukan adanya intervensi pemerintah menyangkut pengembangan berbagai potensi yang mutlak diperlukan, dalam komparasi ini, pihak Malaysia (Pemerintah Federal) terlihat sangat serius dalam mengatasi masalah kebutuhan infrastruktur dibandingkan dengan di Entikong.</p>
lanjutan			<b><i>Kerangka Kerja Institusi</i></b>	<p>Hadirnya lembaga kerjasama seperti SOSEK MALINDO (wujud kerjasama pemerintah daerah dengan pihak Malaysia) memberikan peluang ekonomi yang cukup baik bagi</p>

NO.	ANALISIS DALAM PENELITIAN	TUJUAN	ELEMEN <i>BEST PRACTICE</i> TERKAIT	IMPLIKASI ENTIKONG-TEBEDU
			<i>Budaya</i>	<p>kedua wilayah, bagi peningkatan kerjasama di perbatasan, berbagai kebijakan penting diolah dalam forum tersebut. Elemen ini dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam melengkapi kebijakan pusat dalam pengembangan wilayah perbatasan. selain itu adanya Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) berperan sebagai arranger dalam kerangka kerja institusi di perbatasan.</p> <p>Komponen ini merupakan salah satu keuntungan yang dimiliki oleh perbatasan Entikong-Tebedu, kesamaan rumpun dan banyaknya pertalian keluarga di kedua wilayah merupakan modal sosial yang sangat kuat bagi pengembangan kawasan perbatasan, sekaligus menjadi penghambat bagi penegakan aturan hukum yang berlaku secara internasional karena cenderung mengabaikan aturan hukum akibat kedekatan secara sosial.</p>
			<i>Komplementaritas Ekonomi</i>	<p>Kegiatan saling melengkapi terutama dalam faktor produksi dapat dilakukan dalam mengembangkan perkonomian baik di Entikong-Tebedu. Penggunaan sumber daya bersama sangat memungkinkan dalam melengkapi faktor produksi. Hal ini dapat menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang belum menjadi basis dan kinerja ekonominya mundur. Namun perbedaan kondisi perekonomian Indonesia-Malaysia cenderung bukan komplementaritas namun tertariknya sumber daya lokal ke luar daerah tanpa peningkatan nilai tambah sektor tersebut.</p>
			<i>Pendekatan berbasis investasi</i>	<p>Seperti yang terjadi di Polandia-Jerman, Thailand-China-Burma-Laos, dan China-Vietnam, berkembangnya aktifitas <i>sektor informal</i> merupakan motor bagi pengembangan wilayah perbatasan. Dalam konteks ini perbatasan Entikong-Tebedu terkait dengan <i>Border Trade Agreement</i> (BTA) yang terkesan stagnan dan tidak memberikan dampak signifikan bagi pengembangan kawasan perbatasan Entikong (KBJ/SOS-01/04/06), upaya pengembangan terkendala oleh kebijakan dan peraturan yang ada dan sulitnya iklim investasi berkembang karena tidak jelasnya regulasi.</p>
			<i>Pendekatan berbasis kebijakan</i>	<p>Kebijakan yang mendorong bagi iklim perekonomian dan menggerakkan berbagai sektor dalam pertumbuhan di perbatasan diperlukan di Entikong. Berbeda dengan Kebijakan Pemerintah Sarawak yang sangat responsif terhadap pengembangan kawasan perbatasan (penyediaan infrastruktur dan kebijakan yang menunjang).</p>

*Sumber: Wu, 2001, Hasil Analisis, 2009*

Berdasarkan analisis terhadap elemen-elemen *best practice* yang terkait dengan analisis dalam penelitian. Dapat disimpulkan bahwa kawasan perbatasan Entikong memiliki potensi pengembangan sebuah kawasan perbatasan. Potensi tersebut ada karena Entikong memiliki sebagian besar elemen-elemen tersebut, kecuali komplementaritas ekonomi dan pendekatan investasi pada kawasan.

Potensi pengembangan kawasan perbatasan Entikong yang berkaitan dengan perspektif ekonomi terlihat dari keberadaan elemen-elemen tersebut. Dari penjelasan atas analisis pertumbuhan ekonomi kawasan secara lebih komprehensif, menunjukkan adanya peran kebijakan dan infrastruktur yang sangat dominan bagi pengembangan kawasan. Adanya analisis pengembangan kawasan perbatasan dapat lebih menjelaskan kendala dari kedua peran tersebut, khususnya di perbatasan Entikong yang terkendala oleh kebijakan yang tidak sinkron (pusat-daerah) dan minimnya infrastruktur di perbatasan.

#### **4.4 Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong**

Strategi pengembangan perbatasan ini dihasilkan dari berbagai temuan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Fokus strategi pada pengembangan perbatasan dalam perspektif ekonomi dilakukan untuk memberikan makna pada permasalahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kawasan yang belum menunjukkan peran kawasan dalam mendorong kawasan sekitarnya, hal ini tercermin dari minimnya infrastruktur yang menghubungkan antar kawasan dan konsentrasi pembangunan hanya pada lokasi tertentu (Desa Entikong) yang merupakan lokasi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Strategi pengembangan dalam perspektif ekonomi tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.9.



**TABEL IV.9**  
**STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN ENTIKONG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI**

NO.	MASALAH	ANALISIS	STRATEGI
1.	Kendala dalam pengembangan kawasan perbatasan (lebih dari 80% terdiri atas kawasan lindung dan hutan produksi), dan topografi yang bergelombang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi guna lahan menyebabkan terbatas-nya lahan bagi pengembangan aktivitas ekonomi;</li> <li>- Diperlukan koneksitas wilayah yang lebih baik dalam rangka mendorong pengembang-an wilayah perbatasan (akses menuju wilayah-wilayah perbatasan di Kecamatan Entikong masih berupa jalan tanah).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun <i>road map</i> perencanaan tata ruang yang <b>efektif</b> (sesuai kondisi spasial kawasan) dan <b>operasional</b> (memiliki legalitas dan mampu dilaksanakan) dalam memanfaatkan fungsi kawasan budidaya (mempertimbangkan <i>prospek</i> kegiatan dan <i>diversifikasinya</i>),</li> </ul>
2.	Kondisi dilematis fungsi Entikong sebagai kawasan perbatasan (sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) - Ekonomi, Sosial, Lingkungan.	Kawasan perbatasan Entikong sebagai kawasan strategis nasional memiliki kepentingan dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, antara lain merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem dan menuntut prioritas tinggi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, Entikong diharapkan dapat mendorong pengembangan kawasan perbatasan dimana saat ini pertumbuhan ekonomi kawasan masih belum merata dan masih terpusat di sepanjang jalur utama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong adanya komplementaritas ekonomi dengan wilayah lain (misalnya: faktor tanah dan tenaga kerja yang murah, melalui fasilitasi yang baik kedua hal tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak). Sehingga optimasi nilai tambah tersebut mampu meningkatkan perekonomian dan menjaga sustainabilitas pembangunan di perbatasan.</li> <li>• Mengembangkan sektor-sektor sekunder dan tersier (perangkutan dan komunikasi, jasa-jasa) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan (mengurangi ekstensifikasi lahan)</li> <li>• Mengembangkan budidaya sektor pertanian intensif dalam mendukung daya saing produksi dan nilai tambah sektor dengan menggunakan prinsip <b><i>sustainable development</i></b>.</li> <li>• Mendorong peran wisata alam (<i>ecotourism</i>) terkait dengan potensi alam Entikong, dan potensi wisatawan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus melindungi kelestarian alam.</li> </ul>

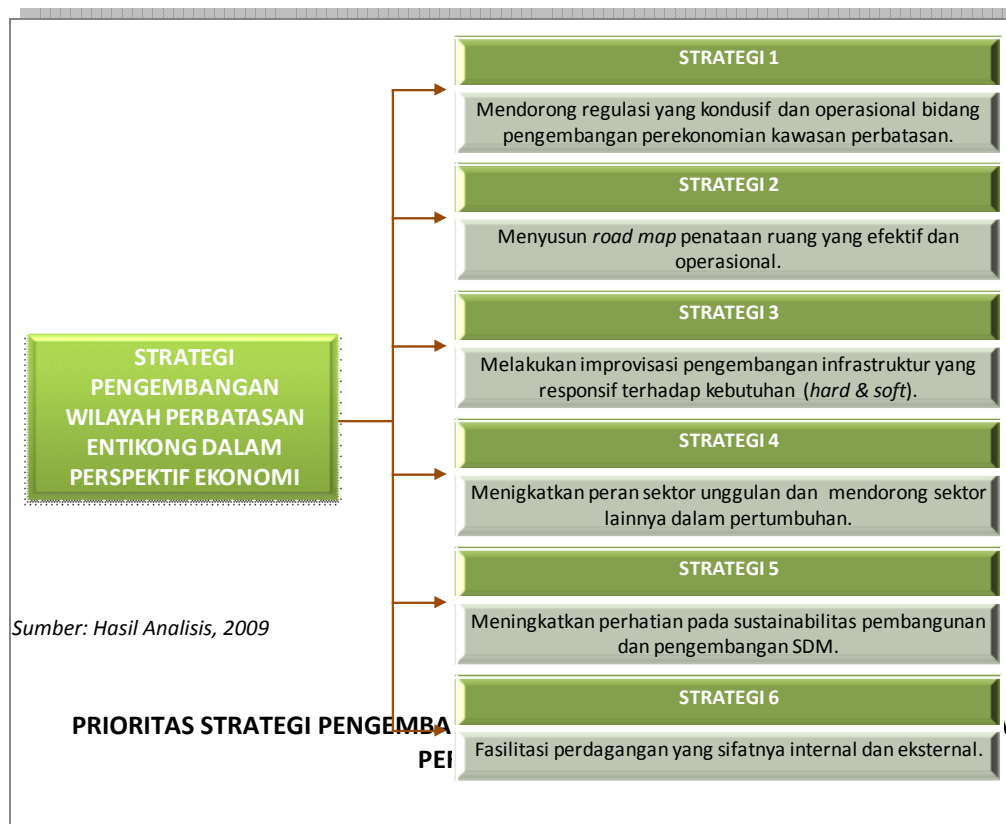
landasan	MASALAH	ANALISIS	STRATEGI
	3. Kecenderungan perkembangan struktur ruang dengan pola linier/ <i>ribbon development</i> (sehingga terjadinya inefisiensi dalam pemanfaatan ruang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya pengaturan arah perkembangan struktur ruang kawasan yang terintegrasi agar pertumbuhan wilayah optimal;</li> <li>- Hal ini dapat juga disebabkan oleh kondisi topografi kawasan yang memungkinkan terjadinya pola tersebut (Yunus, 2000).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan improvisasi pengembangan infrastruktur yang <b>responsif</b> terhadap kebutuhan untuk pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi dan kondisi kawasan (topografi/limitasi sebagai PKSN).</li> </ul>
	4. Polarisasi penduduk dalam satu wilayah (Desa Entikong)	<p>Perlunya pengaturan dalam alokasi fasilitas dan infrastruktur pendukung, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi diluar Desa Entikong dapat dilihat, menurut Swinburn et. al (2006), kualitas dan kuantitas infrastruktur merupakan landasan bagi suksesnya pengembangan ekonomi. Infrastruktur terbagi atas dua komponen lokal, yaitu <b>hard infrastructure</b> (<i>roads, rail, water, sewerage and drainage systems, and energy and telecommunications networks</i>) dan <b>soft infrastructure</b> (<i>social, cultural and community facilities and capacity that enhance the quality of life and encourage industry and business development</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk <b>keterkaitan fisik dan ekonomi kawasan</b> melalui stimulasi pembangunan infrastruktur baik berupa <i>soft</i> (peningkatan kapasitas masyarakat, pembangunan institusi lokal dalam pengembangan perbatasan, aliansi stakeholder dengan aktor-aktor pengembangan perbatasan) maupun <i>hard</i> infrastruktur (pembangunan jalan, listrik dan telekomunikasi);</li> </ul>
	5. Kontribusi ekonomi yang rendah dan fluktuatif (Entikong terhadap Sanggau), kebocoran/ <i>leakage</i> dalam sumber daya, distorsi pasar di wilayah perbatasan.	<p>Perlunya peningkatan terhadap kontribusi sektoral khususnya dalam melihat potensi lokasi strategis perbatasan dan potensi lainnya (pariwisata, pertanian), selain itu diperlukan adanya peningkatan atas nilai tambah produk.</p> <p>Potensi strategis bagi pengembangan pariwisata sangat penting untuk dikembangkan, tingginya arus masuk bagi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong regulasi yang kondusif dan operasional terhadap pengembangan kawasan perbatasan. (Pembentukan Badan Nasional Perbatasan, Payung hukum pengembangan perbatasan, <i>sharing</i> pendapatan pemerintah pusat-daerah);</li> <li>• Mendorong sektor industri pengolahan dan pariwisata yang potensial untuk dikembangkan, dalam upaya menciptakan kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah kawasan</li> </ul>

NO.	MASALAH	ANALISIS	STRATEGI
lanjutan		wisatawan tercermin dari peningkatan permohonan atas <i>visa on arrival</i> di PPLB.	sehingga mendorong pertumbuhan ekon..... sektoral. (industri yang mengolah hasil SDA: karet, kakao, lada, sawit; pariwisata alam); <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantapkan kinerja dan produktivitas sektor yang sudah unggul (perangkutan dan komunikasi) dan mendorong sektor lainnya untuk peningkatan produksi dan nilai tambah;</li> <li>• Fasilitasi perdagangan yang sifatnya <i>internal</i> dan eksternal melalui pembangunan <i>centre point</i> untuk mengintegrasikan kegiatan perekonomian di Entikong.</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM pada sektor-sektor non primer.</li> </ul>
6.	Sektor pertanian yang bukan lagi menjadi basis dan cenderung tidak potensial/kinerjanya terus menurun, padahal Entikong memiliki potensi dalam menghasilkan produk pertanian dan menjadi motor penggerak sektor lainnya.	Perlunya kerangka keterkaitan ekonomi dalam meningkatkan daya saing pertanian (diharapkan dapat membelikan multiplier efek dengan keterkaitan tersebut) dan peningkatan kualitas pertanian melalui sumber daya manusianya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produksi di sektor hulu dan membangun industri pengolahan hasil produk unggulan daerah di sektor hilir dalam memberikan nilai tambah produk pertanian (keterkaitan ekonomi);</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM bidang pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian.</li> </ul>
7.	Kebijakan yang tidak sinkron dengan pengembangan kawasan perbatasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya kajian atas kebijakan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan;</li> <li>- Perlunya kajian atas <i>sharing</i> penerimaan pemerintah daerah terkait dengan tingginya penerimaan pendapatan di PPLB, sehingga pengembangan perbatasan tidak hanya bertumpu pada bantuan pemerintah pusat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong regulasi yang kondusif dan operasional terhadap pengembangan kawasan perbatasan–kerangka kerja institusi. (Pembentukan Badan Nasional Perbatasan, adanya payung hukum pengembangan perbatasan, <i>sharing</i> pendapatan pemerintah pusat-daerah);</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis, 2009



Berdasarkan analisis atas permasalahan yang muncul dari kajian sebelumnya, strategi pengembangan wilayah perbatasan Entikong dalam perspektif ekonomi secara umum dapat diurutkan dengan prioritas sebagai berikut (Gambar 4.14).



Strategi pengembangan wilayah perbatasan Entikong dalam memacu pertumbuhan ekonomi ini merupakan strategi yang dilaksanakan dalam jangka waktu menengah dan panjang. Beberapa strategi diatas berperan dalam mendukung dan melengkapi strategi eksisting di bidang perekonomian yang ada di wilayah studi. Strategi ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih fokus, khususnya dalam pengembangan wilayah perbatasan ditinjau dari potensi perekonomian.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini akan membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi tentang strategi pengembangan wilayah perbatasan Entikong dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

#### 5.1 Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Entikong belum mendorong pada pengembangan sebuah wilayah perbatasan dalam kaitannya dengan potensi ekonomi yang dimiliki. Namun beberapa elemen penting dalam pengembangan sebuah wilayah perbatasan sudah dimiliki oleh Entikong. Strategi yang dihasilkan memberikan perspektif solusi bagi permasalahan yang muncul dalam pengembangan wilayah perbatasan. Selengkapny kesimpulan yang dapat diuraikan terkait dengan berbagai pembahasan pada bagian sebelumnya adalah:

1. Wilayah Perbatasan Entikong merupakan fase awal dalam perkembangan sebuah kawasan perbatasan. Hal ini tercermin dari tipologi *border region* yang memiliki ciri-ciri sedikitnya hubungan ekonomi yang terjadi, infrastruktur yang *bottleneck*, perkembangan sektor non primer, dan kerangka kebijakan yang belum terpadu. Sebagai fase awal perkembangan kawasan perbatasan, masalah yang muncul adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mendorong pada pengembangan kawasan perbatasan. Temuan tersebut menunjukkan adanya urgensi dari strategi pengembangan kawasan yang berbasis pada ekonomi, dengan mempertimbangkan strategi eksisting yang ada di wilayah penelitian.
2. Tinjauan terhadap aspek spasial menunjukkan perubahan yang relatif kecil dari sisi penggunaan lahan bagi pertumbuhan aktivitas ekonomi. Polarisasi penduduk dan struktur ruang yang terbentuk lebih disebabkan oleh kondisi topografi dan infrastruktur jalan yang terbangun, khususnya jalan utama menuju pintu perbatasan.

Kondisi ini memerlukan perhatian, terkait dengan peran Entikong sebagai PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) yang berfungsi ekonomi sekaligus menjaga fungsi lindung yang ada di kawasan perbatasan. Upaya dalam memacu pertumbuhan ekonomi tentunya dihadapkan pada sisi konservasi lingkungan dengan fungsi lindung kawasan. Prinsip pengembangan wilayah yang berkelanjutan (sosial-ekonomi-lingkungan) sangat penting untuk diterapkan dalam konteks ini.

3. Pertumbuhan ekonomi dapat terlihat dari besarnya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata (5,88%), dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (1,18%). Selain itu, secara basis ekonomi, hampir seluruh sektor adalah sektor basis kecuali sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Tinjauan secara basis ekonomi tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, karena sektor basis dapat mendorong majunya perekonomian wilayah perbatasan. Potensi ini dapat berkembang dengan lebih baik tentunya dengan dukungan multisektor dan kebijakan yang kondusif, kondisi ini merupakan modal awal yang penting bagi pengembangan wilayah perbatasan yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya (Entikong sebagai PKSN dan BDC).
4. Tinjauan terhadap kinerja perekonomian menunjukkan bahwa sektor listrik, gas dan air minum, sektor perangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa merupakan sektor-sektor yang berkinerja maju. Hal ini terkait dengan fungsi kawasan perbatasan dengan aktivitas ekonomi yang mulai menggeser peran pertanian dalam perekonomian wilayah. Dinamika perkembangan kawasan perbatasan berimplikasi terhadap sektor-sektor yang berkembang, termasuk berkembangnya sektor sekunder dan tersier yang diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi.
5. Aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kondisi wilayah perbatasan yang memungkinkan terjadinya distorsi pasar dan fenomena osmosis dalam aliran ekonomi. Secara distorsi pasar, Entikong terbentur oleh kebijakan yang membatasi perdagangan yang terjadi sehingga jangkauan pasar tidak optimal. Sedangkan jika dilihat dari fenomena osmosis, Entikong dengan berbagai keterbatasan infrastruktur menyebabkan aliran produk barang mengalir ke Malaysia melalui jalan yang non formal, hal ini berimbas pada disparitas perekonomian antara Entikong dengan Sarawak, karena nilai tambah dari produk tersebut didapatkan oleh Sarawak. Kedua fenomena tersebut (*distorsi* dan *osmosis*) merupakan indikasi bagi perlunya

pembenahan dari sisi penyediaan terhadap infrastruktur dan regulasi efektif, sehingga kondisi disparitas yang ada dapat diminimalisir.

6. Entikong memiliki peluang dalam pengembangan kawasan perbatasan darat antarnegara. Hal ini terlihat dari adanya beberapa elemen penting dalam pengembangan kawasan perbatasan antara Entikong-Sarawak. Elemen tersebut antara lain adalah budaya, kerangka kerja institusi, ketertarikan sektor swasta, pendekatan infrastruktur, dan kebijakan. Beberapa elemen tersebut merupakan modal yang penting dalam melandasi langkah-langkah ke depan, khususnya dalam menyiapkan Entikong sebagai pusat kegiatan ekonomi, sekaligus pintu gerbang internasional yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai wilayah strategis nasional.
7. Strategi pengembangan kawasan perbatasan Entikong terkait dengan upaya dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Strategi tersebut bersifat mendukung kebijakan eksisting dan termasuk strategi perencanaan dalam jangka menengah dan panjang. Strategi tersebut antara lain adalah: mendorong regulasi yang kondusif dan operasional bidang pengembangan perekonomian kawasan perbatasan, menyusun *road map* penataan ruang yang efektif dan operasional, melakukan improvisasi pengembangan infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan (*hard & soft infrastructure*), meningkatkan peran sektor unggulan dan mendorong sektor lainnya dalam pertumbuhan, meningkatkan perhatian pada sustainabilitas pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, fasilitasi perdagangan yang sifatnya internal dan eksternal. Beberapa strategi tersebut diharapkan dapat menjadi arahan dalam pengembangan kawasan perbatasan Entikong dengan ciri khas perbatasan yang aktivitas ekonominya menjadi perhatian utama.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan studi yang dilakukan, maka dapat dihasilkan serangkaian rekomendasi menyangkut strategi pengembangan kawasan perbatasan Entikong dalam perspektif ekonomi. Rekomendasi tersebut ditujukan terhadap pihak-pihak terkait maupun studi lanjutan.

### *a. Rekomendasi terhadap Pihak-Pihak Terkait*

Strategi pengembangan kawasan perbatasan Entikong dalam perspektif ekonomi terkait dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Peran *stakeholder* pembangunan tersebut di wilayah perbatasan sangat penting, terlebih dari hasil temuan studi yang menunjukkan adanya



pertumbuhan ekonomi namun belum mampu mendorong ke arah pengembangan sebuah kawasan perbatasan. Untuk itu beberapa hal yang dapat direkomendasikan bagi *stakeholder* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dibentuknya institusi khusus yang berwenang dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan. Sehingga fungsi koordinasi lintas instansional dapat bermuara di satu pintu/administratur pengelola.
2. Kebijakan yang integratif dengan mengkolaborasikan unsur pusat-daerah dan lintas sektoral. Karena fungsi kawasan ini sebagai kawasan yang strategis dan menyangkut berbagai aspek yang berperan baik secara nasional, regional, maupun internasional. Kebijakan tersebut seharusnya dalam posisi yang saling mendukung dan menunjang percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.
3. Kerjasama berbagai pihak dalam upaya mendukung pertumbuhan sektor-sektor dalam perekonomian kawasan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan nilai produksi dengan menghasilkan nilai tambah bagi produksi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif pada berbagai sektor yang prioritas. Serta mendorong sektor non prioritas lainnya sebagai pendukung. Hal ini akan memunculkan adanya komplementaritas ekonomi yang saling menguntungkan bagi sebuah kawasan perbatasan.
4. Pemahaman dalam konteks dan peranan kawasan perbatasan sebagai identitas, keamanan, dan kesejahteraan. Sehingga peluang pengembangan perbatasan yang dibatasi oleh aturan/regulasi dapat dimanfaatkan secara optimal.
5. Penguatan fungsi aparatur yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang, fungsi manajerial yang koordinatif, terkait dengan potensi kawasan. Kerangka kerja institusi ini sangat penting dalam tahap Entikong dalam *typology border region* (tahapan awal sebuah kemajuan kawasan perbatasan).
6. Optimalisasi kewenangan pemerintah dalam upaya pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional dan kerjasama penataan ruang antarnegara, serta kerjasama fasilitas antarwilayah.
7. Mendorong diversifikasi potensi pasar, terkait dengan adanya distorsi di kawasan perbatasan, potensi ekonomi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dalam konteks regional dan nasional dengan didukung infrastruktur dan regulasi yang mendukung,

8. Membina potensi budaya yang merupakan elemen penting dalam pengembangan perbatasan dalam kerangka positif yang menguntungkan kedua pihak (Indonesia-Malaysia).
9. Menciptakan iklim kondusif terhadap investasi sektor swasta melalui kebijakan yang mendukung bagi masuknya investasi di perbatasan. Banyaknya minat investasi di kawasan ini seringkali menunggu adanya kejelasan pemerintah dan kondisi birokrasi dalam operasionalnya.

---

*b. Rekomendasi Studi Lanjut*

Penelitian mengenai penilaian atas kondisi pertumbuhan ekonomi di perbatasan Entikong merupakan tahapan awal dalam studi tentang pengembangan sebuah kawasan perbatasan. Setelah penelitian ini dilakukan, maka dapat dilakukan penelitian antara lain:

1. Studi mengenai pola produksi dan konsumsi masyarakat perbatasan yang ditinjau dari sisi Entikong–Sarawak, dengan input kajian ekonomi yang bersumber dari *household*/rumah tangga, akurasi penilaian terhadap aliran orang dan barang yang terjadi secara internal maupun eksternal, dengan dampak keruangannya dapat dijelaskan secara detail dalam studi ini.
  2. Studi komparasi mengenai kawasan perbatasan darat antarnegara dengan fokus perekonomian (contoh: Malaysia-Thailand, Jerman-Polandia, China-Vietnam). Tujuan dari studi ini untuk membandingkan elemen-elemen *best practice* bagi pengembangan perbatasan Entikong-Sarawak.
  3. Studi mengenai pengembangan kawasan perbatasan dalam dimensi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Fenomena menurunnya aspek lingkungan akibat maksimalisasi pertumbuhan ekonomi cenderung terjadi di perbatasan. Studi ini bertujuan mengetahui tingkat sustainabilitas yang dikaitkan dengan pengembangan kawasan perbatasan dan fungsi kawasan ini sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
-

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aelenei, V. 2001. "Dreptul frontierei de stat", *Bucharest*, vol. I, Pro Transilvania Publishing House, p. 112
- Akaha, T. and Anna, V. (eds). 2005. *Crossing National Borders: Human Migration Issues in Northeast Asia*. Japan: United Nations University Press.
- Allen, J. and Hammet, C. 1995. *A Shrinking World?* USA: Oxford University Press
- Andreas, P. and Snyder, T (eds.). 2000. *The Wall Around the West: State Borders and Immigration Controls in North America and Europe*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- Arsyad, L. 2005. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Bakosurtanal. 2009. Peta Rupa Bumi Indonesia.
- Bendavid - Val, A. 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practicioners*. Fourth Edition. New York: Preager.
- Berg, E. and Ehin, P. 2006. "What Kind of Border Regime is in the Making?: Towards a Differentiated and Uneven Border Strategy". *Cooperation and Conflict*, 2006 pp. 41- 53.[Online]. Available: <http://cac.sagepub.com>. [April 29, 2008]
- Branch, M. C. 1998. *Comprehensive Planning for the 21<sup>st</sup> Century: General, Theory & Principles*. Preager: London.
- Chandler, A. 1962. *Strategy and Structure*. Cambridge: MIT Press.
- Couldry, N .2004. In the Place of a Common Culture, What? *Cultural Studies* Vol. 26: 14.
- Creswell, J. W and Clark V. L. P. 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publications.
- Daljoeni, N. 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Alumni.
- Daniel, M. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Encarta ® World English Dicyionary [North American Edition] & (P) 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Developed fir Microsoft by Bloomsbury Publishing Plc.
- Fujimura, M. and Edmonds, C. 2006. *Impact of Cross-border Transport Infrastructure on Trade and Investment in the GMS*. ADB Institute Discussion Paper No. 48
- Giddens, A. 1985. *The Nation-state and Violence*. Vol. 2 of Contemporary History of Historical Materialism. Cambridge: Polity Press.
- Giroux, H. A. 2005. *Border Crossings, Cultural Workers and the Politics of Education*, Great Britain: Routledge.
- Glasson, J. 1977. *Pengantar Perencanaan Wilayah*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: Penerbit LPFE-UI.
- Gottmann, J. (eds.).1980. *Centre and Periphery: Spatial Variation in Politics*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Green Cross, 2000. *National Sovereignty and International Water Courses*. Green Cross International, Hague.

- Guo, R. 2005. *Cross Border Resource Management, Theory and Practice*. Amsterdam: Elsevier
- Hamberg, D. 1971. *Models of Economic Growth*. Harper & Row.
- Henrikson, A. K. 2000. Facing Across Borders: The Diplomacy of Bon Voisinage. *International Political Science Review* 2000; 21; 121. [Online], Available: <http://ips.sagepub.com>. [April 23, 2009]
- House, J. W. 1980. "The Frontier Zone: A Conceptual Problem for Policy Makers." *International Political Science Review* 1(4): 456–477.
- Housen-Couriel, D. 1994. *Some Examples of Cooperation in the Management and Use of International Water Resources*. The Armand Hammer Fund for Economic Cooperation, Tel Aviv.
- Husnadi, 2006. *Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Daratan Antar Negara*. Tesis tidak diterbitkan. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro Semarang.
- Identifikasi Potensi Perkebunan Perbatasan Kalimantan Barat*. 2008. Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Provinsi Kalimantan Barat.
- Irsan, R. 2007. *Pengaruh Jalan Lintas Batas Kalimantan Barat – Serawak Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kerusakan Lingkungan Hutan (Kasus di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)*. Tesis tidak diterbitkan. Program Studi Ilmu Lingkungan Jurusan Antar Bidang. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Ishak, A. F. 2003. *Membangun Wilayah Perbatasan Kalimantan dalam Rangka Memelihara dan Mempertahankan Integritas Nasional*. Jakarta: Indomedia.
- Kearney, M. 2004. The Classifying and Value-Filtering Missions of Borders. *Anthropological Theory*; 4; 131. Downloaded from <http://ant.sagepub>. on [May 30, 2008]
- Kecamatan Entikong Dalam Angka. 2007. Badan Pusat Statistik.
- Kertas Kerja Sidang Ke-25 KK/JKK Sosek Malindo tingkat/peringkat Provinsi Kalimantan Barat – Negeri Sarawak. Bandung, 11-13 Agustus 2009.
- Kompas. 2003. *Indonesia Bangsaku, Ringgit Uangku*. 21 Maret 2003.
- Laporan Perkembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat*. 2009. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- Laporan Akhir Identifikasi Penyusunan Program PSD Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat*. SNVT Pengembangan Kawasan Perbatasan. 2007. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Materi Paparan Bupati di Wilayah Perbatasan Antarnegara Pada Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan Barat*. 2005. Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Provinsi Kalimantan Barat.
- McIntosh, M. 2001. *Marks and Spencer: Global Companies in the Twentieth Century*. Routledge.
- Mezzadra, S. 2004. "The Right to Escape". *Ephemera* 4 (3): pp. 267–75.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Newman, D. 2006. The lines that continue to separate us: borders in our 'borderless' world. *Progress in Human Geography* 30 (2): pp. 143-161.

- Niebuhr, A and Stiller, S. 2001. *Integration Effect in Border Regions – A Survey of Economic Theory and Empirical Studies*. HWWA Discussion Paper. Hamburg.
- Noble, B. F. 2000. Institutional Criteria for Co-Management. *Policy*. 24(1), 69–77.
- Ohmae, K. 1995. *The end of nations state: the rise of regional economics*. New York: Free Press.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M2007. Tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Potensi dan Permasalahan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat*. 2006. Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Provinsi Kalimantan Barat.
- Potensi dan Permasalahan Objek Wisata Kawasan Perbatasan Antarnegara di Provinsi Kalimantan Barat*. 2008. Badan Persiapan Pengembangan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Provinsi Kalimantan Barat.
- Prescott, J. R. V. 1987. *Political Frontiers and Boundaries*. London: Allen & Unwin.
- Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Entikong Tahun 2007. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau.
- Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sanggau Tahun 2007. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau.
- Ratti, R. 1993. How Can Existing Barrier and Burdens Effect of Borders: A Theoretical Approach. in Cappellin, R. and Batey, P. J. W. (eds). *Regional Network, Border Region and European Integration*. pp. 60-69. London: Pion
- RCAP. 1996. Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples. Vol. 4. Restructuring the Relationship, 6.2. *The Contemporary law of Aboriginal Title as a basis for Action*. Minister of Supply & Services Canada, Royal Commission on Aboriginal Peoples, Ottawa.
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Entikong*. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, 2003.
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Niaga Terpadu dan Industri Pengolahan Entikong*. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, 2005.
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Entikong dan Sekayam*. Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau, 2003.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Kecamatan Entikong*. Badan Perencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau, 2006.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau 2004-2014*. Badan Perencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- Revisi Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus Pelayanan Terpadu Entikong*. Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Lemlit Trisakti, 2003.
- Richardson, H. W. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Terjemahan Paul Sitohang, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Rodriguez, N. 1996. 'The Battle for the Border: Notes on Autonomous Migration, Transnational Communities, and the State'. *Social Justice* 23(3): 21–37.
- Rumford, C. 2006. 'Borders and bordering', in G. Delanty (ed.) *Europe and Asia Beyond East and West: Towards a New Cosmopolitanism*. London: Routledge.

- \_\_\_\_\_. 2006. Theorizing Borders. *European Journal of Social Theory*. 9(2): 155–169. Sage Publications.
- Savenije, H.G. and van der Zaag, P. 2000. “Conceptual framework for the management of shared river basins with special reference to the SADC and EU”. *Water Policy*. Vol 2, pp. 9–45.
- Silvers, A. L. 2000. Limited Linkage, Demand Shift and the Transboundary Transmission of Regional Growth. *Regional Studies*, Vol. 34.3, pp. 239 – 251.
- Sinaga, B. M. dan Alim, M. N. 2008. *Keterkaitan sector ekonomi dan dan distribusi pendapatan di Jawa: Pendekatan Social Accounting Matrix* (Economic Sector Linkage and Income Distribution Analysis in Java: Social Accounting Matrix Approach), [Online], Available: <http://ejournal.unud.ac.id> [Januari 29, 2008]
- Singh, J. 2000. *Transboundary Conservation in the African Context: A Threat to Sovereignty?* Paper presented at the Border Regions in Transition—IV: Rethinking Boundaries, Geopolitics, Identities and Sustainability, February 20–24, Chandigarh, India.
- Soekanto, S. 2003. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Swinburn, G. et al. 2006. *Local Economic Development: A Primer Developing and Implementing Local Economic Development Strategies and Action Plans*. Washington DC: The World Bank
- Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Uiboupin, J. 2007. *Cross border cooperation and economic development in border regions of Western Ukraine*. Electronic Publications of Pan European Institute. [Online]. Available: <http://www.tse.fi/pei/pub> [April 20, 2009].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008. Tentang Wilayah Negara
- Van Well, L. 2006. Cross-Border Typologies in the Enlargement Area. Results from the ESPON 1.1.3 Report. *Enlargement of the European Union and its Polycentric Spatial Structure*. Royal Institute of Technology.
- Walters, W. 2006. Border Control. *European Journal of Social Theory*; 9; 187. London: Sage Publications.
- Wu, C. T. 2001. Cross-Border Development in a Changing World: Redefining Regional Development Policies. In Edgington, D.W., Fernandez, A. L. and Hoshino, C. (eds). *New Regional Development Paradigm*. Vol. 2. London: Greenwood Press.
- Yeung, H.W. 2000. Local Politics and Foreign Ventures in China’s Transitional Economy: the Political Economy of Singaporean Investments in China. *Political Geography*. 19(7): 809–40.
- Yunus, H. S. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**DENDY KURNIADI**, lahir di Bandung tanggal 20 April 1979, anak bungsu dari dua bersaudara pasangan Ir. Sudradjat dengan Diah Purbasari.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN Ciujung IV Bandung pada tahun 1990, SMPN 4 Cirebon tahun 1993, dan SMAN 1 Cirebon tahun 1996. Pendidikan Sarjana Teknik (ST), diselesaikan pada tahun 2001 di Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul Tugas Akhir *“Peran Sektor Industri terhadap Perkembangan Sektor Ekonomi Primer di Kabupaten Kendal”*. Sempat bekerja di beberapa perusahaan swasta dan pernah bekerja di Dinas Tata Kota, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (2003-2004). Pada tahun 2004 tercatat sebagai CPNS Direktorat Wilayah Timur, Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan (TPTP), Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Selanjutnya diangkat menjadi PNS pada tahun 2005 dan ditempatkan di Subdit Wilayah Timur, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum hingga sekarang.

Menikah di Semarang, tanggal 5 Juni 2005 dengan Galuh Aji Niracanti, ST, MT dengan latar belakang pendidikan yang sama (Perencanaan Wilayah dan Kota), dan bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.

Pada tahun 2008 mendapatkan beasiswa dari Pusbindiklatren BAPPENAS, untuk mengikuti pendidikan di Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang. Gelar Magister Teknik (MT), diperoleh setelah menyelesaikan studi pada November 2009 dengan predikat *cumlaude*, dengan judul Tesis *“Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarneegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”*.





